warta
bea cukai
Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2017
SIAP DITERAPKAN

VOLUME 49 | NOMOR 1 | JANUARI 2017 | ISSN 0126-2483

Hati-Hati !!

Jangan sampai Anda menjadi korban penipuan lelang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

WASPADA LAH...

Jika Anda mendapatkan tawaran barang-barang lelang dari orang yang tidak Anda kenal.

Segera hubungi ..

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

atau

BRAVO 1500225

"Connecting With Heart"

DARI REDAKSI

Awal tahun merupakan momentum pembaharuan, di mana setelah kita selesai dengan berbagai ulasan di tahun sebelumnya. Tahun baru adalah waktu yang tepat untuk kembali mengumpulkan semangat dan harapan demi menyongsong cita-cita serta perbaikan diri. Segala wujud kegagalan, tantangan, dan pencapaian hendaknya kita kantongi sebagai bekal. Sisa-sisa perjuangan dan jerih payah di tahun 2016 kita bingkai sebagai proses yang indah.

Warta Bea Cukai pada tahun 2016 telah berupaya memperbaiki kualitas diri dengan meningkatkan tampilan maupun isi supaya sesuai dengan keinginan pembaca dan tentunya terus memberikan informasi kepabeanan dan cukai. Di tahun 2017, Warta Bea Cukai (WBC) berusaha mengikuti era digitalisasi dalam persebaran informasi. Dengan mengurangi jumlah cetakan, WBC di tahun 2017 berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam hal distribusi majalah WBC melalui wujud e-book yang dapat diakses maupun diunduh di website Beacukai.go.id.

Januari, rubrik Laporan Utama Majalah WBC mengangkat tema tentang Amandemen ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatur (AHTN) 2012 yang menghasilkan AHTN 2017. Penerapan 8 digit yang seragam untuk seluruh negara ASEAN akan mempermudah proses impor dan ekspor antar negara ASEAN dan diharapkan volume perdagangan akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan Khusus Majalah WBC mengangkat terkait penerimaan negara yang terdampak oleh melemahnya perekonomian dunia serta upaya-upaya dalam peningkatan penerimaan negara.

Sajian kami lainnya adalah galeri foto keindahan malam perayaan imlek di Pasar Gede, Surakarta. Pada rubrik sisi pegawai, jangan lewatkan kisah penuh keberanian Bonar Sitindjak mengawal perairan Teluk Nibung dari berbagai upaya penyelundupan. Serta Kantor Bea Cukai Pematang Siantar yang menjadi kantor percontohan juara II sebagai Kantor Pelayanan Percontohan Kemenkeu Tipe Pratama pada rubrik profil kantor. Juga masih ada banyak informasi menarik lainnya yang kami kemas dalam berbagai rubrik.

Sumbangan ide, kritik, dan saran serta kiriman foto maupun artikel sangat berharga bagi kami dan akan kami apresiasi. Selamat menyongsong 2017 dengan penuh semangat dan harapan. Jadikan momen yang telah dilewati sebagai pengingat untuk terus bersyukur atas segala kelimpahan yang telah diterima.

Selamat membaca!

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke **majalah.wbc@customs.go.id** dan **wartabeacukai@gmail.com** dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822
e-Mail : *wartabeacukai@gmail.com* dan *majalah.wbc@customs.go.id*
Follow: @Warta_BeaCukai WartaBeaCukai

warta bea cukai
Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

Terbit Sejak 1968
Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LLM

PENASEHAT

SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI
Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN
Robi Toni, S.E., M.M.

DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
Drs. Marisi Zainudin Sihotang, SH, M.M.

DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN
Ir. Rahmat Subagio, M.A.

DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A

DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL
Hendra Prasmono, S.H., M.IH

DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
Muhammad Sigit, Ak, MBA

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
Ir. Harry Mulya, M.Si

DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Dwijo Muryono

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI
Dwi Teguh Wibowo, S.E.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI
M. Agus Rofiudin, S. Kom., M.M.

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI
Ir. Agus Hermawan , MA

PENGARAH
DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA
DR. Robert Leonard Marbun,SIP, MPA

PEMIMPIN REDAKSI
KASUBDIT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI
Deni Surjantoro

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Muchamad Ardani, Imam Sarjono, Sudiro, Devid Yohannis Muhammad

REDAKTUR
Isro'ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Dara Rahmania, Sumardian Wahyudiati, Muparrih, Jiwo Narendro P, Zulfaturrahmi

FOTOGRAFER
Abdur Razaq Aghni, Wahyu Valti Raja Monang, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira, Irfan Nur Ilman

REPORTER
Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahroni, Supriyadi Widjaya.

SEKRETARIAT
Indah Widaryati, Rudi Andrian

✦ DAFTAR ISI

4 ..... EVENT

8 ..... PROFIL KANTOR

10 Bea Cukai Pematangsiantar: "Betulkan Niat Dalam Bekerja"

11 ..... PERATURAN

12 ..... REPORTASE

14 Bea Cukai Dan Kapten Jack Sparrow

14 Bea Cukai Cepat, IKM Melesat, Ekspor Berlipat

15 Potensi Penerimaan Dari Ekspor Perikanan Perlu Dikembangkan Lagi Di Kupang

17 Bea Cukai Dan POLRI Rilis Tangkapan Narkotika Berkedok Barang Kiriman Pos

16 ..... LAPORAN UTAMA

18 Amandemen ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2012 Hasilkan AHTN 2017

19 ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Amendment Arisen The AHTN 2017

24 BTKI 2017 Siap Diterapkan

25 BTKI 2017 Is Ready To Be Implemented

30 ..... LAPORAN KHUSUS

32 Melemahnya Pertumbuhan Ekonomi Pengaruhi Penerimaan Bea Cukai

33 The Waning Of Economic Growth Influences Customs Revenue

36 ..... WAWANCARA

38 AHTN 2017, Mengakomodir Kepentingan Nasional Di Bidang Ekspor Impor

39 AHTN 2017, Accommodating National Interest In The Field Of Import And Export.

42 ..... FEATURE

44 Tak Ada Lagi Hanggar Di Bea Cukai Soekarno-Hatta

48 ..... SISI PEGAWAI

50 Mario Susanto: Ikhlas Menjalani Hidup

50 ..... RUANG KESEHATAN

52 Abrasi Pada Gigi

52 ..... HOBI DAN KOMUNITAS

54 Teater Seminggu

54 ..... BERBAGI PENGETAHUAN

56 ATM Obat Untuk Penyandang HIV

56 ..... OPINI

58 Memperkenalkan DJBC Dalam Kemenkeu Mengajar Di Tanah Koetaradja

60 ..... SEJARAH

62 Anjing Pelacak (K-90): Dukung Dan Perkuat Pengawasan Bea Cukai

63 ..... BEA CUKAI MENJAWAB

65 Importasi Cakram Optik

64 ..... INFOGRAFIS

66 ..... GALERI FOTO

68 ..... TRAVEL NOTES

70 Kalend Osen Dan Kisah Berdirinya Kampung Inggris

70 ..... RAGAM

72 Akhir Hidup

72 ..... KICAUAN

BEA CUKAI TEMBILAHAN SELAMATKAN RP7 MILIAR KERUGIAN NEGARA

TEMBILAHAN – Kantor Bea Cukai Tembilahan menggelar press conference dan syukuran atas prestasi dan capaian yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2016, pada Kamis (05/01). Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Tembilahan, Sulaiman mengungkapkan bahwa Bea Cukai Tembilahan berhasil melakukan penindakan dengan total kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp7.020.265.173. "Kegiatan penindakan tersebut yaitu atas komoditi Hasil Tembakau, Minuman Mengandung Etil Alkohol, Sembako (Lada Putih, Tepung Pau, Soun, Kurma, Bawang Meralh), Tekstil (Karpet, Gorden, Kaos, dan Seprai), *Microphone*, Kulkas, *LCD, Handphone*, Ban, Kursi, dan lain-lain," ujarnya. Dalam rentang 1 tahun terakhir, Bea Cukai Tembilahan diberikan target penerimaan bea masuk dalam APBN-P sebesar Rp19.967,083.000 dan kemudian direvisi menjadi Rp28.234.700.000 atau naik sekitar 41,41%. Atas kerja keras dan soliditas para pegawai, Bea Cukai Tembilahan tidak hanya dapat memenuhi target tersebut, namun juga melampauinya, yakni berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp31.329.197.036 atau sebesar 110,96%.

"DATA ANALYSIS FOR EFFECTIVE BORDER MANAGEMENT" MENJADI TEMA HARI PABEAN INTERNASIONAL 2017

JAKARTA – *T*ema peringatan Hari Pabean Internasional ke-65 berkaitan dengan tema yang diangkat *World Customs Organization* (WCO) yaitu "*Data Analysis",* setelah timbulnya kesadaran bahwa peran sukses Bea Cukai di seluruh dunia dalam menjalankan fungsinya tidak hanya bergantung kepada pelaksanaan di lapangan, melainkan harus ada dukungan kuat dari *supporting unit* yang menyediakan data akurat melalui analisis data. Dalam perayaan tersebut, diadakan apel pagi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. "Dalam manajemen risiko sistem intelijen Bea Cukai, analisis data merupakan suatu proses yang sangat penting dimana keberhasilan eksekusi *targeting* sangat bergantung pada analisis data. Saya sangat bangga, Bea Cukai memiliki analis-analis andal yang menghasilkan target akurat dan saya berharap Bea Cukai terus melakukan investasi di bidang Sumber Daya Manusia sehingga mampu menghasilkan analis yang mendukung kinerja Bea Cukai," ujarnya. Sri Mulyani juga memberikan penghargaan *WCO Certificate of Merit* bagi pegawai Bea Cukai yang berperan dalam pengembangan data analisis.

TEMUKAN TAK ADA PUNGLI, MENKO MARITIM APRESIASI BEA CUKAI TANJUNG PRIOK

JAKARTA – Menko Maritim Luhut Panjaitan berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka rapat koordinasi pembahasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk 2017 ke depan. Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, salah satunya adalah ke Tempat Penimbunan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara. Luhut tertarik dengan prosedur pemeriksaan fisik yang diterapkan di Bea Cukai Tanjung Priok, ia juga mengapresiasi atas tidak adanya pungutan liar di pegawai penerimaan dokumen. Dalam satu kesempatan, Luhut sempat menanyakan soal pungli kepada pengguna jasa yang sedang melakukan cek status dokumennya, dan mendapat jawaban memuaskan dimana selama mengurus dokumen tak pernah ada biaya yang ditarik. Hal ini diperkuat dengan tanggapan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Fadjar Donny bahwa Bea Cukai telah menerapkan program Tolak Catat Laporkan, "Maka bagi pengguna jasa yang mencoba memberi tip, bukan semakin cepat malah menjadi semakin lama kepengurusannya, karena akan Bea Cukai tindak lanjuti hal buruk tersebut" ujarnya.

MENKEU TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA DENGAN TNI

JAKARTA – Menteri Keuangan bersama Panglima TNI menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia, pada Senin (16/01), di Markas Besar TNI di Cilangkap yang bertepatan dengan acara RAPIM TNI Tahun 2017. Wujud nyata dari kerja sama ini adalah diharapkan TNI ikut berperan serta membantu mengawasi mengamankan pajak-pajak negara terutama juga dalam urusan untuk membantu pemasukan APBN. "Militer, parpol, elit, dan birokrat menjadi institusi penting menjadi pilar suatu negara. Harusnya kita bisa mendapatkan 15% dari potensi penerimaan pajak yang sekarang ada baru 11% yang artinya ada selisih 4% yang harus kita kejar," kata Sri Mulyani menekankan salah satu tujuan kerja sama untuk mengejar target potensial penerimaan pajak. Pengawasan juga menjadi penting karena banyak wilayah di Indonesia terdapat celah untuk pintu masuknya barang-barang ilegal, dengan adanya kerja sama ini, diharapkan TNI bisa membantu mengakomodir daerah-daerah tersebut.

DPR: TAMBAH OBJEK CUKAI TAHUN INI

JAKARTA – Komisi XI DPR adakan rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pencapaian Bea Cukai di tahun 2016 serta rencana kerja Bea Cukai di tahun ini. Dari paparan kinerjanya, Bea Cukai mendapat banyak apresiasi dari para anggota Komisi XI DPR RI. Beberapa hal yang juga ditekankan oleh para anggota Komisi XI untuk ditingkatkan oleh Bea Cukai, di antaranya untuk dapat segera menambah objek cukai. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa di tahun 2017, Bea Cukai telah menyiapkan kebijakan untuk mencapai penerimaan. "Ada 6 kebijakan, di antaranya mendukung optimalisasi perpajakan dengan mempererat hubungan kerja sama antara Bea Cukai dengan Ditjen Pajak, menekan *dwelling time* secara proporsional, melakukan hilirisasi industri dalam negeri dengan memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan Kawasan Berikat, melakukan penambahan objek cukai, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," jelasnya.

BEA CUKAI BAHAS IMPLEMENTASI UU KEPABEANAN DAN CUKAI

JAKARTA – Bea Cukai adakan kick off meeting Tim Evaluasi Impementasi Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, pada Rabu (11/01), di Kantor Pusat Bea Cukai. Dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi ditekankan bahwa suatu undang-undang harus dapat mengakomodasi cita-cita ke depan suatu instansi, tidak hanya diterapkan pada satu waktu. "Jika dulu Bea Cukai lebih cenderung dalam bidang revenue, saat ini Bea Cukai harus mengakomodasi fasilitasi perdagangan," lebih lanjut Heru menambahkan. Selain memberikan fasilitas, dan mengumpulkan penerimaan, Bea Cukai tidak dapat mengesampingkan perannya dalam mengawasi peredaran barang ilegal dan berbahaya. Heru mengungkapkan Bea Cukai harus dapat melakukan sistem pengawasan yang modern, karena ancaman perdagangan semakin beragam tekniknya. Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan Bea Cukai harus dapat mengambil tindakan yang memiliki landasan hukum agar. dapat mencegah upaya-upaya ilegal tersebut.

BEA CUKAI TEGAL MUSNAHKAN DVD PORNO DAN SEX TOYS

TEGAL – Kamis (29/12) Bea Cukai Tegal telah memusnahkan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan periode tahun 2013 s.d 2016. Perkiraan nilai barang yang dimusnahkan tersebut adalah Rp63.648.000,00, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp39.263.240,00. Barang-barang tersebut merupakan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Barang penindakan di bidang kepabeanan merupakan barang-barang impor yang sebagian didapat dari kiriman melalui PT Pos Indonesia yang ditegah karena tidak dapat memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan impor dari instansi teknis. Barang-barang tersebut di antaranya adalah 1 keping DVD Porno, 6 Pieces sex toys, 2 Pieces Air Soft Gun serta 170 paket obat-obatan dan kosmetik. Sedangkan barang hasil penindakan di bidang cukai didapat dari hasil operasi pasar yang terdiri atas 1.421 botol MMEA , 10.560 batang rokok ilegal serta 6.000 gram tembakau iris ilegal. Menurut Kepala Bea Cukai Tegal, Yanti Sarmuhidayanti, penindakan ini merupakan wujud sinergi yang baik antar berbagai instansi di wilayah kerja Bea Cukai Tegal melalui pertukaran informasi serta dengan melaksanakan operasi bersama. Hal tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap peredaran barang ilegal. Barang tersebut telah dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan menggunakan stoom/walls.

BEA CUKAI LAMPUNG BERI PENYULUHAN PADA CALON TKI

LAMPUNG – Bertempat di Islamic Center (04/1), Bea Cukai Bandar Lampung melaksanakan Sosialisasi dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang ditujukan kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Calon TKI yang ada di acara tersebut akan bekerja di Malaysia yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Lampung dari berbagai kalangan, usia, dan jenis kelamin. Pembekalan ini merupakan kegiatan rutin yang diterima oleh calon TKI. Materi sosialisasi yang diberikan oleh Bea Cukai terkait barang kiriman pos, barang bawaan penumpang, barang pindahan, dan modus-modus penyelundupan. Maksud dari sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan calon TKI yang kemungkinan kurang mengerti tentang prosedur keluar masuknya barang dari dan/atau ke luar negeri. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan calon TKI tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sosialisasi berlangsung dengan kondusif dan tingginya antusias para peserta terhadao materi yang dibawakan. Dengan pembekalan ini diharapkan para calon TKI dapat lebih memilih dan memilah barang yang akan dibawa atau dikirimkan kembali ke Indonesia, serta lebih mengerti garis besar dari prosedur keluar masuknya barang dari dan/atau luar negeri.

BEA CUKAI PASURUAN SALURKAN RATUSAN SAK BERAS KE KORBAN BANJIR

PASURUAN – Bantuan ratusan sak beras, susu, biskuit dan karpet masjid untuk korban banjir Pasuruan terus mengalir. Kali ini Bea Cukai Pasuruan menyalurkan bantuan ke tiga titik berbeda. “Kami merasa tergerak untuk ikut membantu korban banjir. Kasihan mereka karena ada sejumlah desa yang sudah sepekan tergenang banjir,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan, Bier Budi K, saat menyalurkan bantuan di Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Jumat (20/1/2017). Selain logistik, bantuan juga berupa puluhan karpet yang disalurkan ke masjid dan musala yang terendam banjir. Mayoritas karpet di musala atau masjid yang terendam banjir itu rusak karena terkena air dan lumpur. Selain di Beji, bantuan juga disalurkan ke Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati dan Desa Kalianyar, Kecamatan Bangil. Sejumlah desa di Kabupaten Pasuruan masih tergenang banjir setinggi antara 10-40 cm, antara lain di Beji, Bangil, Rejoso dan Grati. Selain itu sejumlah infrastruktur dan lahan pertanian juga rusak.

BEA CUKAI PEMATANGSIANTAR:

"BETULKAN NIAT DALAM BEKERJA"

Haru dan senang, itulah perasaan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Pratama Pematangsiantar, Zulkarnaen, saat diumumkan menjadi juara II sebagai Kantor Pelayanan Percontohan Kemenkeu Tipe Pratama.

Ditanya mengenai persiapan saat dicalonkan, Zulkarnaen menjelaskan tidak ada persiapan khusus karena memang sejak bertugas di Kantor Bea Cukai Pematangsiantar, Zul, panggilan akrab Zulkarnaen, ingin memberikan sesuatu terhadap kantor yang terletak di kampung halamannya ini. Semenjak Zulkarnaen ditunjuk sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Pematangsiantar pada bulan Mei 2013, ia melakukan perbaikan fisik kantor dengan memanfaatkan anggaran yang ada dan memotivasi seluruh pegawai, petugas keamanan dalam (PKD), dan *cleaning service* (CS) untuk melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

"Saya merasa harus membuat 'sesuatu' bagi kantor ini, jadi pelan-pelan saya perbaiki. Mulai dari sistem pelayanan dan pengawasannya, hingga fisik lingkungan kantor. Tentu hal itu juga tidak akan terwujud tanpa bantuan teman-teman di sini," ungkap Zul.

Pembenahan-pembenahan yang dilakukan Zulkarnaen tidak hanya fisik seperti sarana dan prasarana tapi juga disiplin, inovasi, dan yang lainnya. Bagi Zul, peran pegawai sangat baik dan menyadari bahwa kewajiban yang dilakukan merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Perbaikan maupun inovasi-inovasi yang telah dilakukan menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Utara, Iyan Rubianto, dan meminta Kantor Bea Cukai Pematangsiantar untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi Kantor Percontohan. "Terutama saat beberapa kali datang mengunjungi kantor Bea Cukai Pematangsiantar, Pak Iyan mengatakan bahwa Pematangsiantar mempunyai potensi untuk mengikuti Kantor Percontohan," tuturnya.

Pematangsiantar melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan, yaitu menciptakan inovasi aplikasi mandiri yang diberi nama **SIBANDAL** (Aplikasi Barang Modal) yang merupakan aplikasi permohonan perijinan pemasukan barang modal ke kawasan berikat yang berbasis *web*. Alasan membuat aplikasi **SIBANDAL** karena merasa letak geografis kawasan berikat yang jauh dari Kantor Pematangsiantar. Tujuan dibuatnya aplikasi ini ialah untuk menghemat waktu, biaya, tenaga, dan kontak antara pengusaha dan pegawai, karena pengusaha tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengajukan permohonan pemasukan barang modalnya.

Dijelaskan oleh Zulkarnaen, keunggulan **SIBANDAL** di antaranya ialah *pertama*, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan perijinan barang modal kapanpun dan di manapun. *Kedua*, pengguna jasa tidak perlu lagi menyerahkan permohonan perijinan barang modal

secara langsung kepada petugas Bea Cukai di kantor pelayanan, dan *ketiga*, permohonan perijinan barang modal dapat diproses lebih cepat dan efisien, sehingga pelayanan pada kawasan berikat lebih optimal.

Sebagai ilustrasi, Zul memberikan gambaran jarak antara kantor Bea Cukai Pematangsiantar ke PT Unilever adalah sekitar 60 km, kemudian PT Toba Pulp Lestari sekitar 200 km, bahkan ada yang berjarak 400 km, yaitu PT Nubika Jaya. "Dengan adanya aplikasi, tentu akan lebih membantu. Mereka, para *stakeholder*, tidak perlu repot datang jauh-jauh ke kantor," jelasnya.

Selain memberikan inovasi yang membantu *stakeholder*, Bea Cukai Pematangsiantar juga membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan memberikan layanan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. Tetapi, ditegaskan Zul, bahwa dalam memberikan pelayanan sesuai janji layanan memang sudah menjadi pekerjaan dan kewajiban sebagai pegawai Bea Cukai. Bagi pengusaha/ *stakeholder*, maupun masyarakat, yang telah memenuhi kewajiban atau persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, dapat diberikan pelayanan.

"Jika kami tidak ikut dalam Kantor Percontohan, kami tetap melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan. Semua ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, Kantor Percontohan ini sebagai standar ukuran pelayanan yang telah kami laksanakan," tegasnya.

Untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak integrasi, Kantor Bea Cukai Pematangsiantar memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (*online*) untuk mengurangi adanya pertemuan antara pegawai dan pengusaha, agar tidak terjadi pungli dan gratifikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kami mempunyai nilai-nilai yang dijalankan, semenjak saya menjadi kepala kantor, saya sampaikan kepada teman pegawai, PKD, dan CS untuk memiliki nilai "**Betulkan Niat**" dalam melakukan pekerjaan dan kewajiban. Apabila niat sudah betul, pekerjaan yang seberat apapun akan mudah dikerjakan. Tetapi kalau niatnya tidak benar, sebaik apapun sistem yang telah disediakan akan dirusak dan nilai-nilai kebaikan diabaikan," tuturnya.

Keuntungan bagi Kantor Bea Cukai Pematangsiantar dengan mendapatkan anugrah Juara II Kantor Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah dapat berbuat dan melakukan tanggung jawabnya kepada pengguna jasa dalam hal pelayanan yang baik. Juga, keuntungan bagi pengguna jasa adalah adanya kepastian bagi mereka untuk berusaha. Dengan diikuti sebagai Kantor Percontohan Kementerian Keuangan, Kantor Bea Cukai Pematangsiantar dimaknai Zul agar menjadi institusi yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tentu saja, menjadi peraih penghargaan didapatkan dari kerja sama berbagai pihak. "Kami dan *stakeholder* di Pematangsiantar bersama-sama melakukan kewajiban sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai kantor percontohan, serta dapat dipenuhi dan dilaksanakan. Kami siap apabila kapan saja dilakukan evaluasi, karena kami bekerja dengan kesadaran untuk menjalankan kewajiban yang diamanahkan kepada kami," tegas Zul.

Harapan Zul tentu dapat berbuat lebih baik lagi bagi Bea Cukai di masa-masa yang akan datang dan merasa berkat dorongan semangat dan dukungan tim dari Kanwil sehingga kantornya bisa mencapai masuk 3 besar.

"Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kanwil beserta timnya. Mewakili teman-teman (pegawai, PKD, dan CS), saya sangat berterima kasih kepada Bapak Iyan Rubianto atas penunjukkan, motivasi, maupun tim dari Kantor Wilayah yang dibentuk Bapak Kanwil untuk memberikan masukan, nasihat, dan mendorong kami di Pematangsiantar untuk mengikuti Kantor Percontohan ini," pungkasnya.

(DesiAPrawita)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.04/2016 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN

Dalam rangka menginisiasi penyatuan proses pendaftaran atas perijinan dan tanda pengenal di instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menetapkan NPWP sebagai identitas tunggal dalam pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan.

Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Registrasi Kepabeanan, antara lain :

1. Latar belakang diterbitkannya PMK tersebut, antara lain:
   a. badan usaha yang ingin melakukan operasional usahanya di Indonesia memerlukan berbagai macam perijinan dan tanda pengenal entitas bisnis dari berbagai macam instansi pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah;
   b. masing-masing instansi mengeluarkan identitas;
   c. data yang tersimpan tidak terintegrasi satu sama lain;
   d. nomor identitas yang digunakan tergantung pada jenis aktivitas yang dilaksanakan; dan
   e. waktu pelayanan untuk mendapatkan nomor induk kepabeanan (NIK) masih selama 5 (lima) hari kerja
2. Dari permasalahan tersebut maka DJBC bertekad untuk lebih meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanan, sehingga perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai registrasi kepabeanan dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.
3. Tujuan Penyusunan PMK Tentang Registrasi Kepabeanan yaitu:
   a. agar nantinya hanya ada satu identitas dalam rangka berhubungan dengan Pengguna Jasa Kementerian Keuangan (DJBC dan DJP);
   b. agar nantinya terdapat satu data yang lengkap dan utuh sehingga menjamin kesamaan/integritas data antar instansi dalam Kementerian Keuangan dalam menggambarkan Pengguna Jasa; dan
   c. menurunkan waktu pelayanan dalam melakukan Registrasi Kepabeanan dari 5 (lima) hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja.
4. Dalam PMK tersebut hal-hal yang diatur antara lain:
   a. penghapusan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NPPJK);
   b. penggunaan NPWP sebagai identitas tunggal dalam pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan;
   c. penggunaan istilah Akses Kepabeanan sebagai output dari Registrasi Kepabeanan; dan
   d. janji layanan registrasi kepabeanan dipersingkat dari 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja.

Nb : Peraturan dapat dilihat di peraturan.beacukai.go.id

BEA CUKAI DAN KAPTEN JACK SPARROW

Di geladak kapal Black Pearl, kapten Jack Sparrow beradu pedang dengan Davy Jones, setengah bajak laut setengah monster yang berusaha merebut kapalnya. Dalam duel di tengah hujan itu, beberapa kali rambut dan topi khas Jack Sparrow hampir terkena sabetan pedang Davy Jones.

Di pelosok Ubud, di etalase salah satu perusahaan yang masih tergolong industri kecil dan menengah, terpajang rapi properti yang familiar bagi penggemar film Hollywood. Rambut panjang setengah gimbal, dengan topi khas pelaut seperti yang dikenakan kapten Jack Sparrow merupakan salah satu diantaranya. Berdiri sejak 1998, PT Sari Rambut – nama perusahaan tersebut- adalah spesialis dalam memproduksi wig untuk keperluan film dan teater.

Kapten Jack Sparrow adalah tokoh utama dalam film fiksi Pirates of the Caribbean. Kapten nyentrik ini diperankan oleh actor Johnny Depp. Siapa sangka, rambut palsu yang dikenakan Johnny Depp saat memerankan Jack Sparrow diproduksi di Indonesia.

Walaupun masih tergolong IKM, PT Sari Rambut selama ini telah mengekspor wig produksinya ke dunia internasional. Industri film Hollywood dan industri opera Broadway merupakan salah satu konsumennya. Bahan baku untuk membuat wig tersebut sebagian besar diimpor dari India, tentunya dengan membayar bea masuk dan pajak impor.

Melihat potensi ekspor IKM yang sangat besar ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.04/2016 yang berlaku efektif pada tanggal 20 Januari 2017. PMK ini khusus mengatur tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas impor yang dilakukan oleh IKM, sepanjang hasil produksinya diekspor. Fasilitas yang lebih dikenal dengan fasilitas KITE IKM ini sangat cocok untuk dimanfaatkan oleh IKM seperti PT Sari Rambut, yang memerlukan impor bahan baku untuk menghasilkan hasil produksi mereka. "Kendala IKM selama ini salah satunya ada pada struktur biaya produksi. Bahan baku mereka mahal karena harus membayar bea masuk dan pajak impor", Robi Toni, Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC, menjelaskan. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Fasilitas Impor Tujuan Ekspor DJBC, Yamiral Azis Santoso, juga menjelaskan bahwa selama ini fasilitas serupa telah diberikan kepada perusahaan besar. "Melihat potensi ekspornya yang besar, kami berpikir akan bagus kalau fasilitas ini juga diberikan kepada IKM", tambahnya.

Saat ditanya bagaimana cara untuk dapat memanfaatkan fasilitas KITE IKM, tim DJBC menjelaskan bahwa IKM cukup mengajukan permohonan ke kantor bea cukai terdekat. "Persyaratan administratifnya kami permudah. Lengkapnya dapat dilihat di PMK 177/PMK.04/2016".

Pada akhir Januari 2017, DJBC juga akan melakukan kegiatan peluncuran fasilitas KITE IKM di Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. PT Sari Rambut, bersama

beberapa IKM lain di seluruh Indonesia, diproyeksikan ikut serta sebagai penerima fasilitas ini. Setelahnya, mereka dapat melakukan impor bahan baku yang diperlukan tanpa perlu membayar bea masuk dan pajak impor. "Kami yakin ongkos produksi bisa dihemat dengan fasilitas ini. Harga barang produksi IKM juga akan lebih kompetitif sehingga saya saing mereka jadi lebih kuat", ujar Yamiral lagi. Dan tentunya, Jack Sparrow akan selalu menggunakan buatan Indonesia karena dapat membeli wig-nya dengan harga murah dari IKM Indonesia.

BEA CUKAI CEPAT, IKM MELESAT, EKSPOR BERLIPAT

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki potensi dan sumbangsih yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. IKM menyumbang 57% produk domestik bruto Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun demikian, kontribusi IKM Indonesia terhadap ekspor nasional masih relatif rendah jika dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.

Mengetahui hal ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baru-baru ini meluncurkan terobosan berupa kebijakan pembebasan bea masuk dan pajak impor bagi IKM yang memerlukan impor bahan baku, sepanjang hasil produksinya diekspor. Fasilitas yang diberi nama fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi

jilid I pemerintahan Jokowi yang diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Kebijakan pemberian fasilitas KITE IKM ini rencananya akan diluncurkan melalui kegiatan seremonial pada akhir Januari 2017 di sentra tembaga Tumang, Jawa Tengah, yang juga merupakan salah satu sentra yang akan menggunakan fasilitas KITE IKM.

"Tumang kami pilih karena proses bisnisnya benar-benar mewakili tujuan dari fasilitas KITE IKM. Di sana banyak perajin tembaga yang produksinya diekspor sampai ke Eropa, namun bahan bakunya selama ini diperoleh melalui distributor. Dengan fasilitas KITE IKM, rantai pasok ini kami potong, dan bea masuk dan PPN impornya juga kami bebaskan. Harga produk Tumang nantinya akan lebih kompetitif karena ongkos bahan baku bisa dihemat", ujar Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai, Robi Toni.

Selain insentif fiskal berupa pembebasan pajak impor, IKM juga diberikan kemudahan operasional yang tidak main-main, seperti penyediaan modul sistem pencatatan barang secara gratis, pembebasan jaminan, dan pemberian akses kepabeanan kepada IKM yang mendaftar.

Fasilitas KITE IKM juga merupakan bagian terintegrasi dalam upaya bea cukai untuk menciptakan sistem logistik yang efektif dan efisien. Dengan fasilitas ini, akses impor dan ekspor IKM diperluas. Sebelumnya, sudah diresmikan Pusat Logistik Berikat sebagai hub bahan baku Asia Pasifik. Ada pula Kawasan Berikat dan Gudang Berikat yang selama ini telah dikenal luas. Selain dari luar negeri, pengadaan bahan baku serta ekspor hasil produksi IKM juga dapat dilakukan melalui tempat-tempat ini.

Teknisnya, IKM yang proses bisnisnya sesuai dan tertarik untuk menggunakan fasilitas KITE IKM dapat mengajukan permohonan ke kantor bea cukai terdekat dari lokasi mereka. "Kami dengan senang hati akan memberikan asistensi kepada IKM yang ingin menggunakan fasilitas KITE IKM", ujar Kepala Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Bea Cukai, Yamiral Azis Santoso

POTENSI PENERIMAAN DARI EKSPOR PERIKANAN PERLU DIKEMBANGKAN LAGI DI KUPANG

Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang meliputi 10 wilayah, yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur , Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku pada Pos Pengawasan Ilewaki di Pulau Wetar.

Yang melayani dan mengawasi beberapa Pos Pengawasan dan Pelabuhan antara lain: Pelabuhan Laut Tenau Kupang, Pelabuhan Udara Eltari, Kantor Pos Lalu Bea Kupang, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Waingapu, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tambolaka, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Baa Pulau Rote, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Mau Hau, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Rua, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Ilwaki Wetar dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai Oepoli.

Budi Iswantoro. Potensi di Kupang sangat besar untuk ekspor ikan.

OPERASI PASAR

WORKSHOP PELAYANAN

Melihat begitu luasnya Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang maka membutuhkan dana yang besar juga untuk dapat melaksanakan kegiatan pengawasan secara maksimal. Karena keterbatasan tersebut, pelaksanaan tugas pengawasan serta pelaksanaan program kerja yang lain dirasakan belum dapat dikatakan optimal, seperti disampaikan Kepala KPPBC TMP C Kupang, **Budi Iswantoro**, dimana untuk mengatasi kekurangan tersebut pihaknya selalu mengusulkan untuk peningkatan jumlah anggaran guna optimalisasi tugas pengawasan di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang yang begitu luas. Sementara dalam pelaksanaan kegiatan diterapkan skala prioritas.

Termasuk untuk obyek pengawasan dan pelayanan yang dilaksanakan rutin oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang adalah impor, ekspor, dan cukai dari pemilik NPPBKC MMEA baik produsen maupun penjual eceran, dan karena begitu luasnya wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang maka mengharuskan dilakukannya skala prioritas dalam pelaksanaan tugas.

Mengenai kegiatan pengawasan, baik di darat maupun di laut, menurut Budi Iswantoro dilakukan dengan beberapa tahap. Untuk di darat dilakukan operasi pasar setiap bulan antara 1-4 kali. Sedangkan untuk patroli laut dilakukan 2 kali dalam sebulan. Namun selama tahun 2016 belum ada prestasi yang menonjol dari hasil kegiatan operasi dan patroli, karena temuan pelanggaran masih kecil. Seperti yang belum lama ini dilakukan penegahan atas NPPBKC di wilayah Rote, menjual MMEA tanpa NPPBKC dan dikenakan denda. Kemudian temuan NPP (Narkotik, Prekusor dan Psikotropika) yang terakhir pada 2015 pada bulan Oktober di Kantor Pos Lalu Bea juga ditemukan NPP dan di tahun 2016 belum ditemukan pelanggaran.

Mengenai peredaran rokok palsu atau polos, pada bulan Oktober 2016 saat operasi pasar ditemukan kasus rokok polos dan dilakukan penegahan hanya 50 karton. Setelah itu bidang PLI melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi ke para pemilik TPE dan tempat penjualan rokok untuk tidak menjual atau mengedarkan rokok illegal.

Untuk patroli laut, KPPBC Kupang bekerjsama dengan KKP (Kelautan dan Perikanan) telah mengajukan MoU patroli bersama dengan instansi KKP untuk pengawasan illegal fishing, jika terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan maka KPPBC Kupang yang menanganinya. Kemudian operasi bersama melalui Operasi Jaring Wallacea kerjasama antara Direktorat P2 Kantor Pusat DJBC dan Kanwil DJBC MPPB yang pada akhir November 2016 telah berakhir. Mengenai sarana pengawasan yang dimiliki KPPBC saat in terdapat dua buah kapal patroli ukuran 15 meter BC 150054 yang masih beroperasi dengan baik. Namun untuk yang satunya masih dalam proses melengkapi alat navigasi dan pemasangan mesinnya.

Pencapaian Target Penerimaan

Berbeda dengan KPPBC lain yang mempunyai kepastian jadwal, khususnya kegiatan pengawasan dan pelayanan impor barang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang sangat tergantung pada kegiatan impor yang sifatnya insidentil/proyek sesaat. Hal ini tentu saja saja berpengaruh sangat besar terhadap analisa dan proyeksi penerimaan, khususnya penerimaan bea masuk. Sehingga dibutuhkan adanya fleksibilitas dalam penetapan target penerimaan bea masuk.

Sementara untuk penerimaan cukai dapat lebih mudah diprediksi. Akan tetapi jumlahnya

sangat tergantung sekali dengan total produksi dari produsen MMEA di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang yang skalanya kecil. Strategi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif atas produsen MMEA tersebut.

Target penerimaan kantor Bea Cukai Kupang adalah untuk pabean sebesar Rp 10.000.000.000,- sampai dengan tanggal 14 kemarin realisasinya sudah kurang lebih Rp 9.500.000.000,- sekitar 92 persen. Sedangkan untuk cukai target awal sebesar Rp 800.000.000,- kemudian direvisi menjadi Rp 600.000.000,- dan sudah tercapai Rp. 500 juta lebih, atau sekitar 89 persen. Di Kupang terdapat 3 pabrik MMEA golongan B, yaitu PT Industri Nusa Lontar, Cahaya Bintang Laut dan Perdana Karya Makmur.

"Jika melihat realisasi penerimaan, maka sepertinya tahun ini tidak tercapai khususnya dari sisi kepabeanan, hal ini disebabkan karena untuk penerimaan kepabeanan terutama bea masuk tergantung pada kondisi dan kegiatannya. Sebelumnya ada kuota impor beras, karena kuotanya sudah habis, ya sudah selesai kegiatannya, begitu juga barang modal milik Pertamina. PIB dalam sebulan hanya masuk 1 buah. Sedangkan untuk cukai bisa 95 persen dan kita yakin untuk cukai tercapai," ujar Budi Iswantoro.

Menyinggung masalah kendala dalam pencapaian target, maka Budi menjelaskan, salah satunya adalah sedikitnya volume kegiatan impor di wilayah Kupang. Untuk cukai, ada keluhan dari pengusaha atas persaingan kurang sehat dengan industri-industri MMEA rumahan yang dianggap cukup mengganggu usaha mereka. "Banyak sekali *home industri* MMEA di Kupang dan saking banyaknya setiap rumah jual minuman-minuman misalnya *sofi*, dijual di kios2 kecil atau dipikul dijual keliling. Nah ini Pengusaha mengeluhkan kenapa ini tidak dikenakan cukai. Jadi kita yang sering ditekan, maka itu tugas kita menjelaskan kepada para pabrikan."

Mengenai potensi yang bisa digali di wilayah Kupang untuk masa yang akan datang, Budi menjelaskan, sebenarnya potensi di Kupang sangat besar untuk ekspor ikan yang hingga saat ini belum dikembangkan juga, hanya baru ada dua perusahaan ikan, padahal Kupang sangat potensial jika mengembangkan industri ini mengingat Kupang dilingkari banyak garis pantai dan belum banyak yang melakukan ekspor ikan. "Mungkin kita akan kembangkan kesitu jadi kerjasamanya dengan dinas perindustrian atau perdagangan bagaimana untuk pengurusan izin-izin nya," tandasnya.

(ariessuryantini)

BEA CUKAI DAN POLRI RILIS TANGKAPAN NARKOTIKA BERKEDOK BARANG KIRIMAN POS

JAKARTA – Dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan drastis penyelundupan narkotika melalui jalur udara. Adanya eksekusi mati bagi terpidana penyelundup narkotika yang sebagian besar berperan sebagai kurir, membuat jalur pengiriman melalui pos atau perusahaan ekspedisi barang lebih menjadi pilihan sindikat.

Hal ini terbukti dengan adanya 90 kasus penyelundupan melalui pos yang berhasil ditindak oleh petugas Bea Cukai, lebih banyak dua kali lipat dari kasus penyelundupan dengan cara hand carry oleh kurir. Angka ini termasuk dua kasus penyelundupan methamphetamine (sabu) asal Tiongkok dan Filipina yang berhasil dibongkar petugas Bea Cukai Soekarno Hatta pada Desember 2016.

Pada kasus pertama, petugas Bea Cukai mendapati sebuah paket kiriman pos asal Shenzhen, Tiongkok berisi mesin pembuat kopi yang di dalamnya terdapat 235 gram sabu, di Kantor Tukar Pos Udara Soekarno Hatta, Kamis (01/12). Menindaklanjuti temuan ini, petugas Bea Cukai bekerja sama dengan Polda Metrojaya melakukan control delivery dan berhasil mengamankan 2 orang berinisial FF dan MR yang bertugas mengambil paket. Tim gabungan pun akhirnya mendapatkan dua nama narapidana, MFF dan IVE yang diidentifikasi sebagai pengendali sindikat narkotika tersebut.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Erwin Situmorang mengungkapkan bahwa tak berselang lama dari kasus pertama, tepatnya pada Jumat (16/12) di Kantor Pos Jakarta Barat, tim gabungan Bea Cukai dan Polda Metro Jaya kembali mengamankan 2 orang berinisial MR dan A yang berperan sebagai pengambil dan pengendali penyelundupan 403 gram sabu berkedok barang kiriman pos. "Kali ini sabu tersebut disamarkan dalam paket kiriman pos asal Filipina berisikan tromol motor, dengan nama dan alamat penerima yang identik dengan kasus sebelumnya," ujar Erwin.

Para tersangka dalam kasus ini dikenakan pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas keberhasilan penindakan penyelundupan sabu ini, 38.000 jiwa manusia telah diselamatkan.

AMANDEMEN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE (AHTN) 2012 HASILKAN AHTN 2017

Penerapan 8 digit yang seragam untuk seluruh negara ASEAN akan mempermudah proses impor dan ekspor antar negara ASEAN dan diharapkan volume perdagangan akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat informasi struktur klasifikasi barang, bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan pajak dalam rangka impor (PDRI). BTKI saat ini, yaitu BTKI 2012, diberlakukan mulai 1 Januari 2012 dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 213/PMK.011/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

BTKI bukanlah buku daftar barang, melainkan buku penggolongan barang yang disusun berdasarkan sistem klasifikasi barang internasional yaitu HS (*Harmonized System*) yang disusun oleh World Customs Organization (WCO) dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) yang disusun oleh AHTN Task Force. Kode HS digunakan oleh Bea Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Lembaga (K/L) lainnya untuk memantau dan mengendalikan impor dan ekspor komoditas melalui tarif bea masuk/bea keluar, pengumpulan statistik perdagangan internasional, Surat Keterangan Asal (SKA), PPN atau PPh impor, insentif bea masuk seperti bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP), penetapan BM tindakan (misalnya BM *anti dumping*, BM tindakan pengamanan/*safeguard*, BM imbalan/*counterveiling duties*), negosiasi perdagangan (misalnya jadwal konsesi tarif di WTO), tarif transportasi dan statistik, pemantauan barang yang dikendalikan larangan dan pembatasan (misalnya, limbah, narkotika, senjata kimia, spesies yang terancam punah), pengawasan dan prosedur di Bea Cukai, termasuk penilaian risiko, teknologi informasi, dan kepatuhan.

Menurut Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai, Badang Kebijakan Fiskal (BKF), **Dr. Nasruddin Djoko Surjono**, saat ini BKF beserta Bea Cukai sedang merumuskan sistem klasifikasi dan pembebanan tarif yaitu BTKI 2017 dimana hal ini berdasarkan amandemen HS yang dilakukan WCO versi 2017 yang diimplementasikan dalam AHTN 2017.

Lebih lanjut menurut Nasruddin, dalam proses pembahasan klasifikasi barang untuk tingkat 8 digit (AHTN) dalam forum AHTN Task Force, Bea Cukai dan BKF menerima masukan dari pembina sektor (yaitu K/L terkait) untuk dibahas dalam sidang-sidang AHTN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga 2016. Bea Cukai bertindak sebagai *lead* dalam sidang AHTN Task Force, mengingat pembahasannya adalah pembahasan teknis terkait klasifikasi barang dan dibantu oleh BKF selaku tim tarif yang membantu melihat dari sisi kebijakan tarifnya. Sidang-sidang tersebut dilaksanakan bergilir di negara-negara ASEAN.

Dalam pembahasan penentuan pembebanan tarif bea masuk maupun bea keluar, pembahasan dilakukan dalam tim tarif yang dimulai dari pembahasan teknis selanjutnya diproses dalam pleno tim tarif dengan memperhatikan kajian atas dampak yang ditimbulkan dari pengenaan bea masuk. Sedangkan dari sisi PDRI, pembahasan dilakukan dengan sektor K/L terkait beserta Ditjen Pajak.

Dalam melakukan proses penyusunan BTKI ini, terdapat beberapa kriteria perubahan yang meliputi, antara lain:

Perubahan editorial atas uraian barang
Perubahan catatan-catatan pada HS
Penambahan pos tarif baru
Penghapusan pos tarif
Penggabungan pos tarif
Pemecahan pos tarif
Metode proses penetapan tarif bea

ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE (AHTN) AMENDMENT ARISEN THE AHTN 2017

The implementation of 8-digit harmonized nomenclature will facilitate the import-export process and to uplift the trade volume between the ASEAN members, resulting significant economy growth of Indonesia.

Indonesia Customs Tariff Book (BTKI) consists of goods classification structure, Import Duty (BM), Export Duty (BK) and Tax in Terms of Imports (PDRI). BTKI 2012, the current one, enacted since 1st January 2012 and assigned with Minister of Finance Regulation No. PMK 213/ PMK.011/2011 concerned Stipulation the System of Classifying Goods and Charging Duties on Imported Goods.

BTKI is not a goods-list book, but a goods-classification based on international classification system called HS (Harmonized System) arranged by World Customs Organization (WCO) and ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) by AHTN Task Force. HS Code is used by Customs, Central Bureau of Statistics (BPS), Bank Indonesia (BI), and other related government agencies to watch and control the imported/exported commodities via Import/Export duty, to collect international trade stats data, Certificate of Origin (SKA/CoO), VAT or Income tax of import, Customs Duty such BM-DTP incentive, stipulation of act duties (i.e.: Anti-dumping duties, Safeguard Duties, Countervailing duties), trade negotiation (i.e.: schedule of tariff concession on WTO), statistics and transport tariff, surveillance on restricted and prohibited goods (i.e.: waste, narcotics, chemical weapon, endangered species), Customs supervision and procedures including I.T. risk assessment and compliance.

*According to Head of Customs and Excise Policy Division, Fiscal Policy Agency (BKF), **Dr. Nasruddin Djoko Surjono**, BKF and DGCE are currently formulating classification system and tariff assessment under BTKI 2017 based on amended HS Version 2017 by WCO that implemented in AHTN 2017.*

Moreover, Nasrudin said, in process of defining goods classification for 8-digit AHTN in AHTN Task Force, DGCE and BKF collected inputs and suggestions from other government agencies to be discussed in AHTN sessions- that have been held since 2014 to 2016. DGCE took the lead in AHTN Task Force discussions regarding the main technical role in goods classifications and assisted by BKF as the tariff team to view from perspective of tariff policies. The sessions take turns in every ASEAN members.

In discussion to define the duty charge on import and export, the tariff team commenced from technical discussion and proceeded to plenary meeting with consideration based on impact studies whereas from PDRI perspective, involving other related government agencies and Directorate General of Tax.

In the making of BTKI, there are changes in criteria such:

Editorial Changes on goods description
HS Notes change
Added new Tariff Headings
Deletion of Tariff Headings
Merged Tariff Headings
Separation of Tariff Headings

To define the import duty, tariff team specified the method using correlation-table from AHTN 2012 to AHTN 2017, export-import grading, and goods' dominant characteristics in the new classification.

"To amend the goods classification at WCO, BKF was not involved in the discussion, due to Customs' main role for those matters with their

masuk dalam pembahasan di tim tarif, secara teknis memperhatikan tabel korelasi dari AHTN 2012 ke AHTN 2017, selain itu pula memperhatikan pembobotan dari nilai ekspor impor, serta karakteristik dominan dari barang yang ada di klasifikasi baru tersebut.

"Untuk amandemen teknis klasifikasi barang di WCO, BKF tidak terlibat dalam pembahasan, dikarenakan hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi langsung dari Bea Cukai dengan *Customs Taskforce*-nya. Namun peran BKF disini terkait dari sisi pembebanan tarif bea masuk dan PDRI-nya. Adapun peran BKF melalui Tim Tarif ialah mengkoordinasikan masukan dari pembina sektor dalam hal tarif pembebanannya dan mengikuti sidang dalam amandemen AHTN yang selanjutnya diterapkan di Indonesia," ungkapnya.

BKF sebagai koordinator dalam proses pengusulan besaran tarif bea masuk dalam AHTN, mensyaratkan beberapa hal, yaitu harus disertai dengan dukungan data yang memadai sehingga delegasi Indonesia dalam AHTN Task Force dapat memperjuangkan kepentingan nasional secara maksimal. Data-data yang harus disertakan sebagai lampiran usulan untuk pos AHTN, antara lain:

Uraian dan spesifikasi teknis barang secara lengkap yang dapat memberikan informasi mengenai identifikasi barang seperti foto barang, proses pembuatan, komposisi, fungsi, dan informasi terkait lainnya. Informasi ini akan menjadi bagian dalam *Supplementary Explanatory Notes* ASEAN 2017 jika produk tersebut disetujui sebagai pos tarif AHTN;

Nilai perdagangan intra dan ekstra ASEAN selama periode tahun 2012 dan 2013

Dasar pertimbangan lainnya yang dapat dijadikan pembenaran mengenai pentingnya produk tersebut bagi Indonesia sehingga perlu dimasukkan dalam pos tarif AHTN

Adapun secara spesifik pos tarif Indonesia yang diakomodir oleh AHTN dapat dikonfirmasikan kembali berapa jumlahnya secara tepat di Subdit Klasifikasi Barang, Direktorat Teknis, Bea Cukai.

"Seluruh negara anggota ASEAN akan mengikuti amandemen tersebut," tutur Nasruddin. Tujuan implementasi AHTN adalah untuk memfasilitasi perdagangan di ASEAN; untuk menetapkan aturan yang jelas yang mengatur pelaksanaan klasifikasi tarif, catatan penjelasan, dan perubahannya; untuk membangun keseragaman aplikasi dalam klasifikasi barang di ASEAN; untuk meningkatkan transparansi dalam proses klasifikasi barang; untuk menyederhanakan AHTN; dan untuk membuat nomenklatur yang sesuai dengan standar internasional, yang mencerminkan perubahan pola perdagangan internasional dan teknologi.

Implementasi AHTN oleh negara anggota ASEAN juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam protokol yaitu:

Transparansi: Negara-negara anggota akan menerbitkan semua hukum, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan AHTN dan membuat mereka tersedia untuk publik secara cepat, transparan, dan mudah diakses.

Konsistensi: Negara-negara anggota akan memastikan aplikasi yang konsisten dari AHTN di setiap negara anggota ASEAN.

Efisiensi: Negara-negara anggota akan memastikan bahwa AHTN digunakan untuk meningkatkan efisien dan administrasi pengeluaran barang untuk memfasilitasi perdagangan.

Banding: Negara-negara anggota wajib menyediakan mekanisme banding bagi importir dan eksportir terhadap keputusan klasifikasi yang dibuat berdasarkan AHTN.

AHTN, dalam proses penyusunannya, pada dasarnya telah mempertimbangkan kepentingan nasional. AHTN yang ditetapkan bersama seluruh anggota ASEAN dan diterapkan Indonesia adalah berasal dari masukan-masukan pembina sektor dalam hal ini K/L seperti Kementrian Perindustrian, Pertanian, KKP, dsb yang sudah dikaji oleh sektor dan disosialisasikan kepada pelaku usaha di Indonesia, sehingga usulan-usulan *stakeholder* terkait menjadi pertimbangan dalam penyusunannya.

Indonesia dalam beberapa hal sudah berhasil memasukkan kode HS yang mengakomodasi kepentingan Indonesia. Seperti contoh, kode HS untuk produk tekstil berupa batik, hal ini merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan secara internasional produk-produk khas Indonesia.

Pengaruh Amandemen AHTN 2012 terhadap BTKI 2017

Amandemen AHTN 2012 akan berpengaruh secara langsung terhadap sistem klasifikasi yang diterapkan Indonesia dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). BTKI yang saat ini diterapkan Indonesia disusun berdasarkan AHTN 2012 dan disebut BTKI 2012 sehingga amandemen AHTN 2012 akan ditindaklanjuti dengan amandemen BTKI 2012. Hasil amandemen BTKI 2012 selanjutnya akan disebut BTKI 2017. BTKI 2017 yang merupakan hasil amandemen BTKI 2012 direncanakan menggunakan sistem penomoran 8 digit sehingga sistem klasifikasi BTKI 2017 akan sama persis dengan sistem klasifikasi AHTN sepenuhnya. Sistem penomoran dalam BTKI saat ini terdiri dari 10 angka yang merupakan pengembangan dari AHTN yang terdiri dari 8 angka. Penggunaan penomoran 8 angka sesuai AHTN dilakukan dalam rangka:

Menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC). Dalam *ASEAN Economic Community Blue Print* (*AEC Blue Print*) disebutkan bahwa dalam rangka menuju *ASEAN Single Market and Production Base*, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah melakukan integrasi kepabeanan ASEAN melalui *ASEAN Single Window* (ASW). ASW akan menghubungkan masing-masing 10 negara anggota negara ASEAN.

Customs Taskforce. However, we, BKF, take the role from the perspective on duty imposition matters. BKF's role in Tariff team is to coordinate the inputs about the tariff imposition from related government agencies yet to follow the session on AHTN amendment whereas the results are to be implemented in Indonesia," Nasrudin said.

BKF as the coordinator in the process of imposition proposal of Import Duties in AHTN requisite several matters, which have to be followed by adequate data support so Indonesia's delegates in AHTN Taskforce are able to bring the national interests optimally. The data that are needed as attachments for AHTN headings, e.g.:

Complete goods description and technical specifications related to goods identifications such as images of the goods, manufacturing process, compositions/ingredients, and other related information. This information will be included as a part in Supplementary Explanatory Notes ASEAN 2017 if the products are accepted as AHTN tariff headings.

2012-2013 trade volume from Inner and outer ASEAN

Other considerations that could be the justifications about the importance of the product for Indonesia so it has to be included in AHTN tariff headings.

As for the Indonesia tariff headings that are accommodated by AHTN, for the exact numbers of them could be reconfirmed at Sub Directorate of Goods Classification, Directorate of Customs Techniques, DGCE.

"All ASEAN members will adhere to the amendments", Nasruddin uttered. The implementation AHTN aimed to facilitate the trade in ASEAN; to stipulate clear rules of tariff classification, explanatory notes, and its changes; to build uniformity of implementation on goods classification in ASEAN; to raise the transparency of goods classification process; to simplify AHTN; to create the solid nomenclatures that comply to the international standards as reflecting the changes in international trade pattern and technologies.

AHTN implementation by ASEAN members has to be done with

considerations to the principles of the protocols, i.e.:

Transparency: All Members shall stipulate the laws, rules, and guide related to AHTN and ensuring them to be available for public in efficient way, transparent, and accessible.

Consistency: All members shall ensure the consistency of AHTN implementation respectively.

Efficiency: All members shall ensure that AHTN will be utilized to increase the efficiency in goods clearance to facilitate the trade.

Appeal: All members shall provide the appeal mechanism for importers/exporters toward classification ruling made based on AHTN.

AHTN, in the process of its arrangement, put the consideration about the national interests. AHTN is stipulated by all the ASEAN members and implemented in Indonesia with considerations from all inputs and suggestions by related government agencies i.e. Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, Ministry of Maritime Affairs and Fishery, etc., that have been analyzed and disseminated to the business sectors in Indonesia so the related stakeholders' inputs becomes matter in the making.

Indonesia in several matters has succeeded to input the HS code that accommodated its interest. For instance, the HS Code of textile product, the Batik, this is one of Indonesia's ways to introduce the Indonesian authentic products internationally.

The Impacts of AHTN 2012 amendment to BTKI 2017

The amendment of AHTN 2012 brought the direct impact to classification in Indonesia Customs Tariff Book (BTKI). Current BTKI was arranged based on AHTN 2012 and named after, so the AHTN 2012 amendment will be proceed with amendment of BTKI 2012. The results of those amendments are going to be named BTKI 2017.

BTKI 2017 as a fruit of BTKI 2012 amendment is planned to use the 8-digit system so that the system will remain same with AHTN. The current numeric system in BTKI consists of 10-digit numbers as the development from AHTN's 8-digit numbers. The uses of 8-digit AHTN system are:

To face the ASEAN Economic Community (AEC). In ASEAN Economic Community Blue Print (AEC Blue Print) stated to aim ASEAN Single Market and Production Base, one of strategic plan that has to be done is to integrate the ASEAN's customs through ASEAN Single Window (ASW). ASW will connect its 10 members respectively. With ASW, the customs clearance procedure will be expedited by ruling customs declaration documents in exporting country will be authorized as customs declaration documents in importing ones. The use of harmonized classification system in ASEAN will expedite the implementation of

Dalam ASW, *customs declaration documents* negara pengekspor akan dapat diakui sebagai *customs declaration documents* di negara tujuan ekspor sehingga mempercepat proses penyelesaian pabean. Penggunaan sistem klasifikasi yang seragam di ASEAN diharapkan akan mempercepat penerapan ASW dan *ASEAN Customs Declaration Document* sehingga akan meningkatkan transparansi perdagangan intra-ASEAN dan daya saing industri dalam negeri.

Fasilitasi produk ekspor Indonesia ke negara anggota ASEAN. Penerapan AHTN sepenuhnya dalam BTKI akan mengurangi permasalahan perbedaan pengklasifikasian produk ekspor Indonesia oleh institusi kepabeanan negara ASEAN lainnya, sehingga diharapkan akan mengurangi hambatan perdagangan produk ekspor Indonesia di negara ASEAN tujuan ekspor. Di samping itu, dimasukkannya produk asal Indonesia dalam sistem klasifikasi AHTN akan menjadikan pengakuan negara ASEAN terhadap komoditi ekspor unggulan Indonesia.

Meminimalisir permasalahan transposisi HS dalam rangka pemenuhan komitmen penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam beberapa kerja sama FTA yang melibatkan Indonesia.

Selama ini Indonesia menggunakan 10 digit angka HS, dimana dua digit terakhir merupakan pos nasional. Ini berarti Indonesia dapat membuat pos tarif nasional yang spesifik bagi Indonesia. Manfaat dua digit terakhir tersebut tidak dapat lagi diperoleh apabila kita mengikuti AHTN 2017.

Di lain pihak, penerapan 8 digit yang seragam untuk seluruh negara ASEAN akan mempermudah proses impor dan ekspor antar negara ASEAN. Dengan proses yang lebih mudah, diharapkan volume perdagangan akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada implementasi BTKI 2017, terdapat perbedaan selama penomoran menjadi 8 angka, yaitu jumlah pos tarif menjadi 10.826.

"BTKI akan terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan perdagangan dunia. Dari sisi pembebanan tarif bea masuk ataupun bea keluar di dalam BTKI akan terus mengalami perubahan seiring dengan arah kebijakan industri dan perdagangan Indonesia. Sebagai contoh, BTKI 2012 yang ditetapkan berdasarkan PMK 213/PMK.011/2011 sampai saat ini pembebanan bea masuknya telah mengalami perubahan sebanyak lima kali, terakhir dengan PMK 134/PMK.010/2016," ungkapnya.

Dari sisi klasifikasi tarif, lanjut Nasruddin, dengan adanya perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, sehingga siklus produksi juga sangat cepat. Banyak terdapat barang baru yang sebelumnya tidak ada memiliki klasifikasi barang tersendiri yang spesifik. Demikian pula terdapat banyak barang lama yang sekarang tidak ada lagi dalam pasar internasional. Perubahan klasifikasi barang tersebut juga perlu direfleksikan dalam BTKI, sehingga penyesuaian klasifikasi AHTN dan BTKI dilakukan secara rutin setiap lima tahun.

(Ariessuryantini)

ASW and ASEAN Customs Declaration document , so will increase the transparency of trade inter-ASEAN and competitiveness domestically.

Facilitating goods exporting from Indonesia to ASEAN member countries. The full implementation of AHTN in BTKI will decrease the problem of classifying Indonesia's export products by the other ASEAN customs institutions.

By including the goods originated from Indonesia in AHTN classification system will bring the recognition of Indonesia's top-tier exported commodities from ASEAN members.

To minimize the problem of HS transposition by the means to fulfill the commitment of tariff reduction on customs duties in several FTAs that involved Indonesia.

Indonesia has been using 10 digits HS Code all this time whereas the last two digits is the national tariff subheading. This means that Indonesia could create the national tariff subheadings specifically. The benefit of those last-two-digits will be no longer applied if Indonesia follows AHTN 2017.

In other case, the implementation of harmonized 8-digits for all ASEAN members will ease the import/export process inter-ASEAN. With the simplified procedure, it will uplift the trade volume and taking part of Indonesia's economy growth. In implementation of BTKI 2017, there are differences by using 8 digits HS Code by the increased numbers of tariffs headings & subheadings into 10,826.

"BTKI will always changing by riding the world trade volatility. From the perspective of duty charging in BTKI, it will always change and follow Indonesia's industrial and trade policies. For instance, BTKI 2012 that was stipulated based on PMK 213/PMK.011/2012 until this time, its import duties imposition has been changed five times, last updated by 134/PMK.010/2016", Nasruddin said.

From the perspective of tariff classification, Nasruddin continues, with today's advanced technology growth comes rapid production cycle. There is an ample of new goods that have not classification solely. Meanwhile, the older generation goods are discontinued and no longer available on market. That changes in goods classification need to be concerned in BTKI, so the alignment of classification of AHTN and BTKI should be done in every five years.

(Ariessuryantini).

Translated and checked by Yulian Suhamto.

BTKI 2017 SIAP DITERAPKAN

Mulai 2017, berlaku Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang merupakan hasil amandemen dari ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) tahun 2012. BTKI 2017 hasil amandemen BTKI 2012 akan menggunakan sistem penomoran 8 digit sehingga sistem klasifikasi BTKI 2017 akan sama persis dengan sistem klasifikasi AHTN sepenuhnya. Sistem penomoran dalam BTKI saat ini terdiri dari 10 angka yang merupakan pengembangan dari AHTN yang terdiri dari 8 angka. Amandemen AHTN 2012 (AHTN 2017) akan berpengaruh secara langsung terhadap sistem klasifikasi yang diterapkan Indonesia dalam BTKI. Bagaimana proses perjalanan menuju amandemen tersebut dan apa pengaruhnya untuk Indonesia? Berikut ulasannya.

World Customs Organization (WCO) telah menerbitkan amandemen atas The Harmonized Commodity Description and Coding System 2012 (Harmonized System 2012/HS 2012). Amandemen tersebut selanjutnya akan menjadi sistem klasifikasi baru yang disebut dengan HS 2017 dan akan menggantikan HS 2012 yang dipakai oleh semua negara *contracting party* dari WCO saat ini. HS 2017 akan diberlakukan mulai 1 Januari 2017. Amandemen HS 2012 (HS 2017) yang dilakukan oleh WCO akan berpengaruh terhadap sistem klasifikasi di negara yang menjadi *contracting party* dari Konvensi HS, termasuk negara anggota ASEAN. Karena itu, negara anggota ASEAN bersepakat segera melakukan amandemen terhadap AHTN 2012 untuk menyesuaikan diri terhadap amandemen yang dilakukan oleh WCO dan perubahan lingkungan teknologi dan perdagangan.

Asean Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)

Dalam rangka kerja sama ASEAN, negara-negara anggota ASEAN berkeinginan untuk menyederhanakan transaksi perdagangan intra-ASEAN melalui suatu nomenklatur klasifikasi yang seragam. Kesepakatan ini terdapat dalam Artikel 1 *ASEAN Agreement on Customs* yang disepakati pada tahun 1997.

Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa salah satu tujuan dari perjanjian tersebut adalah "*To simplify and harmonise customs valuation, tariff nomenclature, and customs procedures*". Lebih lanjut dalam Artikel 4 disebutkan bahwa AHTN disusun berdasarkan pada 6 digit kode numerik HS yang disusun oleh WCO dan amandemen-amandemennya. Artikel 4 juga menyebutkan bahwa AHTN akan disusun menggunakan 8 digit kode numerik. Nomenklatur klasifikasi ini akan didukung oleh ketentuan pelaksanaan yang jelas dan transparan, serta keseragaman dalam aplikasinya. Sebagai tindak lanjut dari Artikel 4 ASEAN Agreement on Customs, negara-negara anggota ASEAN menyepakati *Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature* (Protokol) pada bulan Juni 2003.

Tujuan dari implementasi AHTN antara lain untuk fasilitasi perdagangan, untuk keseragaman klasifikasi barang di ASEAN, serta untuk meningkatkan transparansi pengklasifikasian barang di antara negara ASEAN. Implementasi AHTN oleh negara anggota ASEAN juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam protokol, yaitu transparansi, konsistensi, efisiensi, dan banding.

Struktur AHTN Artikel 4 dari ASEAN Agreement on Customs menyebutkan bahwa AHTN akan disusun menggunakan 8 digit kode numerik. Protokol menyebutkan secara lebih detil dalam Artikel 3 mengenai struktur AHTN. Artikel 3 Protokol menyebutkan bahwa nomenklatur AHTN terdiri dari 8 digit angka numerik dengan penambahan digit ketujuh dan kedelapan yang disertai dengan deskripsi barangnya (angka ketujuh dan kedelapan selanjutnya disebut "ASEAN subpos "). AHTN haruslah merupakan versi terbaru dari Harmonized System/HS dan perubahan-perubahannya. Struktur klasifikasi dalam AHTN adalah sebagai berikut: Gambar1. Struktur Klasifikasi AHTN Sebagaimana WCO, AHTN tidak hanya terdiri dari struktur klasifikasi saja namun juga terdapat *Supplementary Explanatory Notes* (SEN). SEN ini merupakan penjelasan lebih rinci dari uraian barang yang terdapat dalam AHTN. SEN diperlukan untuk memberikan pemahaman yang seragam terhadap AHTN oleh masing-masing negara anggota maupun para pengguna AHTN di negara-negara anggota.

Rangkaian Penyusunan BTKI 2017

Seperti diungkapkan Kepala Subdit Klasifikasi Barang yang juga menjadi Ketua Tim Penyusun BTKI 2017, Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai, **Benediktus Jarot Jatmika**, mengenai rangkaian pekerjaan penyusunan BTKI 2017 sangat luas dan kompleks. Tim BTKI dan Direktorat Teknis Kepabeanan tidak hanya menyusun struktur klasifikasi yang baru berdasarkan HS dan AHTN, tetapi juga melakukan penyesuaian atas berbagai sistem, aturan,

BTKI 2017 IS READY TO BE IMPLEMENTED

Indonesia Customs Tariff Book (BTKI) 2017 which is the amendment to the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2012 shall apply beginning from 2017. BTKI 2017 will use an 8-digit classificication, which means that the classification will be completely identical to that in AHTN. BTKI 2012 used 10 digits, an expansion from the 8 digits used by AHTN. How does the amendment come to be and what will be the impact?

World Customs Organization (WCO) has issued the amendment to The Harmonized Commodity Description and Coding System 2012 (Harmonized System 2012/HS 2012), called HS 2017, which should replace the currently prevailing HS 2012. HS 2017 begins to be implemented on 1 January 2017. This amendment will affect the classification system of the contracting parties of the HS Convention, including ASEAN member states, which adapt to the HS amendment as well as current changes to the trend of trade and technology by amending AHTN 2012.

Asean Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)

To streamline intra-ASEAN trade, ASEAN member states agreed to have a uniform classification system, as mentioned in Article 1 of ASEAN Agreement on Customs which was concluded in 1997.

The Aricle mentions that one of the objectives of the agreement is "to simplify and harmonise customs valuation, tariff nomenclature, and customs procedures". Article 4 further explains that AHTN will be an 8-digit classification that has an operating procedure that is clear, transparent and uniform. As the follow up, ASEAN member states agreed the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature on June 2003.

The objectives of AHTN are among others to facilitate trade, make goods classification uniform, and improve transparency of goods classification among ASEAN member states. The implementation of AHTN must also consider the principles as agreed in the protocol, namely transparency, consistency, and eeficiency.

The protocol governing the AHTN regulates further the 8-digit classification system used by AHTN. Article 3 concerning the structure of AHTN explains that AHTN consists of 8 digits, an addition of 2 last digits called subheading, complete with their goods description. The classification structure of AHTN is as follows: Picture 1. AHTN Classification Structure. Similar to WCO, ASEAN's AHTN is also completed with the Supplementary Explanatory Notes (SEN), which is a more detailed explanation to the goods description in the AHTN. SEN is needed to give a uniform understanding for both member states and AHTN users at the member states.

Developing BTKI 2017

Benediktur Jarot Jatmika, Deputy Director of Goods Classification, who is also the Head of BTKI 2017 Team, said that developing BTKI is a long and complex process. BTKI Team and the Directorate of Customs adjust the current classification structure based on the new HS and AHTN, as well as adjuct any systems, regulations, and procedures related to goods classification, including the Most Favoured Nation (MFN) tariff rate, Free Trade

dan prosedur yang terkait dengan klasifikasi barang, termasuk di antaranya Bea Masuk MFN (Most Favourable Nations), Bea Masuk FTA (Free Trade Agreement), Bea Keluar, PPN, PPh pasal 22, PPnBM, lartas, dan lainnya. Mengingat rumit dan banyaknya hal yang perlu disesuaikan, maka BTKI 2017 yang seharusnya mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017 menjadi tertunda dan akan diberlakukan dalam triwulan pertama tahun 2017. Sampai saat ini, proses penerbitan BTKI 2017 masih berlangsung dan dalam proses finalisasi PMK, *updating* modul, persiapan pencetakan, dan penyusunan *database*.

"Dalam sidang AHTN 2017, kami selaku anggota AHTN Task Force banyak mengalami kendala dalam sidang AHTN, di antaranya adalah resistensi dari negara lain yang tidak sependapat dengan masukan/usulan Indonesia, dikarenakan kurangnya data pendukung usulan yang kami sampaikan dalam sidang," ujar Jarot.

Hal tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan data yang diterima dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian lainnya yang mengajukan usulan ke AHTN. Namun Tim BTKI tetap berupaya melakukan negosiasi dengan negara ASEAN lain agar menerima usulan pos AHTN sesuai kepentingan Indonesia dan pada akhirnya hampir semua kepentingan Indonesia diakomodir di AHTN 2017. Produk yang paling alot pembahasannya di antaranya adalah produk perikanan, produk CPO (*Crude Palm Oil*), dan turunannya, serta produk otomotif yang merupakan komoditi unggulan Indonesia. Pembahasan AHTN juga cukup panjang yaitu sebanyak 10 kali sidang masing-masing selama 8 hari pertemuan, yang dilakukan sejak Maret 2014 hingga Desember 2016.

"Tantangan utama dalam klasifikasi barang secara umum tentunya bagaimana mencapai keseragaman dan ketepatan interpretasi, termasuk di antaranya dalam pelaksanaan AHTN 2017 nanti. Hal tersebut mengingat ada beberapa pos tarif baru dalam AHTN tersebut. Namun AHTN 2017 juga dilengkapi dengan Supplementary Explanatory Notes seperti AHTN 2012 yang berisi penjelasan mengenai spesifikasi barang yang ada dalam pos-pos tertentu dalam AHTN 2017," ujarnya.

Beberapa Hasil Amandemen

Terkait amandemen HS versi baru yaitu HS 2017, isu lingkungan dan sosial merupakan hal utama yang menjadi dasar amandemen HS, karena pentingnya HS sebagai alat global untuk mengumpulkan statistik perdagangan dan pemantauan perdagangan. Sebagian besar perubahan yang direkomendasikan terkait Organisasi Pangan dan Pertanian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) misalnya terkait dengan ikan dan produk perikanan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan spesies dan bentuk produk yang perlu dipantau untuk tujuan keamanan pangan dan manajemen sumber daya yang lebih baik. Perubahan yang berkaitan dengan krustasea, moluska, dan invertebrata lainnya, hal ini karena pentingnya perdagangan dan konsumsi spesies ini dalam berbagai produk.

Klasifikasi produk kehutanan juga telah dimodifikasi, untuk meningkatkan cakupan spesies kayu dan mendapatkan gambaran yang lebih baik dari pola perdagangan. Modifikasi akan memungkinkan data perdagangan kayu tropis untuk diidentifikasi, sehingga statistik yang lebih baik pada perdagangan kayu tropis dan data yang lebih baik pada penggunaan kayu keras non-tropis. Selain itu, amandemen termasuk subjudul baru untuk monitoring dan kontrol bambu dan rotan produk tertentu.

Sebagai antisipasi dalam rangka pencegahan malaria, amandemen HS 2017 juga bertujuan untuk memberikan informasi rinci tentang beberapa kategori produk yang digunakan sebagai komoditas anti-malaria. Hal ini akan memudahkan pekerjaan klasifikasi dan perdagangan produk-produk ini. Amandemen HS juga memperkenalkan subpos khusus untuk memfasilitasi pengumpulan dan perbandingan data zat tertentu dikendalikan di bawah Konvensi Senjata Kimia. Subpos baru juga telah dibuat untuk sejumlah bahan kimia berbahaya yang diatur dalam Konvensi Rotterdam dan polutan tertentu persisten organik yang dikendalikan di bawah Konvensi Stockholm. Dalam beberapa kasus, ada pertemuan rezim kontrol untuk bahan kimia, baik oleh Rotterdam dan Stockholm Conventions.

Selain itu, subpos baru telah diciptakan untuk *monitoring* dan pengendalian sediaan farmasi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin atau norephedrine, dan untuk alpha-phenylacetoacetonitrile, praprekursor untuk obat. Amandemen lainnya dihasilkan dari perubahan pola perdagangan internasional. Pos 69.07 (produk keramik tanpa glasir) dan pos 69.08 (produk keramik mengkilap) digabung, karena pada dasarnya saat ini produk tersebut tidak lagi diproduksi, dan industri dan perdagangan tidak lagi membedakan antara produk keramik tanpa glasir dan produk keramik mengkilap, sementara produk-produk baru dengan volume perdagangan yang sangat tinggi diklasifikasikan subpos 6907.90 dan 6908.90 ("Lainnya").

Selanjutnya, ungkap Nasruddin, untuk tujuan mengadaptasi HS untuk praktik-praktik perdagangan saat ini, produk penting tertentu akan diidentifikasi secara terpisah baik subpos ada atau baru. Kemajuan teknologi juga tercermin dalam perubahan, antara lain kriteria ukuran untuk kertas koran, lampu *light-emitting dioda* (LED), sirkuit terpadu multi-komponen, dan hybrid, plug-in hybrid, dan kendaraan yang sepenuhnya digerakkan secara listrik. Rekomendasi HS 2017 juga mencakup amandemen untuk memperjelas teks untuk memastikan interpretasi yang seragam atas nomenklatur tersebut. Misalnya,

Agreement (FTA) tariff rate, export duty, VAT, Income Tax Article 22, luxury tax, prohibition and restriction, etc. Even due to its complexity, BTKI 2017, which was supposed to be implemented on 1 January 2017, will now be implemented in the first quarter of 2017. The process is still ongoing and the Team is currently finalizing the Minister of Finance Regulation, updating the modules, printing, and developing the database.

"We, as the member of AHTN Task Force, often found challenges during the negotiation rounds, for example due to resistences of other member states who disagree with Indonesia's opinion, which was not supported by adequate supporting data," said Jarot. Even with the limited supporting data provided by the Ministry of Industry and other relevant ministries, the BTKI Team continued to negotiate with other ASEAN Member States and maintain Indonesia's interest in AHTN 2017. Some products which faced the most resistence were fishery products, CPO products, and automotive products which are Indonesia's strategic commodity. The negotiations were very long as it took 10 meetings, 8 days each, spanned between March 2014 to December 2016 to conclude.

"The major challenge in goods classification is how to make a uniform and accurate interpretation, especially after the implementation of AHTN 2017, considering that there are some new headings. AHTN 2017 is, therefore, equipped with SEN, similar to AHTN 2012, containing explanations on the specification of goods in specific headings in AHTN 2017," he said.

HS Amendment

Environment and social issues are the basis of the HS amendment considering the importance of HS in monitoring and recording trade statistics. The majority of the amendment are recommended by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, for example on fish and fishery productshas the objective of increasing the number of species and form of products that need to be monitored for a better food security and resource management. Amendments related to crustacea, molluscs, and other invertebratae are caused by the importance of the trade of such species in a variety of products.

Classification for forest products has also been modified to increase the scope of wood species and provide a better trade pattern information. Such modification will enable the identification of tropical wood trade and better data on the use of non-tropical hard wood. The amendment also includes new subheading to monitor and control bamboo and rattan of certain products.

As the anticipation for malaria prevention, the amendment of HS 2017 is also intended to provide a more detailed information on products that can be used as anti-malaria commodity. This will make classification and trade of such products much easier. HS amendment also introduces specific subheadings to facilitate the informationa nd comparison of specific substances regulated under the chemical weapon convention. New subheadings have also been made to accommodate dangerous chemical substances regulated under Rotterdam Convention and organic persistent pollutant regulated under Stockholm Convention.

New subheadings have also been created for the monitoring and control of pharmacy supply containing ephedrine, peudoephedrine, or norephedrine, and alpha-phenylacetoacetonitrile, pre-precursor for medicines. Other amendments are due to the change in the international trade pattern. Heading 69.07 (unglazed ceramic products) and heading 69.08 (glazed ceramics) are now merged because such products are basically no longer in production and no longer differentiated between each other. New products with higher trade volume are classified in the subheading 6907.90 and 6908.90 (others).

Nasrudin also said that to make HS relevant with the current trade practices, specific important products will be identified separately in the

pengelompokan kembali monopod, bipods, tripod dan artikel serupa dalam pos baru, yaitu 96.20.

Amandemen itu berawal dari telah selesai dibahasnya Harmonized System 2017 oleh WCO, hal itu otomatis juga berpengaruh pada negara-negara yang menjadi *contracting party* konvensi HS. Masih menurut Nasruddin, semua negara yang menjadi *contracting party* wajib menerapkan perubahan dimaksud. Konvensi HS saat ini diterapkan oleh lebih dari 200 negara, sehingga merupakan instrumen internasional yang paling sukses hingga saat ini. Sebagai *contracting party* dari Konvensi HS, maka Indonesia wajib menerapkan pengklasifikasian barang sesuai WCO, sehingga apabila terdapat amandemen HS, Indonesia wajib pula untuk menyesuaikannya.

"Proses terbentuknya BTKI awalnya adalah amandemen HS oleh WCO yang mengakibatkan perubahan pada AHTN dan perubahan AHTN ini akan menjadi dasar BTKI direvisi. Revisi yang dilakukan bisa berupa penambahan Pos/Subpos, penghilangan Pos/Subpos, atau revisi redaksional. Hal tersebut mengakibatkan perubahan struktur klasifikasi barang," imbuh Jarot.

Proses Amandemen AHTN 2017 dan BTKI 2017

Lebih lanjut menurut Jarot, penyusunan AHTN dilakukan oleh negara anggota ASEAN melalui gugus tugas yang dibentuk oleh para Direktur Jenderal Bea dan Cukai se-ASEAN yang disebut dengan AHTN Task Force (AHTN TF). Anggota AHTN TF terdiri dari perwakilan pejabat kepabeanan negara anggota ASEAN yang memiliki keahlian dalam klasifikasi barang. Lingkup kerja dari AHTN TF mencakup pembahasan segala hal yang terkait dengan klasifikasi barang di ASEAN, termasuk di antaranya melakukan evaluasi terhadap AHTN dan memusyawarahkan sengketa klasifikasi barang yang terjadi antara negara anggota.

AHTN disusun berdasarkan HS WCO dan perubahan-perubahannya. Secara berkala, WCO melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem klasifikasi tersebut. Sejak tahun 1996, WCO telah 4 kali menerbitkan HS yaitu HS 1996, HS 2002, HS 2007, HS 2012, dan HS 2017. Perubahan yang dilakukan oleh WCO secara langsung akan berpengaruh terhadap AHTN. Karena itu, AHTN juga telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu AHTN 2004, AHTN 2007, AHTN 2012, dan AHTN 2017.

Selain karena perubahan HS yang dilakukan oleh WCO, amandemen AHTN juga dapat dilakukan terhadap sub pos ASEAN untuk melakukan penyederhanaan AHTN maupun karena adanya perubahan teknologi dan perdagangan. Dalam melakukan amandemen, AHTN TF telah menyusun kriteria-kriteria teknis sebagai berikut:

a. Sub pos ASEAN dapat dibuat jika nilai perdagangan produk tersebut signifikan di negara anggota;
b. Sub pos ASEAN tidak perlu dibuat jika tarif bea masuk di negara anggota adalah sama;
c. Pembentukan subpos ASEAN harus mempertimbangkan konvensi internasional yang terkait dengan pembentukan nomenklatur tarif;
d. Subpos nasional masing-masing negara anggota dapat dibuat untuk tujuan non-tarif statistik dan lainnya pada tingkat setelah 8 digit angka numerik AHTN;
e. Pembentukan subpos ASEAN harus menghindari kriteria penggunaan akhir (*end use*);
f. Pembentukan subpos ASEAN harus mempertimbangkan kriteria amandemen HS;
g. *Review* dari AHTN harus membantu pemahaman, interpretasi, dan klasifikasi barang yang seragam.

Sedangkan untuk keperluan nasional, usulannya dibahas dalam forum AHTN Task Force pada waktu pembahasan penyusunan BTKI 2017. BKF dan Bea Cukai menerima masukan dari pembina sektor (Kementerian Lembaga terkait) untuk dimasukkan dalam sidang sidang AHTN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga 2016 bergilir di negara-negara ASEAN.

Dari 10 Digit menjadi 8 Digit

BTKI 2017 hasil amandemen BTKI 2012 direncanakan menggunakan sistem penomoran 8 digit sehingga sistem klasifikasi BTKI 2017 akan sama persis dengan sistem klasifikasi AHTN sepenuhnya. Sistem penomoran dalam BTKI saat ini terdiri dari 10 angka yang merupakan pengembangan dari AHTN yang terdiri dari 8 angka. Menurut Kepala Seksi Klasifikasi IV Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai, yang juga Wakil Ketua Tim Penyusun BTKI 2017 dan Anggota AHTN Task Force, **Taufik Ismail**, secara teknis, yang membedakan antara sistem penomoran 10 digit dengan sistem penomoran 8 digit adalah dari sisi penomoran, yaitu hilangnya dua digit terakhir berupa pos nasional Indonesia. Namun, uraian barang yang termasuk dalam pos nasional yang diusulkan untuk menjadi pos AHTN tersebut pada dasarnya cakupannya tidak hilang, melainkan berubah menjadi pos AHTN.

Selain digit, yang membedakan adalah rincian strukturnya, dimana struktur klasifikasi dalam AHTN 2017 banyak mengalami perubahan, dikarenakan usulan dari negara beberapa negara anggota ASEAN. Usulan yang paling banyak adalah dari Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Usulan Indonesia tersebut disampaikan oleh delegasi AHTN Task Force Indonesia, yaitu perwakilan dari Subdit Klasifikasi Barang Direktorat Teknis Kepabeanan dalam rangkaian sidang AHTN Task Force.

Dengan adanya perubahan ini tentunya perlu dilakukan antisipasi tentang kemungkinan

existing subheading or new subheading. Technology advancement is also reflected in the amendment, such as in the criteria of newspaper size, LED lamp, multi-component integrated circuit, and hybrid, hybrid plug-in, and fully electrical vehicles. HS 2017 recommendation also includes amendment to ensure uniform interpretation of a certain classification, for example the categorization of monopods, bipods, tripods and identical articles in a new heading, 96.20.

All contracting party must comply with the HS 2017 amendment and there are more than 200 countries implement the convention, making it the most successful international instrument to date. Indonesia is also a contracting party, and therefore must also adjust their tariff book.

The amendment of BTKI is firstly caused by the HS amendment by WCO which causes AHTN to also be amended. The amendment of AHTN is the basis for the BTKI amendment. The amendment itself can be in the form of addition of headings/ subheadings, omission of headings/ subheadings, or editorial revision. This causes the change on goods classification structure," added Jarot.

Amendment process of AHTN 2017 and BTKI 2017

Jarot further explained that AHTN was developed by ASEAN member states through AHTN Task Force (AHTN TF). Members of the task force consist of customs officers from all ASEAN member states with expertise on goods classification. The scope of the task force is anything relevant to goods classification in ASEAN, including evaluating AHTN and discussing classification dispute happening between member states.

AHTN is developed based on HS published by WCO which has been amended 4 times in 1996, 2002, 2007, 2012, and 2017. AHTN itself has been amended 4 times in 2004, 2007, 2012, and 2017. In addition to due to amendment to WCO's HS, AHTN may also be amended due to simplification or change in technology and trade. Such criteria apply in the amendment of AHTN:

a. *ASEAN subheading may be created if the trade value of such products in the member states is significant;*
b. *ASEAN subheading shall not be created if the import duty tariff in member states is not different;*
c. *ASEAN subheading shall be created in accordance with the international conventions relevant to the tariff nomenclature;*
d. *National subheading of each member state may be created for non-tariff statistic purposes at the level after 8 digits of AHTN;*
e. *ASEAN subheading must avoid end use criteria;*
f. *ASEAN subheading must consider HS amendment criteria;*
g. *Review of AHTN must support a uniform understanding, interpretation, and classification of goods.*

10 Digits to 8 Digits

As previously mentioned, BTKI 2017 will consist of 8 digits, different from BTKI 2012 which consists of 10 digits, an expansion from the 8-digit AHTN. According to Head of Classification IV Section, who is also the Vice-Head of BTKI Team and Member of AHTN TF, Taufik Ismail, technically, the difference with the previous BTKI is simply on the omission of the last 2 digits, which are Indonesian national heading. However, the description of those national headings is not omitted, but merely turned into an AHTN heading.

Another difference is the structure

adanya permasalahan yang timbul dari penerapan sistem baru ini. Menanggapi hal itu, Taufik Ismail mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencoba mengantisipasi dengan menginventarisir secara rinci hal-hal yang berdampak oleh perubahan struktur klasifikasi (misalnya lartas, BM MFN/Umum, BM FTA, PPN, PPnBM, PPh pasal 22, BK, dsb). Dalam rangka antisipasi tersebut, selama kurang lebih 2 tahun ini melakukan koordinasi dengan sangat intensif dengan BKF, Ditjen Pajak, INSW, Kemendag, Kemenperin, dan seluruh kementerian terkait lainnya.

"Termasuk di antaranya Menteri Keuangan telah mengirimkan surat ke seluruh Kementerian agar mengambil langkah antisipasi. Hal tersebut dilakukan mengingat perubahan HS tidak hanya berdampak pada Bea Cukai dan Kementerian Keuangan, tapi juga berdampak pada segala aspek industri, ekspor, impor, dan statistik di Indonesia, yang menjadi tugas dan fungsi instansi terkait lainnya. Semoga implementasi BTKI 2017 nanti lancar tanpa kendala yang berarti," ungkap Taufik Ismail.

Sosialisasi BTKI Tahun 2017

Lebih lanjut, Taufik Ismail menyatakan, pada dasarnya tata cara dan ketentuan mengklasifikasikan barang berdasarkan Harmonized System tidak mengalami perubahan, yang berbeda hanya penomoran dan strukturnya saja. Jadi secara teknis pengklasifikasian barang, pegawai Bea Cukai sudah siap untuk melaksanakan. Begitu juga dengan investasi, seperti sistem, software, dan lain-lain. Untuk bisa menjalani perubahan ini, setiap adanya amandemen periodik HS dan AHTN, secara sistem yang terutama perlu dilakukan perubahan adalah *database*-nya, yaitu yang tadinya menggunakan *database* sesuai BTKI 2012 (berdasarkan HS/AHTN 2012) menjadi BTKI 2017 (berdasarkan HS/AHTN 2017), oleh karena itu investasi yang diperlukan adalah untuk pengembangan *database* dan kemungkinan dilakukannya perubahan *software* di pengguna jasa.

"Biaya yang diperlukan dalam implementasi di Bea Cukai di antaranya adalah terkait dengan pencetakan *hardcopy*, penyusunan CD, *development* dari modul PIB (Pemberitahuan Impor Barang), dan penyesuaian *database*. Selain itu, Bea Cukai juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak dalam rangka proses penyusunan BTKI 2017, meliputi biaya penyelenggaraan sidang AHTN Task Force, rapat koordinasi, dan biaya logistik terkait lainnya. Biaya juga dikeluarkan untuk tim yang kita bentuk dalam rangka menindaklanjuti AHTN, yaitu Tim Negosiasi AHTN 2017 dan Tim Penyusunan BTKI 2017," imbuh Taufik.

Mengenai sosialisasi kepada para pegawai, diakuinya, telah dilakukan sejak awal penyusunan AHTN 2017 yaitu Maret 2014 hingga saat ini, dalam berbagai kesempatan tidak hanya forum sosialisasi atau workshop, namun juga FGD (*focus group discussion*), rapat, dan sebagainya sehingga kami kira jajaran Bea Cukai sudah mengetahui akan adanya BTKI 2017. "Yang perlu diperhatikan pegawai, di antaranya adalah adanya pemahaman umum mengenai perubahan digit dari 10 digit menjadi 8 digit, sedangkan pelaksanaannya di lapangan tentunya para pegawai yang terkait dengan penetapan klasifikasi, diharapkan agar melakukan penetapan klasifikasi barang dengan menggunakan catatan dan struktur yang baru sesuai amandemen HS/AHTN," imbuhnya.

Lebih lanjut, Taufik Ismail mengingatkan, BTKI 2017 memuat struktur klasifikasi barang yang baru beserta perubahan catatan terkait, maka bagi petugas tentunya diharapkan agar dapat melakukan penetapan klasifikasi barang dengan menggunakan catatan dan struktur yang baru sesuai amandemen HS/AHTN. Sedangkan bagi *stakeholder*, diharapkan agar struktur klasifikasi yang telah disusun sesuai dengan kepentingan masing-masing sektor, baik tujuan tarif maupun non tarif, sebagaimana tujuan utama dari dilakukannya amandemen, yaitu agar merefleksikan kepentingan Indonesia. **(Ariessuryantini).**

details which changes a lot due to inputs from ASEAN member States, the majority of which comes from Indonesia, Malaysia, and Vietnam, during the AHTN TF Meetings. These changes make anticipations towards poential problems necessary. Taufik Ismail explained that his team have tried to identify items that may be affected by the change in classification structure (such as MFN and FTA tariff rates, export duty, VAT, Income Tax Article 22, luxury tax, prohibition and restriction, etc), and coordinate with the Fiscal Policy Agency (BKF), Directorate General of Taxes, INSW, Ministry of Trade, Ministry of Industry, and other relevant ministries.

"Even the Minister of Finance has sent an official letter to all relevant ministries as an anticipation, because HS amendment affects not only customs and excise and the Ministry of Finance, but also all aspects of industry, export, import, and statistics in Indonesia, which are also the responsibilities of other agencies. We are hoping for a smooth implementation of BTKI 2017," said Taufik Ismail.

Sosialisasi BTKI Tahun 2017

Taufik Ismail further added that basically the procedures and provisions in classifying goods based on HS remain unchanged, only the numbering and structure. This means that Indonesian Customs officers are technically ready. Investments, such as system, software, etc are also in place. Updating database to BTKI 2017 from BTKI 2012 is also crucial, thus investment in database is needed. Another possibility is change in software for service uers.

"Costs incurred to DGCE in the implementation of BTKI 2017 are for hardcopy printing, CD burning, import declaration module development, and database adjustment. Also high is the cost of holding the AHTN TF meeting, coordination meetings, and other logistics costs. We also have the expenditure for the AHTN 2017 Negotiation Team and BTKI 2017 Team," added Taufik.

Dissemination to customs officers have been done since the beginning of the development of AHTN 2017, which was on March 2014 through various activities, such as workshops and disseminations, as well as FGD and meetings. "What officers must pay attention to is the change from 10 digits to 8 digits. We expect officers to classify goods by using the new notes and structure in accordance with HS/AHTN amendment," he added. He also hoped that since the classification structure has been developed by considering sectors' interest, be it tariff or non-tariff, it could achieve the main objective the amendment, that is to reflect Indonesia's interest.

MELEMAHNYA PERTUMBUHAN EKONOMI PENGARUHI PENERIMAAN BEA CUKAI

Tahun 2016 menjadi tahun yang berat bagi penerimaan negara, melemahnya perekomonian dunia yang berdampak pada melemahnya perekomonian Indonesia yang ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat, membuat perekomonian berjalan stagnan. Pertumbuhan ekonomi pun hanya bergerak pada angka 5 persen saja. Padahal, negara membutuhkan pemasukan yang cukup besar untuk membangun negeri dan menjalankan roda pemerintahan.

Berkurangnya volume ekspor juga menjadikan keuangan tidak berputar bahkan cenderung berhenti pada satu sisi saja. Pontang pantingnya pemerintah untuk memenuhi target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah ditetapkan, menghasilkan beberapa kebijakan yang belum membuahkan hasil optimal untuk pemenuhan APBN itu sendiri.

APBN sendiri merupakan instrumen keuangan negara yang digunakan untuk membangun perekonomian, yang digambarkan dengan penerimaan maupun pengeluaran. Selain itu, APBN juga berfungsi sebagai instrumen daya saing maupun instrumen pengawasan, dengan sehatnya APBN suatu negara menunjukan pengelolaan maupun penerimaan negara tersebut sehat.

Untuk memenuhi itu semua, penerimaan menjadi kunci pokok agar dapat mewujudkan semua perencanaan perekonomian. Pemerintah pun telah berusaha semaksimal mungkin menarik pemasukan untuk negara agar dapat memenuhi target yang telah ditetapakan APBN dari berbagai bidang maupun instansi yang mengelolanya.

Salah satu instansi yang cukup diandalkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pemasukan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kedua instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan ini menjadi tulang punggung negara untuk mendapatkan pemasukan yang sudah ditargetkan oleh APBN.

Untuk Bea Cukai sendiri, sampai dengan akhir tahun 2016 penerimaannya mencapai Rp178,47 triliun atau 97,01 persen dari target APBN-P 2016, yang terdiri dari bea masuk Rp31,57 triliun (94,6 pesen), bea keluar Rp2,9 triliun (116 persen), dan cukai sebesar Rp144,0 triliun (97,2 persen). Walaupun pencapaianya belum sempurna, namun lebih baik dari instansi lain yang juga penyumbang penerimaan negara.

Namun demikian, menurut Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea Cukai, **Sugeng Apriyanto**, tidak tercapainya dengan sempurna penerimaan Bea Cukai lebih dikarenakan banyak faktor dan salah satunya adalah melemahnya perekonomian dunia. Untuk penerimaan bea masuk, faktor yang mempengaruhinya, menurut Sugeng, adalah penurunan devisa impor sampai dengan bulan November yang mencapai 13,9 persen, yang berarti penurunan *tax-base* penerimaan bea masuk. Selain itu, penggunaan fasilitas *Free Trade Agreement* (FTA) dalam kegiatan impor semaki tinggi, bahkan hingga November 2016 pengguna fasilitas FTA mencapai 26,9 persen meningkat cukup signifikan dari tahun 2015 yang sebasar 23 persen. Faktor lainnya adalah realisasi pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya berkisar 5 persen.

Sementara itu, untuk bea keluar walaupun tahun 2016 dapat terpenuhi targetnya, namun di awal tahun ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pencapaian itu. Antara lain, kinerja ekspor mineral PT Freeport pada semester I yang relatif rendah karena gangguan mesin produksi pertambangan. Selain itu, harga komoditas *crude palm oil* (CPO) di pasar internasional yang mayoritas di bawah USD750 (hanya 3 bulan harga CPO melebihi USD750, yaitu Mei, Juni, dan Oktober). Sementara itu, harga kakao yang turun signifikan sebesar 35,3 persen karena diserap industri lokal.

"Untuk cukai, dengan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2016 yang rata-rata sebesar 11,52 persen, penerimaan cukai sudah dapat diprediksi hanya tercapai 97,7 persen saja. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan kondisi ini lebih disebabkan karena penerimaan cukai tahun 2015 terhitung 14 bulan hak ini dikarenakan diberlakukannya PMK 20, sedangkan di tahun 2016 penerimaan cukai kembali terhitung

THE WANING OF ECONOMIC GROWTH INFLUENCES CUSTOMS REVENUE

Sugeng Apriyanto. Lesunya perekomonian dunia berpengaruh pada penurunan devisa.
Sugeng Apriyanto. The slowing down effect on the economic world influences the foreign exchange decline.

The year of 2016 became a tough year for state revenues, the waning of world economic has impacted to the waning of economic in Indonesia that marked by a decreasing of consumers buying power. Economic growth was only moving at 5 percent. In fact, the country needs a large enough income to rebuild and run the government.

Lessening export volume also makes financial can not spin even it tends to stop on one side. The difficulty of government in fulfilling state budget (APBN) target that has been stipulated, and generated some policies which have not produced optimal results for the fulfillment of state budget itself.

State Budget (APBN) itself is a state finance instrument that is used to build the economy, which is described by revenue and expenditure. In addition, state budget also serves as an instrument of competitiveness and control instruments, the state budget shows that management and state revenue are well.

To fulfill it, revenue becomes the principal key in order to realize all economic planning. The government has tried as much as possible to attract income state in order to meet the targets that have been stipulated by APBN from various fields and institutions that manage them.

One of the institutions that are quite relied upon by the government to obtain the state revenue is Directorate General of Tax and Directorate General of Customs and Excise. Both institutions are under the Ministry of Finance that have become state's backbone for income targeted by the state budget.

For Customs itself, until the end of 2016, the revenue has reached Rp.178,47 trillion or 97.01 percent of the target of APBN-P 2016, which consists of import duties of Rp. 31,57 trillion (94.6 percent), export duties of Rp2.9 trillion (116 percent), and excise duties of Rp.144,0 trillion (97.2 percent). Although, the attainment is not perfect, but it is better than the other institutions that are also the contributors of state revenue.

However, according to Director of Revenue and Strategic Planning, Sugeng Apriyanto, the failure to achieve perfect customs revenue is due to many factors and one of them is the decrease of a world economy. For the revenue of import duties, there some factors that influence it such as a decrease in foreign exchange import that until November it only reached 13.9 percent, which means a decrease of the tax base in customs revenue. In addition, the use of Free Trade Agreement (FTA) facilities in import activity is higher, even until November 2016 FTA facility users has reached 26.9 percent. It has significantly increased from 2015 that only 23 percent. Another factor is the realization of low economic growth, of which is only around 5 percent.

Meanwhile, for export duties, although in 2016 the target can be fulfilled, but at the beginning of the year, there are several obstacles faced to achieve such as; the mineral export performance of PT Freeport in the first semester is relatively low due to

12 bulan," ungkap Sugeng.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk 2016 kendala yang dihadapi oleh penerimaan cukai, antara lain pertumbuhan ekomoni yang relatif rendah menyebabkan penurunan daya beli, adanya anomali penurunan produksi rokok pada 2 perusahaan utama penyumbang cukai hasil tembakau, dimana dalam 10 tahun terakhir baru terjadi, yaitu penurunan produksi PT Djarum sebesar 1 persen dan PT HMS sebesar 7 persen, kendala lainnya yang tiap tahun juga meningkat adalah peredaran rokok ilegal yang naik 12,14 persen di tahun 2016 yang secara langsung mengganggu market rokok ilegal khususnya pabrik golongan I.

"Dari pencapaian target penerimaan itu, di tahun 2016 Bea Cukai masih mengandalkan beberapa komoditas, khususnya untuk bea masuk yang mana selama 3 tahun ini juga menjadi penyumbang penerimaan bea masuk terbesar, yaitu BBM, *sparepart* otomotif, produksi besi baja, sekrup/mur/baut, serta jagung. Selain itu, impor beras pada quartal I 2016 berdampak cukup signifikan terhadap penerimaan bea masuk," ujarnya.

Untuk menghadapi berbagai kendala tersebut, Bea Cukai pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar pencapaian target penerimaan dapat terpenuhi, kebijakan itu adalah, penerbitan instruksi Dirjen INS-03 tahun 2016 untuk mengoptimalkan penerimaan khususnya dari bea masuk, pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan pada kantor pusat untuk rekomendasi data importasi untuk dilakukan penelitian ulang, penerbitan PMK 147/PMK.010/2018 tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2017 pada bulan Oktober 2016 untuk meningkatkan *forestalling* penerimaan cukai di bulan Desember.

Kebijakan lainnya adalah peningkatan penindakan melalui Operasi Gerhana dan Jaring Wallacea untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal di perairan timur Sumatera dan wilayah timur Indonesia, dan kebijakan yang tak kalah pentingnya yang sudah dikeluarkan adalah meningkatkan penindakan BKC ilegal secara masif baik di pusat produksi, jalur distribusi, maupun tempat penjualan eceran.

Dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut, penerimaan Bea Cukai pun dapat dioptimalkan, hal ini dapat dilihat langsung dengan pemenuhan target penerimaan dari 16 kantor wilayah dan 3 kantor pelayanan utama, hanya 8 kantor saja yang tidak terpenuhi targetnya, sedangkan 11 lainnya terpenuhi semua target penerimaannya.

Dengan upaya yang optimal dan kerja keras bersama, target penerimaan Bea Cukai pun dapat terpenuhi walaupun masih belum sempurna karena hanya kurang beberapa persen saja. Upaya dan kerja keras ini tentunya juga akan terus dilakukan untuk tahun 2017 dimana perekomonian dunia masih belum mengarah keperbaikan atau kemajuan seperti yang diharapkan banyak orang. Kondisi lainnya adalah untuk target penerimaan tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan target tahun 2016.

Di tahun 2017, bea masuk ditargetkan Rp33,73 triliun atau naik 1,1 persen dibanding tahun 2016. Cukai ditargetkan Rp157,16 persen yang terdiri dari hasil tembakau Rp149,88 triliun, etil alkohol Rp0,15 triliun, MMEA Rp5,53 triliun, dan kemasan plastik Rp1,60 triliun. Sementara untuk bea keluar ditargetkan Rp0,34 triliun sehingga total keseluruhan target penerimaan untuk tahun 2017 adalah Rp191,23 triliun atau naik sebesar 4,0 persen dibandingkan tahun 2016.

"Secara umum kendala dalam pencapaian penerimaan 2016 masih akan mempengaruhi penerimaan tahun 2017, seperti pertumbuhan ekomoni, inflasi, kenaikan tarif cukai, penindakan barang kena cukai illegal, dan sebagainya. Namun demikian, dengan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2016, diharapkan kendala yang berasal dari kegiatan pengawasan dapat turun dengan signifikan," harap Sugeng.

Terkait dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan Bea Cukai beberap tahun ini, seperti Pusat Logistik Berikat (PLB), menurutnya belum berdampak signifikan terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai, karena tujuan utamanya adalah investasi. Adapun dampak pemberian fasilitas PLB tersebut terhadap penerimaan baru akan dinikmati Bea Cukai pada 3 tahun mendatang.

"Khusus untuk komoditas baru yang menjadi objek cukai yaitu plastik, walaupun dalam APBN sudah ditetapkan angka penerimaannya namun hingga kini masih belum dapat dikenakan karena masih dikaji lebih mendalam barang plastik apa yang akan dikenakannya. Kami berharap pembahasannya dapat selesai tahun ini sehingga tahun 2017 ini juga bisa langsung kita pungut untuk menjadi salah satu komoditas unggulan yang dikenakan cukai," tuturnya.

Dengan peningkatan target penerimaan sebesar 4 persen tentunya tidak membuat Bea Cukai lalai dengan upaya dan kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya. Masih banyak upaya yang harus ditempuh Bea Cukai agar target tahun ini dapat tercapai dengan sempurna. Kendala-kendala yang sama di tahun lalu tentunya menjadi pengalaman untuk melampauinya dengan upaya dan kebijakan yang memihak. Demikian pula yang dilakukan oleh Kantor Pusat Bea Cukai, walaupun target yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan tahun 2016, namun untuk memenuhinya tetap dibutuhkan suatu koordinasi dan komunikasi yang dituangkan dalam Instruksi Direktur Jenderal nomor INS-03 tahun 2016 untuk mendorong dan mengoptimalisasikan penerimaan. Juga dengan mengeluarkan SE-06 tahun 2016, yaitu tentang penyampaian proyeksi penerimaan bulanan dan pelaporan realisasi penerimaan melalui MPO.

Melalui SE ini diharapkan setiap satuan kerja dapat melakukan pemantauan penerimaan secara aktif, dan bisa membuat proyeksi

Tahun 2016 penggunaan fasilitas FTA dalam kegiatan impor lebih ditinggi dibanding tahun 2015.
In 2016 the use of FTA facilities in import activity is higher compared to 2015.

the disruption of mining production machine. In addition, commodity prices of crude palm oil (CPO) in the international market with the majority is under USD 750 (only 3 months CPO prices exceed USD 750, i.e May, June, and October). Meanwhile, the price of cocoa fell significantly of 35.3 percent since absorbed by local industry.

"For excise, with an increase of tobacco excise rates in 2016 about 11.52 percent, excise revenue has been predicted only reaching 97.7 percent. This condition decreased when compared to 2015 and this is mainly due to excise revenue in 2015 accounting for 14 months due to the enactment of Minister of Finance Regulation number 20, while in 2016 excise revenue returns as of 12 months, "said Sugeng.

Furthermore, he explained, for 2016 the constraints faced by excise revenue such as the economy growth that is relatively low causing a decrease in purchasing power, the anomalies decreased production of cigarettes at 2 main contributor companies of tobacco excise, where in the last 10 years has just happened, like the decrease of PT Djarum production by 1 percent and PT HMS by 7 percent, other constraints also increased every year are the distribution of illegal cigarettes which rose 12.14 per cent in 2016 which directly interfere the illegal cigarette market in particular plant group I.

"From the achievement of revenue targets in 2016, Customs still rely on some commodities, particularly for import duties where for 3 years has been a contributor to import duty revenue such as fuel, automotive spare parts, production of iron steel, screws/nuts/bolts, as well as corn. In addition, rice import in 2016 has a significant impact on the import revenue, "he said.

To deal with those obstacles, Customs also has issued various policies in order to make the achievement of revenue targets fulfilled, one of the policy is the issuance of Director General Instruction of INS-03 in 2016 to optimize revenue, especially from customs duties, the establishment of Optimizing Revenue Team in central office for a recommendation of importation data to do a research, the publishing of PMK 147/PMK.010 /2018 concerning on the increase of tobacco excise tariff in 2017 on October 2016 to improve the forestalling of excise revenue in December.

Another policy is the increase of enforcement through Eclipse and Wallacea Net Operation to prevent the entry of illegal goods on the east coast of Sumatra and the eastern Indonesia, and a policy that is not less important that has been issued is increasing enforcement of illegal goods subject to excise (BKC) massively both in the center of production, distribution channels, and retail venue.

From policies that have been issued, customs revenue can be optimized, it can be seen directly with the fulfillment of revenue target from 16 regional offices and three prime customs offices, There are only 8 offices has not fulfilled the target, while other 11 offices have fulfilled all revenue targets.

With optimal effort and hard work together, Customs revenue target can be fulfilled, although it is still not perfect. Those effort and hard work, which will be continued to 2017 where the world economy still leads the improvement or progress as expected by many people. Another condition is for the revenue target in 2017 is not much different from the target in 2016.

In 2017, the import duty is targeted Rp. 33,73 trillion or up to 1.1 percent compared to 2016. Excise targeted Rp. 157,16 percent of which consists of tobacco products Rp.149,88 trillion, ethyl alcohol Rp. 0,15 trillion, MMEA Rp.5.53 trillion, and plastic packaging R.p1,60 trillion. While for export duties is targeted about Rp. 0,34 trillion, that the overall total revenue target for 2017 is Rp. 191,23 trillion or it increases about 4.0 percent compared to 2016.

"Generally, the constraint in achieving revenue in 2016 will still affect revenue in 2017, such as economic growth, inflation, the increase of excise, tariff, enforcement of illegal goods subject to excise, and so on. However, with the efforts that have been made during 2016, it is expected that the constraints derived from monitoring activities can be down significantly, " said Sugeng.

Related to the new policy issued by the Customs nowadays, such as the Bonded Logistics Center (PLB), according to him it has not been a significant impact on the customs and excise revenue because its main purpose is an investment. As for the impact of these facilities of PLB on the revenue will be benefited by Customs in the next 3 years.

"Especially for new commodities that become the object of excise that is plastic, although in state budget the

Tahun 2016 peredaran rokok illegal mencapai 12,14 persen yang secara langsung menganggu market rokok legal.
In 2016 the distribution of illegal cigarettes reached 12.14 percent which directly interferes the legal cigarette market.

bulanan berdasarkan data atau analisis teknikal dan fundamental terhadap mesin-mesin penerimaan pada satkernya.

Di awal tahun 2017 tentunya kita semua berharap agar apa yang dilakukan dan diupayakan oleh Bea Cukai dapat berjalan dengan optimal sehingga target penerimaan yang dibebankanya dapat tercapai. Karena di tengah kondisi lesunya perekomonian dunia saat ini namun Bea Cukai mampu mencapai target tersebut, negara tetap mendapatkan pemasukan yang cukup besar untuk membangun negeri ini. Tidak hanya itu, APBN yang menjadi instrumen keberhasilan suatu bangsa pun akan turut diperhitungkan oleh negara lain karena mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran dengan baik.

(Supriyadi)

revenue has already stipulated but until now it still can not be charged because they need to study more in depth piece of plastic. We hope the discussion can be completed this year so that in 2017, we can also directly pick to become one of the leading commodity that is subject to excise duty, "he said.

With the increase of revenue target about 4 percent, it would not make Customs negligent with the efforts and policies issued previously. There are still many measures to be taken by the Customs that this year's target could be achieved perfectly. Constraints are the same in the past year would be an experience to surpass the efforts and policies that favor.

Similarly, conducted by Headquarters of Customs and Excise, although the target was not much different from 2016, but to fulfill it still requires a coordination and communication as outlined in the instructions of the Director General number INS-03 in 2016 to encourage and optimize revenue. Also by issuing Form Letter (SE-06) in 2016, which is about the delivery of monthly revenue projections and reporting the realization of revenue through the MPO.

Through this form letter (SE) is expected that every work unit can actively monitor revenue, and make a monthly projection based on data or technical analysis and fundamental of the revenue machines in every work units.

At the beginning of 2017, we all hope that what is done and pursued by the Customs can run optimally so that revenue target imposed can be achieved. Because in the midst of the sluggish world economic today, but Customs is able to achieve these targets, the state will still get a large enough income to build this country. Not only that, the state budget that becomes the instrument of the success of a nation will be taken into account by other countries because they are able to manage revenue and expenditures properly.

(Supriyadi)

Direktur Teknis Kepabeanan
Oza Olavia

AHTN 2017, MENGAKOMODIR KEPENTINGAN NASIONAL DI BIDANG EKSPOR IMPOR

The Harmonized Commodity Description and Coding System 2012 (Harmonized System 2012/HS 2012) telah diamandemen. Amandemen tersebut selanjutnya akan menjadi sistem klasifikasi baru yang disebut dengan HS 2017 dan akan menggantikan HS 2012 yang dipakai oleh semua negara *contracting party* dari WCO saat ini dan akan mulai diberlakukan tahun 2017.

Amandemen HS 2012 (HS 2017) yang dilakukan oleh WCO berpengaruh terhadap sistem klasifikasi di *contracting party* dari WCO termasuk negara anggota ASEAN yang juga telah melakukan amandemen terhadap AHTN 2012 (AHTN 2017) untuk menyesuaikan diri terhadap amandemen yang dilakukan oleh WCO dan perubahan lingkungan teknologi dan perdagangan.

Selanjutnya, amandemen AHTN 2012 (AHTN 2017) berpengaruh secara langsung terhadap sistem klasifikasi yang diterapkan Indonesia dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). BTKI yang saat ini diterapkan Indonesia disusun berdasarkan AHTN 2012 atau disebut BTKI 2012 sehingga amandemen AHTN 2012 telah ditindaklanjuti dengan amandemen BTKI 2012. Hasil amandemen BTKI 2012 selanjutnya disebut BTKI 2017.

Lantas bagaimana proses amandemen BTKI 2012 itu berjalan, apa saja hasil-hasil dan manfaatnya untuk kepentingan nasional? Kami sajikan dalam wawancara Majalah WBC dengan Direktur Teknis Kepabeanan, Oza Olavia. Berikut hasil wawancaranya.

Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya amandemen BTKI 2012 menjadi BTKI 2017?

Amandemen HS adalah sesuatu yang rutin yang dilakukan yaitu 5 tahun sekali. Tapi amandemen kali ini adalah amandemen yang spesial karena adanya perubahan digit di BTKI, yaitu dari 10 digit di BTKI 2012 menjadi 8 digit di BTKI 2017. Selain itu, dengan telah diimplementasikannya Indonesia National Single Window (INSW), perubahan BTKI 2017 menjadi sangat kompleks, karena perubahan struktur klasifikasi berdampak pada segala aspek dan harus merubah seluruh *database* yang terkait dengan kode HS.

Bisa Ibu ceritakan, bagaimana proses penyusunan dan amandemen AHTN 2012 sampai dengan amandemen BTKI 2017?

BTKI 2017 disusun berdasarkan HS dan AHTN, sehingga penyusunan BTKI 2017 dimulai dengan terbitnya amandemen HS 2017 pada tahun 2014. Selanjutnya, amandemen HS 2017 tersebut dibahas bersama negara ASEAN lain di forum AHTN Task Force, sekaligus membahas usulan masing-masing negara anggota ASEAN.

Dalam menindaklanjuti pembahasan di AHTN Task Force tersebut, pada tahun 2014 kami telah membentuk Tim Negosiasi AHTN 2017 yang beranggotakan pejabat dan pegawai dari Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Kepabeanan Internasional Bea Cukai (saat itu), untuk menjadi perwakilan Indonesia dalam proses negosiasi AHTN, sekaligus melakukan koordinasi dengan BKF dan seluruh kementerian terkait lainnya dalam rangka pembahasan usulan Indonesia di AHTN.

Setelah pembahasan AHTN 2017 selesai, selanjutnya struktur klasifikasi AHTN 2017 tersebut menjadi dasar pelaksanaan penyusunan BTKI 2017. Untuk menindaklanjuti pekerjaan penyusunan BTKI 2017 tersebut, kami juga telah menyusun Tim Penyusunan BTKI 2017 yang beranggotakan perwakilan dari beberapa Direktorat terkait di Bea Cukai,

Director of Customs
Oza Olavia

AHTN 2017, ACCOMMODATING NATIONAL INTEREST IN THE FIELD OF IMPORT AND EXPORT.

The Harmonized Commodity Description and Coding System 2012 (Harmonized System 2012/HS 2012) has been amended. The amendment will be a new classification system called HS 2017, which would replace the currently prevailing HS 2012 that has used by all contracting parties of the World Customs Organization (WCO). HS 2017 begins to be implemented on 2017.

The amendment of HS 2012 (HS 2017) conducted by WCO will affect the classification system of the contracting parties of HS convention, including ASEAN member states, which adapt to the HS amendment as well as current changes in the trend of trade and technology by amending AHTN 2012.

Furthermore, the amendment of AHTN 2012 (AHTN 2017) directly affects the classification system applied by Indonesia in the Indonesian Customs Tariff Book (BTKI). BTKI that currently applied in Indonesia arranged based on AHTN 2012 or called BTKI 2012 so that the amendment of AHTN 2012 has been followed up with the amendment of BTKI 2012. The result of the amendment is referred as BTKI 2017.

So how does the amendment process of BTKI 2012, what are the results and benefits for the national interest? We will present it in WBC interview with Director of Customs, Ms. Oza Olavia. Here are the interview results.

How is your response towards the amendment of BTKI 2012 to BTKI 2017?

Amendment HS is something routinely done of five (5) years. However, this time becomes the special amendment due to the change of digit in BTKI, from 10-digit in BTKI 2012 to 8-digit in BTKI 2017. In addition, with the implementation of Indonesian Single Window (INSW), the change of BTKI 2017 becomes very complex since the change of classification structure will affect many aspects that will change the entire database related to HS code.

1. Could you tell me how is the process of drafting and amending of AHTN 2012 to become BTKI 2017?

BTKI 2017 arranged based on HS and AHTN, thus the developing of BTKI 2017 began with the publication of the amendment of HS 2017 in 2014. Further, the amendment was discussed by other ASEAN member states in AHTN Task Force Forum, as well as discussing the proposal of each ASEAN member state.

To follow-up the discussion in AHTN Task Force, in 2014 we have formed the AHTN 2017 Negotiating Team that consisted of officials and officers of Directorate of Customs and Directorate of international and Public Affairs to become the representatives of Indonesia in the AHTN negotiating process as well as coordinating with Fiscal Policy Agency (BKF) and other related Ministries in the framework of Indonesia's proposal for AHTN.

After discussion of AHTN 2017 has completed, then the classification structure of AHTN 2017 became the basis for implementing the drafting BTKI 2017. To follow-up the drafting BTKI 2017, we have formed the drafting team of BTKI 2017 that consisted of the representatives from related Directorates such as DJBC, BKF, and Ministry of Industry. The work of drafting BTKI 2017 consists of drafting goods classification structure including regulation adjustment, developing the database, translation, system adjustment and any other works, considering the changes of classification structure will have an impact on the entire aspects in DJBC.

How is the readiness of Indonesian Customs to carry out the amendment of AHTN 2012?

DJBC still continue to make preparations for the implementation of BTKI 2017, including coordinating with BKF in order to construct some Regulation of the Minister of Finance, to prepare system and infrastructure as well as other matters that are

BKF, dan, Kemenperin. Pekerjaan penyusunan BTKI 2017 meliputi tidak hanya menyusun struktur klasifikasi barang, tapi juga mencakup penyesuaian berbagai peraturan, penyusunan *database*, penerjemahan, penyesuaian sistem, dan pekerjaan lainnya yang sangat banyak, mengingat perubahan struktur klasifikasi berdampak pada seluruh aspek di Bea Cukai.

Apa saja kesiapan Bea Cukai untuk menjalankan amandemen AHTN 2012?

Bea Cukai saat ini masih terus melakukan berbagai persiapan dalam rangka implementasi BTKI 2017, termasuk di antaranya berkoordinasi dengan BKF dalam rangka menyusun beberapa Peraturan Menteri Keuangan, mempersiapkan sistem dan infrastruktur, serta hal-hal lainnya yang terdampak oleh perubahan struktur klasifikasi.

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Bea Cukai untuk mengantisipasi adanya amandemen ini?

Kami telah mencoba mengantisipasi dengan menginventarisir secara rinci hal-hal yang terdampak dengan struktur klasifikasi, sejak dimulainya proses penyusunan AHTN 2017, dan selama kurang lebih 2 tahun ini melakukan koordinasi dengan intensif dengan BKF, Ditjen Pajak, INSW, Kemendag, Kemenperin, dan seluruh kementerian terkait lainnya. Hingga saat ini, seluruh instansi tersebut juga bekerja keras bersama untuk dapat segera menyelesaikan tugasnya masing-masing demi kelancaran implementasi BTKI 2017 nanti.

Dalam AHTN task force sejauh mana peran Bea Cukai dan rekomendasi apa saja yang dikeluarkan?

AHTN Task Force beranggotakan perwakilan dari instansi kepabeanan di seluruh negara ASEAN yang memahami permasalahanHS/klasifikasi barang. Peran Indonesia di AHTN Task Force sangatlah dominan, karena delegasi Indonesia dari Bea Cukai selalu dijadikan referensi dan selalu memberikan rekomendasi dan solusi yang konstruktif dalam pembahasan di forum tersebut. Selain itu, Indonesia melalui Bea Cukai juga telah mengusulkan banyak pos tarif baru, baik yang berasal dari pos nasional, maupun pos baru, untuk menjadi pos AHTN dimana hampir semua usulan tersebut diterima di forum.

Dengan adanya AHTN yang diamandemen, apa manfaatnya untuk Indonesia?

AHTN dinegosiasikan oleh Bea Cukai dalam forum AHTN Task Force berdasarkan masukan dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait sesuai kepentingan nasional. Dengan demikian, amandemen AHTN 2017 yang telah diterbitkan tersebut diharapkan juga dapat mengakomodir dan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, baik ekspor maupun impor.

Bagaimana koordinasi dengan lembaga terkait, baik di luar negeri maupun di ASEAN?

Bea Cukai sangat aktif di berbagai forum regional maupun internasional untuk permasalahan kepabeanan, termasuk di antaranya permasalahan klasifikasi. Secara rutin, kami hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum HS Committee di WCO maupun AHTN Task Force, dengan demikian koordinasi dapat berjalan dengan lancar, baik dengan negara lain maupun dengan lembaga di luar negeri.

Apa pengaruh amandemen AHTN terhadap BTKI 2012?

Karena BTKI disusun berdasarkan HS dan AHTN, tentunya perubahan atas HS atau AHTN akan berdampak langsung pada BTKI, sehingga setiap diterbitkannya amandemen AHTN maka BTKI harus dilakukan perubahan.

Salah satu amandemen rencananya akan menggunakan sistem penomoran 8 digit sehingga sistem klasifikasi BTKI 2017 akan sama persis dengan sistem AHTN sepenuhnya yang semula menggunakan sistem penomoran 10 digit. Menurut Ibu, apa tujuan diterapkannya sistem baru ini?

Sebenarnya tujuan kesepakatan menggunakan AHTN antara negara ASEAN itu adalah agar tercipta suatu keseragaman struktur klasifikasi barang di seluruh ASEAN. Dengan adanya pemecahan pos nasional, menyebabkan terjadinya ketidakseragaman di ASEAN dan tidak sesuai dengan tujuan awal penyusunan AHTN. Saat ini, ASEAN Economic Community telah diterapkan, yang diantaranya mewujudkan suatu pasar tunggal di wilayah Asia Tenggara sehingga struktur klasifikasi di negara ASEAN harus *comply* dengan AHTN. Selain itu, nantinya ada rencana penerapan *single submission* dari *customs declaration* dalam rangka mendukung ASEAN Single Window. Dengan seragamnya struktur klasifikasi barang, maka proses implementasi ASW tersebut akan menjadi lebih cepat dalam rangka mendukung fasilitasi perdagangan yang merupakan salah satu misi Bea Cukai.

Dalam pembahasan penyusunan AHTN 2017 penggunaan BTKI 2017, pos-pos tarif nasional terbesar pada semua sektor industri nasional. Lantas sejauh mana koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait?

Sebagaimana telah kami jelaskan, bahwa koordinasi dengan seluruh K/L intensif kami lakukan sejak tahun 2014 hingga sekarang, yaitu dalam rangka penyusunan AHTN 2017. Koordinasi kami lakukan dalam rangka mengidentifikasi pos-pos yang menjadi kepentingan Indonesia, yang akan diusulkan menjadi pos AHTN. Dalam mengidentifikasi pos-pos yang diperlukan tersebut, K/L juga berkoordinasi dengan asosiasi, perusahaan, dan industri.

Selain itu, dapat saya sampaikan bahwa dengan berubahnya digit dari 10 digit menjadi 8 digit, sebenarnya secara cakupan pos tarif nasional tidak hilang, melainkan pos tersebut berubah menjadi pos AHTN sehingga pos nasional yang tadinya hanya muncul di BTKI nantinya muncul di Buku Tarif negara ASEAN lainnya sebagai pos AHTN. Namun hal ini hanya terjadi untuk pos nasional yang diusulkan oleh K/L.

Apa keuntungan yang dirasakan pengusaha dengan adanya AHTN ini?

affected by changes in the classification structure.

2. What are the steps conducted by DJBC to anticipate this amendment?

We have tried to anticipate to detailed inventory things that are affected by the classification structure since the start of AHTN 2017 drafting process and for more than two years, we coordinate intensively with BKF, Directorate General of Taxation, INSW, Ministry of Trade, Ministry of Industry and all other relevant Ministry. Until now, all agencies are working hard together to be able to immediately resolve their respective duties for the smooth implementation of BTKI 2017.

3. In AHTN task Force, to what extent the role of Customs (DJBC) and what are the recommendation for this matter?

AHTN Task Force consists of representatives of the customs authorities in all ASEAN member states who understand the issues of HS/classification of goods. The role of Indonesia in AHTN Task Force is dominant because the Indonesian delegation from DJBC always used as a reference and always providing recommendations and solutions to a constructive discussion in the forum. Besides Indonesia through DJBC also has proposed many new tariff lines, both from the national post and new post, to be heading AHTN where almost all of the proposals received in the forum.

4. What is the benefit for Indonesia in the presence of AHTN amended?

AHTN negotiated by DGCE in forum AHTN Task Force based on input from related various Ministries / Agencies based on national interest. Thus, the amendment of AHTN 2017 that has been published will be expected to be able to accommodate and in accordance with the national interests of Indonesia, both exports, and imports.

5. How is the coordination with other relevant institutions, both abroad and in ASEAN?

DJBC is very active in various regional and international forums for customs issues, including classification problems. Regularly, we attend and actively participate in HS committee forum in WCO and AHTN Task Force, therefore the coordination can run smoothly either with other countries or institutions.

6. What is the effect of the amendment of AHTN to BTKI 2012?

Because BTKI drafted by HS and AHTN, of course, the changes to HS or AHTN will have a direct impact on BTKI, so any issuance of amendments AHTN then BTKI must be changed.

One of the amendments plans to use the 8-digit numbering system so that BTKI 2017 classification system will be exactly same as the original fully AHTN system that uses a 10-digit numbering system. According to you what is the purpose of the implementation of this new system?

Actually, the purpose of the assent to use AHTN among ASEAN member states is to create a uniformity of the structure of classification of goods across ASEAN. With the breakdown of the national post, causing unevenness in ASEAN and incompatible with the original purpose of the drafting of AHTN. Currently, in ASEAN Economic Community has been implemented, which include the realization of a single market in the region so that the classification structure in ASEAN member states must comply with

Kami tentunya berharap bahwa AHTN 2017 yang telah disusun dapat sesuai dengan kepentingan mereka, karena sebagaimana saya jelaskan di atas, bahwa pada dasarnya AHTN juga disusun berdasarkan masukan dari pengusaha melalui K/L terkait.

Bagaimana dengan rencana sosialisasi amandemen AHTN, baik pada pengusaha maupun pegawai Bea Cukai?

Sosialisasi bagi para pengusaha akan segara kami lakukan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pemberlakuan struktur klasifikasi yang baru yaitu BTKI 2017. Kepada para pegawai telah kami sosialisasikan sejak awal penyusunan BTKI 2017, dan nanti setelah terbit PMK juga akan kami sosialisasikan kembali.

Apa manfaat amandemen AHTN buat negara anggota ASEAN?

Manfaatnya adalah struktur klasifikasi negara tersebut sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu HS 2017, serta strukur klasifikasi AHTN nya mengakomodir kepentingan seluruh negara ASEAN.

Apa harapan Bea Cukai dengan adanya amandemen BTKI 2012 mendukung pelayanan perdagangan internasional?

Kami berharap agar amandemen BTKI 2012 dapat sesuai dengan kepentingan nasional dan semoga struktur klasifikasi yang baru juga sesuai dengan pola perdagangan internasional terkini. **(Ariessuryantini)**

AHTN. Additionally, there is an implementation plan for a single submission of customs declarations in support ASEAN Single Window. With the uniformity of the structure of classification of goods, the process of ASW implementation will be faster in order to support trade facilitation which is one of DJBC missions.

7. In the discussion of drafting AHTN 2017, the use of BTKI 2017, the largest national posts tariff in all sectors of national industry. Then what is the extent of coordination with related ministries and agencies?

As we have explained that coordination with all K/L intensively conducted since 2014 until now, namely in the framework of drafting AHTN 2017, we coordinate in order to identify posts that become the interest of Indonesia that has been proposed to be the heading in AHTN. In identifying the posts required the Ministries and Institutions also coordinate with associations, companies, and industries. Additionally, I can say that with the change of digit from 10-digit to 8-digit, actually in the scope of the post, the national tariff is not lost, but the post turned into AHTN post that national post that had just appeared in BTKI later appeared in ASEAN Tariff Book as AHTN post. But this can only happen to the national post proposed by K / L.

8. What are the perceived benefits by entrepreneurs with this AHTN?

We certainly hope that AHTN 2017 can be appropriate with their interests because, as I mentioned above that basically AHTN also drew up with input from stakeholders through related K/L.

9. What about the socialization of AHTN amendment plan, both for entrepreneurs and customs officers?

Socialization for entrepreneurs would be immediately made after the publication of Regulation of Minister of Finance that became the basis for the implementation of new classification structure called BTKI 2017. For employees, we have been socialized since the beginning of drafting BTKI 2017, and then after the Minister of Finance Regulation has issued, we will also socialize it again.

10. What are the benefits of AHTN amendment for ASEAN member states?

The benefit is the country's classification structure will be in accordance with the applicable international standards, called HS 2017, as well as the structure of AHTN classification that accommodates the interests of all ASEANmember states.

11. Could you tell us the hope of Indonesian Customs with the amendment of BTKI 2012 to support the international trading service?

We hope that the amendment of BTKI 2012 can be appropriate with the national interest and hopefully the new classification structure is also in accordance with the latest international trade patterns. (Ariessuryantini)

TAK ADA LAGI HANGGAR DI BEA CUKAI **SOEKARNO-HATTA**

Fokuskan kinerja PDTT, 4 dari 8 gudang di Bea Cukai Soekarno-Hatta sudah digabung pelayanannya.

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa ujung tombak pekerjaan di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta ada di hanggar-hanggar yang jumlahnya mencapai 8 gudang dan tersebar di seluruh wilayah kerja KPU atau bandara Soekarno-Hata. Kedelapan gudang ini lebih dominan melayani kegiatan barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan (PJT) dengan menggunakan dokumen PIBK (pemberitahuan impor barang khusus), ketimbang kegiatan ekspor impor yang menggunakan dokumen PIB (pemberitahuan impor barang) atau PEB (pemberitahuan ekspor barang).

Kegiatan PIBK, selama ini dikerjakan oleh hanggar disetiap gudang, namun seiring dengan perubahan tipologi kantor Soekarno-Hatta dari yang sebelumnya Tipe Madya Pabean, yang dikepalai oleh pejabat Eselon III, berubah menjadi Kantor Pelayanan Utama yang dikepalai oleh pejabat Eselon II, mengharuskan penghapusan jabatan eselon V atau hanggar yang ada selama ini.

Dengan perubahan yang berlaku sejak 1 Juli 2016, Bea Cukai Soekarno-Hatta tidak lagi memiliki hanggar untuk tiap gudangnya, dan jabatan hanggar digantikan oleh Pemeriksa Dokumen Tingkat Terampil (PDTT) yang setingkat dengan eselon V, yang sebenarnya disebut juga sebagai Pejabat

Penjaluran yang dilakukan PDTT masih bersifat manual erdasarkan jenis barang dan negara asal barang.

Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Lanjutan (PFPBCL).

Namun, petugas PDTT tidak akan ditemukan di KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan KPU Bea Cukai Batam, hal ini tidak lain disebabkan di dua kantor tersebut dokumen yang datang lebih banyak menggunakan PIB dan sedikit sekali yang menggunakan PIBK. Berbeda dengan yang terjadi di Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Lalu apa perbedaan hanggar dengan PDTT? Secara umum kedua jabatan ini tidak berbeda tugas dan fungsinya, keduanya sama-sama memeriksa dokumen atau barang kiriman dari PJT, dan kemudian menjalurkannya untuk ditentukan bea masuk dan pajak lainnya. Jadi, secara umum tugas PDTT hampir sama dengan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), hanya bedanya PFPD pekerjaannya sudah *by sistem* sedangkan PDTT masih banyak dilakukan secara manual.

Selain di gudang, PDTT juga ada di terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani penumpang yang kedapatan membawa barang melebihi nilai yang telah ditentukan. Untuk tugas ini, sebelumnya dilakukan oleh Bidang Pabean, namun saat ini pemeriksaan dilakukan sepenuhnya oleh unit Penindakan dan Penyidikan (P2) yang kemudian akan memeriksa sekaligus menyerahkan jika ada penumpang yang membawa barang

Selain harus memahami database harga, petugas PDTT di terminal kedatangan internasional juga perlu memiliki kemampuan bahasa asing

melebihi ketentuan.

Salah seorang PDTT, Soni Iriawan mengungkapkan bahwa untuk kegiatan yang dilaksanakan petugas PDTT saat ini sebagian besar sudah disentralisasi. Artinya, dari delapan gudang yang ada, empat di antaranya dilayani di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Selain memudahkan petugas dalam mejalankan tugasnya, pengajuan dokumen sudah *paperless*, dan petugas tinggal menunggu kiriman dokumen secara elektronik yang kemudian akan ditentukan bea masuk dan pajak lainnya. Selain itu, dengan adanya sentralisiasi tersebut kontak langsung antara petugas dengan pengguna jasa dapat terhapuskan.

"Secara umum, PDTT sama dengan petugas hanggar yang dulu tugasnya melakukan pelayanan dokumen barang kiriman sekaligus memeriksa dan memberi nilai bea masuk dan pajak yang harus dikenakan. Tugas ini sedikit banyak mirip dengan yang dilakukan oleh PFPD," ungkap Soni.

Hanya saja, ia menjelaskan lebih lanjut, dalam pelaksanaan tugas, PFPD telah dibekali dengan database harga, importirnya jelas ada API (Angka Pengenal Impor), pabrikan, produsen, dan lain-lain. Selain itu, PFPD untuk penjalurannya telah dilakukan *by sistem* sehingga petugas yang memeriksanya dapat lebih konsentrasi kepada harga yang

diberitahukan importir.

Lain halnya dengan PDTT, sepanjang barang tersebut beratnya di bawah 100 kilogram, maka dikategorikan barang kiriman sehingga pengguna jasanya tidak memerlukan API dan banyak dilakukan perorangan atau yayasan. Barang yang mereka kirim akan dipilah berdasarkan jenis, berat, dan asal negaranya. Petugas PDTT dengan kategori itu juga harus memutuskan apakah barang tersebut masuk jalur merah atau hijau. Jika hijau, bisa putus saat itu juga, sedangkan jika merah akan diminta petugas pengawasan untuk memeriksa barang yang laporan hasil pemeriksaannya diserahkan ke PDTT, untuk selanjutnya ditentukan bea masuk dan pajak lainnya.

Kendati untuk penjaluran masih dilakukan secara manual, namun sampai sejauh ini tidak banyak pengguna jasa yang merasa keberatan akan pengenaan bea masuk dan pajak yang dikenakan. Petugas PDTT tetep bersikap profesional untuk menentukan bea masuk dan pajak lainnya dengan mengandalkan *database* dan bantuan *browser* internet untuk mendapat informasi harga barang-barang saat ini.

Pengalaman yang paling sering dialami oleh petugas PDTT akan barang kiriman adalah ketika ada hari belanja *online* sedunia. Pada saat itu,

banyak barang kiriman yang harganya diberitahukan jauh dari harga sebenarnya, jika sudah demikian biasanya petugas PDTT akan meminta *invoice* dari pengguna jasa untuk diperlihatkan benar tidaknya harga barang yang mereka beli.

Kendala petugas PDTT yang bertugas di kantor tentunya berbeda dengan kendala yang dialami oleh petugas PDTT di terminal kedatangan internasional. Di sini, petugas PDTT berhadapan langsung dengan pengguna jasa yang kedapatan membawa barang yang melebihi ketentuan. Umumnya, mereka mengaku tidak mengetahui ketentuan yang berlaku. Di sinilah peran PDTT untuk menjelaskan kepada mereka agar bisa memahaminya.

Namun, tidak sedikit juga dari mereka, khususnya warga negara asing yang tidak terima jika dikenakan bea masuk dan pajak lainnya untuk barang bawaan mereka. Tentunya, kemampuan mengolah bahasa petugas PDTT diuji, selain harus paham dengan bahasa mereka, juga harus bisa membuat mereka paham terhadap ketentuan yang ada.

"Terkadang kita seharian berdebat karena mereka *nego* untuk dapat dikurangi pajak-pajak di luar bea masuk yang menjadi tugas utama Bea Cukai. Belum lagi yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau Inggris, sehingga sulit untuk menjelaskan ketentuan. Atau yang sudah menempuh perjalanan belasan jam dan ketika tiba harus membayar pajak, pastinya tidak akan terima. *Nah*, disinilah peran PDTT untuk bisa mengomunikasikan ketentuan yang ada agar negara tetap dapat menerima pemasukan dari pajak yang harus dikenakan," tuturnya.

Walaupun jam kerja PDTT adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu, namun kemampuan dan profesionalitas mereka tidak mudah goyah dalam menentukan jalur maupun nilai bea masuk dan pajak lainnya. Apalagi saat ini Bea Cukai Soekarno-Hatta akan membuat penjaluran dari PIBK secara sistem, membuat petugas PDTT tidak lagi dihantui kesalahan penjaluran atau pengeluaran barang. Dengan otomasi tersebut, apa yang ditentukan sudah mengacu pada sistem dan ketentuan yang ada.

Bahkan, kini peran PDTT juga akan diterapkan di kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai tipe madya yang memiliki volume dokumen PIBK cukup tinggi, seperti di Kantor Bea Cukai Halim, Pasar Baru, dan Surabaya. Dengan diberlakukannya PDTT di kantor-kantor tersebut, maka peran hanggar akan lebih signifikan lagi dan tugas mereka pun akan didukung dengan sistem yang memadai untuk kelancaran dan keamanan dalam menjalankan tugas.

(Supriyadi)

MARIO SUSANTO

IKHLAS MENJALANI HIDUP

Pria yang semasa sekolahnya menyukai pelajaran eksakta ini beberapa kali terpilih menjadi pegawai teladan di kantornya. Mulai sejak ia bertugas di Kantor Bea Cukai Purwakarta sebagai pelaksana, hingga sebagai pegawai dengan kinerja amat baik di Kantor Bea Cukai Teluk Bayur tempat ia berdinas sekarang.

Ketika menerima penghargaan sebagai Pegawai Teladan dari Kepala KPBBC Teluk Bayur

Didaulat memberikan kesan dan pesan setelah menerima penghargaan sebagai Pegawai Teladan.

Beberapa kriteria penilaian itu didasarkan pada keteladanan dalam bersikap, rajin, bertanggung jawab, serta responsif dalam melaksanakan tugas. Kepada Majalah WBC, Mario yang terlahir dari keluarga pedagang berkisah tentang perjalanan kariernya. Pada awalnya, ia sama sekali tidak berminat untuk menjadi pegawai negeri, namun dorongan keluarga dan koleganyalah yang menjadikan ia akhirnya menemukan 'rumah persinggahan'-nya kini.

"Awalnya saya tidak berminat menjadi pegawai negeri. Tidak terpikirkan juga untuk menjadi pegawai Bea Cukai. Terinspirasi dari orang tua sebagai pedagang di Bukittinggi, maka selepas SMA saya putuskan kuliah ambil jurusan bisnis agar bisa bantu usaha orang tua. Satu semester berjalan di Universitas Padjajaran Bandung, namun akhirnya saya ambil STAN D-I Program Diploma Bea Cukai di Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang tahun 2005," ceritanya.

Keputusannya pindah ke STAN itu terjadi setelah Mario mengikuti saran abangnya di kampung. Abangnya menyarankan agar Mario mengambil studi di STAN, karena usaha dan bisnis saat ini terasa lebih susah. Selepas pendidikan awal di STAN, Mario mengaku sempat magang di Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Setelah itu langsung penempatan ke Tanjung Pandan Belitung selama dua tahun tiga bulan.

Ketika di Tanjung Pandan, Mario sangat sibuk. Kantor kecil yang memiliki pegawai sebanyak delapan orang berikut kepala kantor itu mengharuskan dirinya dan rekan-rekan merangkap pekerjaan. "Ketika itu saya merangkap pekerjaan di bagian umum, penindakan dan penyidikan, dan perbendaharaan," kenangnya. Setelah itu, Mario menjalani pendidikan D3 Khusus Akuntansi di STAN Jakarta hingga Desember 2009. Selama kuliah, tugas Mario dan rekan-rekannya ditarik ke kantor pusat semua.

Pria yang lahir di Canduang Bukittinggi, 17 April 1987, itu juga pernah terpilih menjadi pegawai teladan di Kantor Bea Cukai Purwakarta sebagai pegawai pelaksana penerima dokumen. Dirinya sangat termotivasi guru matematika semasa ia mengenyam pendidikan menengahnya di SMA 3 Bukittinggi. "Nama guru saya itu Haji Masrizal. Beliau mengajarkan untuk mengikhlaskan, melakukan sesuatu apapun, walaupun hal itu tidak dilihat atau dinilai orang lain," ungkapnya.

Petuah dari gurunya itu selalu membekas di benak Mario. Hal itu yang menjadikan Mario bertekad untuk selalu melakukan yang terbaik. Mengaku sangat terilhami oleh gurunya, Mario berpandangan bahwa pekerjaan itu adalah kewajiban entah ada penilaian atau tidak maka ikhlas dan sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. "Saya melakukan pekerjaan ini ikhlas untuk menjadikan Bea Cukai makin baik. Kebetulan saya asli dari daerah sini, maka saya akan lebih termotivasi menjadi yang lebih baik lagi," ujar Mario.

Namun demikian, Mario merasa kinerjanya selama ini masih belum maksimal. Ayah dari seorang anak laki-laki yang hobinya bermain bola kaki dan futsal ini menahbiskan motto hidupnya, yakni "ikhlas apapun yang dilakukan". Kini, tugas sehari-hari Mario di kantor adalah mengusahakan perizinan dokumen bagi para pengguna jasa kepabeanan. Kenangan terindah yang pernah dilaluinya, yakni ketika masih bertugas di Tanjung Pandan Belitung pada saat Lebaran Haji tahun 2008.

"Ketika itu di kantor hanya menyisakan kami berdua (Mario dan seorang rekannya-red) karena saat itu sudah pada libur. Kemudian ada pemberitahuan kapal berisikan barang tambang datang. Ketika itu kami berdua melakukan *boatzoeking* pas musim hujan, ombak besar, dan kami harus ke tengah karena perairan Belitung termasuk dangkal. Ketika itu kami berdua harus melewati tali untuk menaiki kapal ketika angin sangat kencang. Pas di tengah tali yang kami pegang berputar dan melintir. Untung kami masih bisa berpegangan ke besi yang ada di kapal. *Alhamdulillah*, semua selamat tak kurang satu apapun. Itu pengalaman saya yang mendebarkan namun sangat berkesan," jelasnya bangga.

(pomo)

ABRASI PADA GIGI

PERTANYAAN

Saya seorang ibu usia 30 tahun dengan keadaan gigi sering linu bila terkena dingin atau panas, baik saat minum, makan atau saat berkumur. Saya rajin menyikat gigi sehari tiga kali. Gigi saya tidak berlubang, tapi pada leher gigi terlihat ada cekungan. Apakah cekungan itu lubang gigi, lalu apa yang harus saya lakukan agar rasa linu hilang. Terim kasih

JAWABAN

Keluhan ibu adalah timbulnya rasa linu pada gigi bila terkena rangsang dingin atau panas. Gigi tidak berlubang dan ada cekungan di leher gigi. Rasa linu tersebut timbul karena gigi menjadi lebih sensitif, istilahnya adalah hypersensitif. Bisa terjadi pada satu gigi saja atau pada beberapa gigi. Gigi dengan hypersensitif bisa disebabkan oleh banyak hal. Melihat adanya cekungan pada bagian leher gigi besar kemungkinan hypersensitif disini disebabkan oleh adanya abrasi pada leher gigi.

Adapun definisi dari Abrasi Gigi adalah suatu keadaan dimana lapisan terluar yaitu email gigi terkikis secara mekanis, yang terjadi karena sebab-sebab tertentu dan terjadinya pada leher gigi. Bagian leher gigi merupakan bagian yang dekat dengan gusi. Apabila struktur email gigi telah rusak dan kerusakannya telah mencapai bagian dentin (tulang gigi) maka menyebabkan gigi menjadi sensitif.

Pada gigi yang mengalami abrasi, dentin tidak lagi dilidungi oleh email. Membuat pori-pori pada dentin (tubuli dentin) menjadi terbuka. Tubuli dentin terhubung dengan pembuluh syaraf di dalam gigi, maka timbulah rasa linu pada gigi tersebut.

Pada umumnya abrasi terjadi pada usia dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada usai muda. Gesekan yang terus menerus dan berlangsung lama membuat email gigi manjadi terkikis. Bahkan bila tidak segera ditangani abrasi bisa berlanjut mengikis dentin dan dapat mengenai jaringan syaraf pada ruang pulpa di dalam gigi.

Adapun ciri ciri dari gigi abrasi adalah:

- Terlihat atau terasa adanya cekungan tajam berbentuk v kecil pada leher gigi dekat gusi.
- Rasa linu atau nyeri bila makanan atau minuman yang panas ataupun dingin. Bahkan hembusan angin pada gigi juga dapat menimbulkan rasa ngilu dan nyeri.

Meskipun email merupakan bagian terkeras dari gigi, lama kelamaan bisa terkikis secara mekanis. Beberapa tindakan kita, tanpa disadari bisa menjadi penyebab kerusakan gigi. Kita perlu tahu tindakan yang justru malah membuat kerusakan pada gigi.

Berikut adalah beberapa penyebab abrasi gigi:

- Cara menyikat gigi yang kurang tepat.
- Sikat gigi dengan tekanan yang keras dan gerakan horizontal (kekiri kekanan) memudahkan gigi abrasi
- Kebiasaan buruk misalnya menggigit pensil.
- kebiasaan menggigit kuku, pulpen dan kebiasaan iseng membuka botol minuman dengan gigi ternyata menyebabkan kerusakan email gigi. Gesekan yang dialami gigi akan membuat lapisan gigi mudah terkikis.
- Kawat pada gigi palsu yang terlalu mencengkeram.
- Cengkeraman kawat yang terlalu kuat pada gigi tiruan dapat menimbulkan kerusakan pada struktur gigi.
- Kebiasaan menggunakan tusuk gigi yang berlebihan di antara gigi.
- Sering menggunakan tusuk gigi juga menyebabkan terjadinya brasi pada gigi.
- Penggunaan sikat gigi dengan bulu sikat yang keras.
- Sikat gigi dengan bulu yang keras tidak baik untuk gigi

Penyebab abrasi yang paling sering ditemukan adalah karena cara sikat gigi yang salah.

Berikut adalah cara menyikat gigi yang benar:

1. Melakukan gerakan vertikal (naik-turun) mengikuti arah tumbuh gigi.
2. Gerakan vertikal diikuti dengan melakukan gerakan memutar secara halus, gunanya untuk mengeluarkan sisa makanan yang terselip dan melakukan pemijatan ringan untuk gusi.
3. Lakukan dengan lembut yang penting permukaan gigi menjadi bersih.
4. Jangan sekali-kali menekan dengan keras.
5. Apabila ada kotoran yang susah dikeluarkan, gunakan benang gigi. Dilarang menggunakan tusuk gigi.

Bila gigi sudah abrasi harus segera dilakukan tindakan. Bila tidak pengikisan pada gigi akan semakin dalam dan rasa sakit akan semakin hebat.

Tindakan pada gigi abrasi dilakukan sesuai dalamnya kikisan yang terjadi pada gigi

1. Mengoleskan fluor.
   Pengolesan flour pada gigi yang mengalami abrasi dilakukan jika keadaan abrasi gigi tidak parah. Hal ini dilakukan sebagai satu tindakan pencegahan dari proses pembentukan karies gigi dan mencegah gigi berlubang. Flour ini dapat diberikan dalam bentuk obat kumur, gel atau pasta yang dioleskan langsung ke area gigi yang dirasa mengalami abrasi.
2. Penambalan gigi.
   Bila pengikisan sudah mengenai dentin maka tindakan yang dilakukan adalah penambalan gigi. Fungsi tambalan adalah mengganti lapisan email yang hilang, sehingga rasa ngilu teratasi.
3. Menghilangkan penyebab abrasi
   Bila abrasi disebabkan oleh kebiasaan buruk, misalnya menggigit kuku. Maka kebiasaan buruk itu harus dihilangkan.
   Bila karena kawat dari gigi palsu yang tidak baik, maka lakukan perbaikan pada gigi palsu.

Barikut adalah perawatan gigi sehari hari agar gigi terhindar dari abrasi yang menjadi penyebab rasa linu:

1. Jangan menyikat gigi terlalu keras dan menekan. Gunakan tekanan ringan dan gerakan menyikat gigi yang tepat.
2. Gunakan bulu sikat gigi yang lembut sampai sedang, dengan kepala sikat gigi yang kecil.
3. Lebih berhati-hati pada saat menyikat gigi taring dan geraham kecil anda, sebab kedua gigi ini berada di sudut mulut anda. Yang biasanya secara tidak sengaja anda membersihkan bagian ini terlalu berlebihan, sehingga dapat menyebabkan abrasi gigi.
4. Hindari pasta gigi yang banyak mengandung bahan abrasif, misalnya pasta gigi untuk pemutih.
5. Hindari penggunaan tusuk gigi, dan beralih ke benang gigi.

Abrasi sebenarnya mudah dihindari, cukup dengan perawatan gigi yang baik dan benar. Rajin sikat gigi saja tidak cukup, terapkan cara sikat gigi seperti telah dituliskan diatas. Sayangilah gigi kita, gigi adalah salah satu bagian penting dalam tubah kita.

JAKARTA, EDISI JANUARI 2017
DRG. ETTY M HUSTIOWATI
POLIKLINIK KPDJBC

TEATER SEMINGGU

"Perjuangan kami harus kami tambah tenaga lagi
Ingatkah kau tentang kami yang mati di timor timor tempo hari?
Yang tertahan diruang gelap sendiri sepi
Yang hanya makan garam dan nasi
Yang tak pernah bisa berjumpa anak anak kami lagi
Senjata di tangan kiri
Semangat kami tak pernah mati
Tembaaaaaaaaaak!! Seruan yang kami dengar terakhir kali
Atau ingatkah kalian tentang peristiwa tsunami?
Kami yang pagi itu sedang menjaga perbatasan negeri
Terseret arus kencang dan tak bisa lari
Gugur dalam semangat menjaga pertiwi
Dan kami harap gugur kami berarti
Karena kami Bea Cukai berani
Indonesia jaya adalah harga yang harus kalian ganti"

(Aku adalah Bea dan Cukai)
Inilah sepenggal naskah yang dibawakan Teater Seminggu pada Peringatan Hari Bea Cukai ke-70 tanggal 13 Oktober 2016 lalu.

Penampilan teater yang menampilkan para pegawai Bea Cukai, yang tergabung dalam komunitas Teater Seminggu ini mendapatkan sambutan yang meriah. *Standing applause* tak henti-hentinya terdengar, binar kebanggaan pun tampak jelas dari mata para penonton. Tidak sia-sia berlatih hingga larut malam selama satu minggu menjelang pertunjukan, Teater Seminggu berhasil memukau Menteri Keuangan, **Sri Mulyani** dan Dirjen Bea Cukai, **Heru Pambudi**, yang hadir di barisan penonton dan terlihat benar-benar menikmati pertunjukan. Hari itu, di Aula Merauke, Gedung Papua, Kantor Pusat Bea Cukai, perhelatan Hari Bea Cukai ke-70 dihadiri para pimpinan di Kementerian Keuangan, pegawai Bea Cukai, *stakeholder*, dan para purnabakti yang merupakan para pelaku sejarah Bea Cukai, dan Teater Seminggu menjadi salah satu pengisi acara.

Selepas acara tersebut, bukan berarti kegiatan Teater Seminggu bubar. Justru momentum Hari Bea Cukai tersebut menjadi awal terbentuknya kumpulan pegawai-pegawai Bea Cukai yang mencintai seni. Teater Seminggu adalah jawaban dari sebuah penantian kumpulan orang yang percaya bahwa kreasi bisa muncul dari balik partisi, meja-meja, dan layar monitor di kantor. Dari sebuah keinginan kumpulan orang yang memahami bahwa rindu mereka akan kegiatan seni harus dibayar dengan penampilan teatrikal, musik, dan tari.

Adalah M. Rifki Al-Habib, *founder* dan perwakilan Teater Seminggu, yang menceritakan bahwa komunitas ini terbentuk dari sebuah imajinasi yang sudah tak sabar untuk dibuat nyata. "Kami menyampaikan keinginan kami untuk membuat suatu pertunjukan di acara Hari Ulang Tahun Bea Cukai. Para pimpinan pun setuju, dan dengan dukungan penuh, mereka memberikan kesempatan kepada kami yang tak sanggup menunggu untuk berekspresi," ungkap

Habib. Ia bercerita bahwa naskah teater pertamanya ini, yang berjudul "Aku adalah Bea dan Cukai" ditulis setelah ia membaca puluhan artikel dan video sejarah Bea Cukai. Pada proses penulisannya, ia juga dibantu oleh pimpinan untuk membuat naskah tersebut menjadi layak untuk ditampilkan. Adapun nama Teater Seminggu dipilih secara mendadak, yaitu ketika selesai latihan di hari pertama, dikarenakan saat itu hanya diberikan waktu seminggu untuk persiapan tampil. "Walaupun hanya seminggu, dengan berbalut semangat dan tekad, kami menggunakan waktu pada siang hari hingga menjelang senja untuk berlatih. Alhamdulillah kami mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan rekan kerja," tuturnya.

Suatu pagelaran tidaklah lengkap tanpa dukungan audio visual, tata panggung, dan pencahayaan. Syukurnya, dengan bantuan pegawai-pegawai Bea Cukai yang berbakat dalam tiga bidang tersebut, penampilan Teater Seminggu menjadi megah, dapat memberi warna panggung menjadi lebih cerah, menghidupkan suasana, dan mampu memanjakan mata penonton.

Melihat kesuksesan pada penampilan perdananya, Teater Seminggu juga telah diminta untuk mengisi acara pada kegiatan *Alumni Home Coming* di PKN STAN dan *Customs on Boarding Programme* di Kantor Pusat Bea Cukai. Ternyata, tidak hanya mumpuni dalam menggelar aksi teatrikal, Teater Seminggu juga mampu menampilkan *flash mob*, yaitu sekelompok orang dalam jumlah besar yang berkumpul pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, melakukan hal-hal yang unik dan tidak biasa seperti berdansa atau bernyanyi bersama, dan dalam beberapa saat langsung membubarkan diri dengan cepat.

Ditanyakan mengenai keanggotaan Teater Seminggu, Habib menjelaskan bahwa seluruh pegawai Bea Cukai yang tertarik dengan kegiatan komunitas ini boleh bergabung menjadi anggota. Saat ini, anggota Teater Seminggu terdiri dari 30 orang pegawai Kantor Pusat Bea Cukai. Masih menurutnya, belum ada jadwal rutin untuk berlatih, hingga saat ini latihan hanya dilangsungkan saat akan ada pertunjukan. Akan tetapi untuk kedepannya Teater Seminggu akan mengadakan semacam pelatihan dengan mengundang pemain teater dari teater-teater terkenal seperti Komunitas Salihara dan Teater Koma.

"Untuk naskah dan koreografinya tergantung dari tema atau permintaan penyelenggara dan biasanya kami buat sendiri untuk naskah atau koreografinya," jawab Habib ketika ditanyakan tentang materi pertunjukan. Ia berharap kedepannya, Teater Seminggu akan lebih banyak menggelar latihan rutin untuk mengasah kemampuan para anggota tetater. "Saya selalu ingat pesan salah seorang atasan, yaitu berkaryalah sampai mereka lelah dan akhirnya mengalah lalu memberikan jalan untuk berkreasi dan berkesan. Pesan inilah yang menjadi semangat bagi saya dan teman-teman untuk lebih baik lagi dalam berkarya,".

"Teater seminguuuuuuuuuuuu!!!!"
"Lebiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih !!!"

Jargon Teater Seminggu.
(DesiAPrawita)

M. Rifki Al-Habib

ATM OBAT UNTUK PENYANDANG HIV

Data menyebutkan bahwa negara-negara di Benua Afrika, atau disebut juga dengan *Sub-Saharan Africa*, memiliki jumlah penyandang HIV (*Human Immunodeficiency Virus)* terbanyak dengan tingkat infeksi tertinggi di dunia Diperkirakan lebih dari enam juta orang terinfeksi HIV di Afrika Selatan, itu sebabnya program untuk mengobati penyakit tesebut adalah yang terbesar di dunia.

Di Afrika Selatan, tepatnya di Kota Johannesburg, yang merupakan kota terbesar di sana, robotika dimanfaatkan sebagai cara baru dalam memfasilitasi para pasien pengidap HIV untuk melakukan terapi penyembuhan. Di beberapa tempat umum, pemerintah sedang gencar menyediakan mesin-mesin dispenser farmasi, layaknya ATM obat, yang dinamakan *South Africa ATMs*.

Mesin ATM ini diyakini memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan masyarakat di Afrika Selatan, khususnya para pengidap HIV dalam mendapatkan pasokan obat. Selama ini, meskipun kampanye pencegahan HIV dan terapi penyembuhan gencar digalakkan, namun nasib buruk terus membayangi penyandang HIV di sana. Para pasien berjuang untuk mendapatkan obat serta menerima perawatan kesehatan yang terbatas. Begitu juga rumah sakit maupun klinik yang sama-sama berlomba untuk melayani daftar tunggu permintaan pengobatan dari para pasien. Selain itu, penyandang HIV juga selalu mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, sehingga banyak dari mereka yang takut mencari bantuan medis, bahkan enggan untuk mendatangi klinik dan memenuhi kebutuhan obat. Melalui mesin ini, diharapkan pasien bisa mendapatkan obat dengan lebih mudah dan cepat, juga tentunya privasi mereka tetap terjaga.

Ide awal pengembangan mesin ini dibahas dalam Konferensi AIDS di Afrika Selatan, yang fokus dalam mengatasi permasalahan stigma buruk yang disandang oleh pasien HIV. Selanjutnya, mesin ini diperkenalkan kepada

masyarakat pada awal bulan Juli 2013. Mesin tersebut menyuplai obat-obatan untuk pasien dengan penyakit kronis, termasuk obat Antiretroviral ARV yang tidak membunuh virus, namun dapat melambatkan pertumbuhannya.

"Permasalahan di Afrika Selatan adalah stigma buruk masyarakat terhadap pengidap HIV, dan kami telah menanganinya dengan unit farmasi obat yang bisa memberikan pelayanan di luar klinik. Mesin ini memungkinkan pasien untuk mendapatkan obat pada waktu yang bisa mereka atur sendiri dan tak perlu mengkhawatirkan siapa yang melihat mereka," tutur Praktisi Medis di Johhanesberg, Dr. Thapelo Maotoe.

Cara kerja mesin ini mirip dengan mesin *teller* otomatis, menyediakan akses cepat ke obat-obatan penting, sehingga orang tidak perlu ke klinik dan mengantri di apotek. Satu hal yang membedakannya dari ATM uang adalah pasien dapat berbicara dengan seorang apoteker atau asisten apoteker yang bertanggung jawab untuk meracik obat secara *real time* pada layar mesin.

Managing Director Right E- Pharmacy, Fanie Hendriksz mengatakan, "Apa yang Anda lihat di sini adalah unit obat farmasi, yang membagi-bagikan obat kronis langsung ke pasien dalam format ATM. Mesin ini memanfaatkan sistem robotika otomatis yang memberi kemudahan akses untuk mendapatkan obat di tempat-tempat yang nyaman bagi mereka,".

Masih menurut Fanie Hendriksz, ATM obat di Klinik Thembalethu dan Rumah Sakit Umum Helen Joseph, Johannesburg telah membantu mempersingkat waktu tunggu pasien. Sebelumnya, untuk mendapatkan larutan farmasi di Thembalethu, pasien harus bangun lebih awal karena jarak perjalanan untuk sampai cukup jauh, dan untuk mendapatkan obat, pasien harus menunggu empat sampai enam jam. "Sekarang bisa berkurang menjadi di bawah 25 menit dan bila pasien sedang tidak banyak Anda bisa keluar dari sini dalam lima menit," ungkapnya.

Raj Gudala, salah seorang apoteker di klinik Thembalethu, selama tiga tahun terakhir bekerja untuk memasyarakatkan apotek otomatis. Ia mendukung perluasan dari solusi farmasi tersebut. Dalam perspektifnya, ia mendukung program yang dapat meningkatkan kualitas hidup banyak pasien ini.

Sebagai pengembangan fasilitas, empat ATM obat telah beroperasi di Kota Alexandra di luar Johannesburg sejak Oktober dan November 2016. Di lain pihak, juga sedang berkembang unit-unit mesin penyaluran obat *Right to Care*, sebuah organisasi non-profit yang mendukung dan memberikan pencegahan, perawatan, dan pengobatan untuk HIV dan penyakit paru.

(ariessuryantini)

MEMPERKENALKAN DJBC DALAM KEMENKEU MENGAJAR DI TANAH KOETARADJA

OLEH: ALFIANDI
PELAKSANA PADA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN

Langit Koetaradja masih mendung. Udara pagi begitu sejuk di kota yang yang baru-baru ini memperoleh penghargaan sebagai kota yang memiliki konsep Kota Madani dan Wisata Islami, Banda Aceh. Ada sebuah perasaan haru yang menyelimuti hati. Setelah begitu lama kaki tak menginjakkan tanah aulia ini, akhirnya sejak 21 hingga 22 Oktober 2016 saya bisa menghirup kembali udara pagi sesegar ini di Banda Aceh.

Ini merupakan perjalanan yang sungguh menginspirasi siapa saja yang mengikutinya. Dengan biaya sendiri mulai dari beli tiket pesawat, menyewa penginapan hingga berbagai kebutuhan lainnya harus dibiayai secara mandiri. Inilah program yang telah lama saya nantikan program yang dinamakan Kemenkeu Mengajar.

Kemenkeu Mengajar merupakan sebuah kegiatan yang digagas di tingkat pusat agar seluruh pegawai Kementerian Keuangan mau untuk berkontribusi meluangkan waktunya dalam satu hari untuk menginspirasi anak negeri. Program Non APBN ini mewajibkan seluruh pesertanya untuk mau meluangkan waktu dan menyisihkan uang serta tenaga selama acara berlangsung.

Pendaftaran Kemenkeu Mengajar tepat saya lakukan satu hari sebelum penutupan. Dengan mengisi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh panitia penyelenggara serta menuliskan motivasi dan berbagai pengalaman sosial yang pernah diikuti, hingga akhirnya tak beberapa lama pada hari-hari berikutnya saya mendapatkan kabar melalui email bahwa pendaftaran yang saya *apply* beberapa waktu lalu diterima oleh panitia Kemenkeu Mengajar.

Setidaknya ada 600 orang yang terpilih dalam kegiatan ini yang terseleksi dari 915 pendaftar. Seluruh peserta tersebar dari berbagai Direktorat di bawah Eselon I pada Kementerian Keuangan mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktrorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN), Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal, Badan Pelatihan dan Pendidikan Keuangan (BPPK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) hingga beberapa unit eselon I lainnya.

Kegiatan Kemenkeu Mengajar tersebar di 6 (enam) kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh, Jakarta, Balikpapan, Denpasar, Makassar, hingga Sorong. Setiap peserta yang terpilih akhirnya merencanakan materi apa saja yang akan disampaikan kepada seluruh siswa-siswi Sekolah Dasar (SD). Setidaknya setelah pengumuman seleksi seluruh peserta diharapkan untuk mengikiti *briefing* kegiatan di lokasi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara.

Ada 3 (tiga) pembagian tipe relawan. *Pertama*, Relawan Pengajar. Relawan pengajar bertugas untuk menyampaikan materi kepada siswa SD tentang profesi yang diembannya dan apa saja tugas yang dilakukan

pada institusinya. *Kedua*, Relawan Fotografer. Bertugas untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian acara dalam lensa kamera dari sudut pandang yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan tentang profesinya bersama anak-anak SD. Foto yang diambil penuh estetika dengan teknik fotografi yang baik. *Ketiga*, Relawan Videografi. Bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam bentuk film/video. Keahlian dari seorang Videografer sungguh menjadi nilai lebih dalam memvisualisasikan seluruh kegiatan sejak awal hingga berakhirnya program Kemenkeu Mengajar ini hingga pada akhirnya semua orang akan dapat menyaksikannya secara utuh dan menjadi sebuah film/video yang menarik untuk ditonton.

Setidaknya dari Kemenkeu Mengajar ini Pegawai maupun Pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang lolos di regional Banda Aceh adalah Bpk Nugroho Wahyu Widodo (KPU Tipe B Batam), Ibu Endang Worokesti (KPPBC TMP A Bogor), Ibu Wisnu Nugrahini (KPPBC TMP Gresik), Bapak Ewin Yafelli (KPPBC TMP Belawan), Alfiandi dan Wahyu Aji Pambuko (PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun).

Mengajar Bea dan Cukai

Setiap relawan mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang membahas pajak, membahas kekakayaan negara, membahas perbendaharaan negara, dan tentu saja tentang Kepabeanan dan Cukai. Dengan latar belakang Patroli Laut, saya mengajarkan kepada siswa-siswi SD tentang pemahaman apa itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika berada di Laut. Ada keunikan tersendiri dalam mengajar ini, setiap relawan pengajar dituntut untuk bisa menyampaikan materi kepada anak-anak dengan cara dan bahasa anak-anak pula.

Setelah upacara selesai dan seremonial ucapan selamat datang dari Kepala Sekolah, Bpk Noegroho sebagai ketua kelompok di SD N 68 Banda Aceh memberi sambutan dan tujuan dari kegiatan ini dan apa saja impian yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan untuk dapat memberi inspirasi bagi anak-anak ini.

Materi yang disampaikan seputar bagaimana pekerjaan seorang Pegawai Bea dan Cukai ketika mengoperasikan Kapal Patroli di tengah laut. Sebagai bagian dari institusi yang mengemban tugas *community protector* mengawasi keluar masuknya barang-barang dari dan keluar Indonesia, Bea dan Cukai mempunyai tugas mulia sebagai pengontrol barang-barang agar tidak ada barang-abrang yang masuk mau keluar dari Indonesia tanpa izin. Tentu saja pengawasan terhadapa barang-barang yang membahayakan dan dapat merusak generasi penerus bangsa harus ditegah.

Seperti yang oleh banyak orang ketahui, ada perbedaan yang harus diingat dalam memeberikan pelajaran bagi anak-anak. Dalam dunia pendidikan terdapat dua model cara mendidik yaitu Pedagogi dan Andragogi, banyak definsi yang diungkapkan oleh pakar seperti Prof. Dr. J. Hoogveld asal Belanda, Langeveld (1980), Gladys Valdivia (1988), Malcolm Knowles (1980), Salvatori (1996), Addine (2001), hingga beberapa pakar lainnya memberi definisi yang berbeda dalam memahami Pedagogi dan Andragogi ini, yang pada intinya Pedagogi adalah cara penyampaian belajar pada anak-anak sedangkan andragogi adalah cara penyampaian kepada orang dewasa. Pada kegiatan ini tentu saja Pedagogi lah yang harus diperhatikan oleh setiap Relawan Pengajar.

Kecerian muncul saat mengajarkan anak-anak walau pada awal sedikit canggung berinteraksi dengan anak-anak. Ada anak-anak yang menangis, berkelahi, hingga ada pula yang kencing di celana. Namun akhirnya setelah beberapa lama kita mengajar dan menyatu dengan mereka, kita telah dapat menjadi bagian dari orang yang

mampu memberi impian bagi mereka untuk mau mencapai cita-cita setinggi mungkin di masa mendatang.

Senyuman Anak Bangsa

Setiap mimpi tentu mesti dicapai dengan usaha dan doa. Begitulah yang selalu ditanam oleh setiap relawan kepada anak-anak. Kita percaya dengan bermimpi yang besar, diiringi dengan usaha yang besar pula maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu.

Kita terlahir sebagai manusia yang hebat, setiap orang harus selalu berani untuk menggapai impian dan cita-citanya. Begitupun dengan anak-anak generasi penerus ini, setelah acara selesai ada senyuman yang menyembul dari tiap-tiap anak yang telah menerima insipirasi dari Relawan, mereka berani menuliskan mimpi dan cita-citanya di Pohon Cita-Cita. Ada beberapa anak yang menuliskan ingin menjadi "Pegawai Kementerian Keuangan", inilah bukti bahwa program ini memberi manfaat positif dalam kegiatan ini.

Senyuman yang akan selalu dikenang hingga mereka dewasa. Sebuah senyuman yang penuh arti, membekas dalam sanubari. Senyuman penuh harapan bahwa setiap insan yang terlahir di bumi ini merupakan orang-orang pilihan. Oleh sebab itulah akhir dari acara Kemenkeu Mengajar ini diselipkan sebuah agenda yang disebut acara refleksi. Setiap peserta yang diwakili dari 3 (tiga) SD di Banda Aceh yang menjadi sekolah tujuan di Kemenkeu Mengajar menyampaikan kesan dan pesannya.

Kesan yang teramat dalam adalah inspirasi itu dapat hadir bukan hanya melalui bekerja dengan maksimal semata dilingkungan kerjanya, dengan berbagi dan memberi inspirasi bagi anak negeri merupakan sebuah hal yang sangat baik untuk selalu dilakukan untuk memotivasi diri. Harapannya kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi seremoni yang hanya dilakukan sekali saja dalam setahun, namun jauh dari itu pesan-pesan yang disampaikan harus berulang di tiap tahunnya.

Inilah ajang yang dapat menyampaikan nilai-nilai Kementerian Keuangan secara lebih luas pada semua kalangan. Mempersatukan seluruh pegawai dalam naungan Kementerian Keuangan. Menjadi momen bagi kita untuk selalu bermimpi besar membangun kementerian keuangan yang lebih baik khususnya pada momen dalam memperingati Hari Oeang ini. Mari menggapai mimpi, memberi inspirasi pada anak negeri.

Sumber foto : Dokumen Pribadi

ANJING PELACAK (K-9):

DUKUNG DAN PERKUAT PENGAWASAN BEA CUKAI

Luasnya wilayah Indonesia menjadikan negara ini harus selalu dalam keadaan siaga akan masuknya barang ilegal yang dapat terjadi kapan saja. Bea Cukai, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penjaga pintu gerbang bangsa dari masuknya barang-barang ilegal, sudah sejak lama diandalkan untuk menjaga masyarakat dari segala serangan barang ilegal yang akan masuk ke Indonesia.

Tugas yang dilaksanakan oleh Bea Cukai sendiri, selain didukung oleh personel handal, juga dilengkapi oleh sarana yang memadai. Di antaranya mesin *x-ray* dan unit anjing pelacak yang keberadaan dan kemampuannya dalam mendeteksi barang larangan dan pembatasan (lartas) sudah diakui oleh semua pihak, karena prestasinya yang kian hari kian meningkat.

Khusus untuk sarana unit anjing pelacak (K-9) yang dimiliki Bea Cukai, sebenarnya sudah ada sejak tahun 1981. Keberadaannya diawali dengan dikirimnya satu orang pejabat Bea Cukai untuk mengikuti pengenalan akan program anjing pelacak di Front Royal, Washington, Amerika Serikat pada tahun 1978. Setahun kemudian, kembali empat pejabat Bea Cukai mendapat kesempatan mengikuti pendidikan tentang narkotika di AS. Hingga akhirnya Bea Cukai diberikan kesempatan untuk meminjam 2 ekor Anjing Pelacak Narkotika (APN) dari Bea Cukai Malaysia dan 2 ekor APN dari Bea Cukai Singapura yang digunakan pada program pencegahan masuknya narkotika ke daerah pabean Indonesia.

Sejak Oktober 1981, Bea Cukai mulai mengirim 2 orang pegawainya ke Front Royal Virginia yang disponsori oleh Unitet State (US) Customs Service, untuk menjadi *handler*. Selain itu, US Customs Service juga menyumbang 2 ekor *Labrador Retriever* yang sudah terlatih kepada Bea Cukai. Momentum itulah yang menandakan lahirnya unit APN Bea Cukai yang hingga kini telah banyak menghasilkan prestasi dalam membongkar sindikat narkoba yang masuk ke Indonesia.

Menurut Kepala Sub Direktorat Narkotika, **Eko Dharmanto**, selain bantuan dan pelatihan dari US Customs, di tahun yang sama, yaitu tahun 1981, Bea Cukai Australia juga menyumbangkan 6 ekor APN jenis *German Sheppard Dogs* yang ditujukan untuk pelatihan, termasuk mengirimkan pelatih yang sudah berpengalaman ke Indonesia. Dengan kerja sama yang dilakukan, baik bersama US Customs Service maupun Australian Customs, di bulan Juli 1981 Bea Cukai kembali mengirim 2 orang pegawai untuk belajar pada Drug Detector Dog Training di US Customs Service, dimana pada akhir pelatihan Bea Cukai diberikan 2 ekor APN sebagai bantuan hasil pelatihan tersebut.

"Sejak itulah Bea Cukai aktif mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan, baik di US Customs Service maupun Australia Customs. Bahkan beberapa tahun kemudian, Jepang juga ikut memberikan bantuan pelatihan termasuk bantuan APN. Pelatihan juga sudah di lakukan di Indonesia, khususnya di Kantor Pusat Bea Cukai dengan fasilitas yang cukup mendukung. Satu hal yang penting, sejak tahun 1997 hingga 2007, pelatihan berlangsung terus hingga 13 angkatan, dimana setiap pengadaan pelatihan diikuti dengan pengadaan APN," ungkap Eko.

Eko Dharmanto. Tahun lalu kami berhasil mengagalkan penyelundupan narkoba sebanyak 1,765 ton yang merupakan tegahan terbesar dalam sejarah Bea Cukai.

Lalu apa saja sebenarnya yang menjadi tugas dari APN Bea Cukai? Menurut Eko, tugas APN intinya ialah sebagai *community protector*. Dimana seekor APN dapat menjadi satu alat pengawasan yang cukup efektif dalam mendeksi narkotika dan psikotropika, dengan indra penciumannya yang cukup tajam dan sifatnya yang sangat dinamis, memungkinkan APN dapat dimobilisasi ke berbagai situasi dan kondisi.

"Dua hal yang utama dari tugas APN saat ini adalah berperan sebagai penutup dan *supporting*. Sebagai penutup, APN digunakan apabila dalam suatu operasi, petugas telah menentukan target, namun tidak dapat diperiksa dengan alat. Maka, APN diandalkan untuk menutup operasi tersebut, sekaligus menemukan barang yang dicari. Sedangkan, dalam perannya sebagai *supporting*, apabila target yang dicari tidak dapat ditemukan karena disembunyikan pada posisi yang sulit dijangkau oleh petugas, maka APN diturunkan untuk membantu menemukan narkoba tersebut," paparnya.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa unit anjing pelacak (K-9) Bea Cukai merupakan salah satu unit yang berfungsi untuk mendukung Bea Cukai dalam melaksanakan

Pelatihan. Penyayang binatang bukan satu-satunya syarat menajdi *handler* tapi passion menjadi prioritas utama saat ini.

tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan lalu lintas masuknya orang (penumpang) dan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, skema penempatan unit K-9 dilaksanakan berdasarkan tingginya frekuensi lalu lintas penerbangan atau pelayanan pada suatu daerah.

Unit K-9 merupakan salah satu sarana pengawasan yang paling efektif dan dapat didayagunakan oleh administrasi kepabeanan di berbagai negara untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, khususnya dalam rangka pendektesian penyelundupan narkotika, tembakau, uang tunai, senjata api, dan bahan peledak. Dengan kondisi keprihatinan dunia akan kejahatan tersebut, Bea Cukai terus berupaya agar barang-barang haram tersebut tidak masuk ke dalam negeri. Upaya dengan menggunakan unit anjing pelacak, dari masuk dan beredarnya narkotika dan psikotropika telah membawa hasil yang nyata walaupun belum maksimal.

Ketidakmaksimalan ini menurut Eko kian hari kian diperbaiki, dan satu hal yang paling krusial dalam peningkatan kemampuan dan keandalan *handler* maupun anjing pelacak adalah pada saat perekrutannya. "Berbicara soal *handler*, memang saat ini antusiasme pegawai untuk menjadi *handler* sangat tinggi. Namun demikian tidak semuanya bisa kita pilih, yang kita pilih untuk menjadi *handler*, pertama adalah pegawai tersebut bukan hanya sekedar penyayang anjing saja, tapi juga mau membaktikan diri di unit anjing pelacak minimal lima tahun. Jadi *passion* yang kita utamakan saat ini, bukan sekadar dia suka dengan binatang," teganya.

Dengan kontrak kerja selama lima tahun, diharapkan para *handler* akan maksimal dalam menjalankan tugasnya dan tidak akan diganggu dengan skema mutasi. Adapun tugas selanjutnya setelah *handler* menjalankan tugas lima tahun, pimpinan akan menempatkannya di tempat-tempat tugas yang dibutuhkan oleh unit lainnya.

Selain sistem rekrutmen yang diperbaiki, pengadaan anjing pelacak pun turut diperhatikan, sehingga dapat mendatangkan anjing yang baik dan optimal dalam menjalankan tugasnya. Memang untuk pengadaan anjing pelacak, Eko mengakui kalau hal tersebut masih mengandalkan dari Australia, mengingat penangkaran untuk anjing pengawasan hanya ada di sana. Di Indonesia sendiri, banyak penangkaran anjing, namun bukan untuk anjing pengawasan hanya sebatas anjing penjaga atau peliharaan.

"Untuk mendapatkan anjing pelacak yang baik itu tidak mudah, karena harus melihat bibitnya dan bagaimana dia merespon terhadap suatu perintah. Saat ini, kita mengandalkan Australia untuk pengadaannya karena di sana terdapat penangkaran khusus anjing pengawasan yang dibutuhkan untuk unit K-9," tutur Eko, yang juga menjelaskan selain membeli anjing dari Australia, Bea Cukai juga mendapat hibah dari beberapa negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan lain-lain.

Untuk mendeksi narkoba, saat ini memang sangat dibutuhkan unit anjing pelacak, selain alat pendeteksi lainnya, karena anjing pelacak memiliki kemampuan menemukan narkotika dengan cara mencari bau narkotika tersebut. Keunggulan lainnya adalah pertama, anjing pelacak tidak membutuhkan listrik, dimana pada umumnya dibutuhkan alat pendeteksi narkotika yang pengoperasiannya membutuhkan mesin. Kedua, anjing pelacak sangat dinamis atau mudah mobilisasinya dalam berbagai situasi dan kondisi objek pelacakan. Ketiga, anjing pelacak tidak membutuhkan *consumable aid* atau bahan habis pakai yang digunakan untuk mengoperasikan alat pendeteksi narkotika. Keempat, anjing pelacak tahan terhadap kondisi lingkungan kotor dari pada alat berbasis mesin.

Selain itu, anjing pelacak dapat lebih maksimal, optimal, dan cepat digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan dengan dimensi besar,

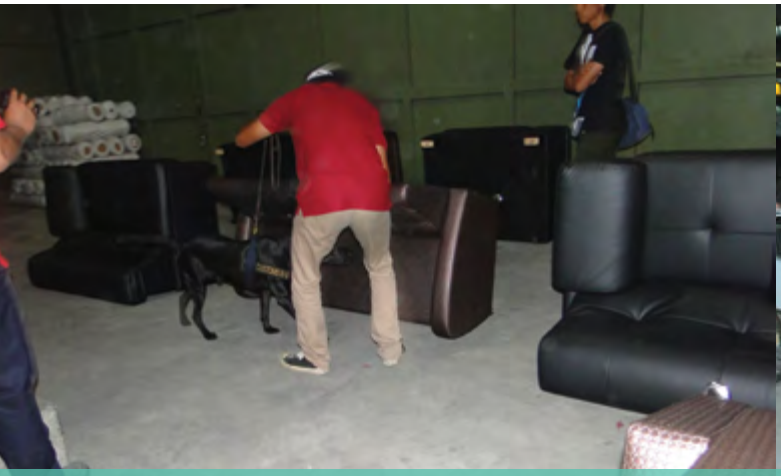

Peran *supporting*. Tegahan di daerah Dadap mengandalkan anjing pelacak yang berperan sebagai *supporting* dalam operasi.

Tugas Anjing pelacak. Kedepan DJBC bukan hanya menfokuskan tugas anjing pelacak pada narkotika tapi juga melebar ke bidang lainnya, seperti bahan peledak, uang, dan limbah berbahaya.

seperti sarana pengangkut, serta objek pemeriksaan dalam jumlah yang banyak. Keunggulan lainnya, adalah anjing pelacak dapat dikembangkan untuk mendeteksi barang larangan dan pembatasan selain narkotika, seperti mata uang, tembakau, CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), bahan peledak, maupun senjata api.

Akan keunggulan anjing pelacak tersebut, kedepan ini Bea Cukai juga akan mengembangkan anjing pelacak bukan hanya untuk narkotika, melainkan juga untuk mendeteksi mata uang, bahan peledak, dan limbah berbahaya. Hal ini tentunya akan dapat segera terwujud setelah unit narkotika menjadi unit sendiri atau Direktorat Narkotika yang dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan.

"Indonesia saat ini sudah darurat narkoba, dimana 55 orang meninggal setiap harinya akibat narkoba. Faktanya, 1 gram dapat dipakai 5 orang dan 1 kg dipakai 5.000 orang. Dengan keberhasilan unit narkotika saat ini, sejak 2015 hingga 2016 yang mencapai 1,765 ton, berarti berapa banyak jiwa yang telah terselamatkan? Dan ini adalah prestasi Bea Cukai terbesar untuk unit anjing pelacaknya," ungkapnya bangga.

Dijadikannya Indonesia bukan lagi sebagai negara transit tetapi menjadi negara tujuan narkotika, sudah pasti membuat semua orang harus waspada akan peredaran barang haram tersebut. Karena menurut Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, kejahatan narkoba merupakan skema peran nomor 4. Dimana untuk melumpuhkan suatu negara dapat dengan melemahkan dulu negara tersebut, yang salah satunya dengan narkoba.

Jika negara ini sudah menjadi negara tujuan, tentunya peran Bea Cukai pun semakin berat untuk menghalau masuknya narkoba. Untuk itu, penyebaran *handler* dan anjing pelacak Bea Cukai pun diperbanyak. Untuk saat ini sudah ada 7 wilayah yang memiliki unit K-9, antara lain Jakarta sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan anjing pelacak Bea Cukai melalui Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang memiliki 38 APN dengan 29 dog *handler*, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara yang memiliki 6 APN dengan 6 dog *handler*, Kantor Bea Cukai Batam yang memiliki 3 APN dengan 4 *dog handler*, Kanwil Bea Cukai Jatim I yang memiliki 6 APN dengan 6 *dog handler*, Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT yang memiliki 6 APN dengan 6 dog hadler, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY yang memiliki 4 APN dengan 4 dog *handler*, dan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur yang memiliki 3 APN dengan 3 dog *handler*. Dari penyerabaran tersebut maka saat ini Bea Cukai memiliki 73 ekor APN dengan 58 *dog handler*.

Untuk membuahkan hasil yang optimal memang membutuhkan suatu kerja keras yang tidak pantang menyerah. Unit anjing pelacak yang setiap hari harus mengendus narkoba tentunya juga membutuhkan suatu perawatan yang maksimal. Terkait dengan perawatan inilah banyak hal yang harus lebih diperhatikan dan diprioritaskan oleh Bea Cukai agar hasil yang sudah didapat saat ini dapat terus meningkat dan makin optimal menghalau masuknya narkoba ke Indonesia. Jika unit anjing pelacak mampu menjadi andalan Bea Cukai tentunya tugas yang lebih sulit ke depan nantipun akan mampu dilaksanakan Bea Cukai dengan seoptimal mungkin.

(Supriyadi.W)

IMPORTASI CAKRAM OPTIK

Pertanyaan:

Saya mau menanyakan info dari teman di Kementerian, bahwasanya sekarang batasan impor, khususnya DVD film maksimal 100 dollar, di atas itu dikenakan pajak impor. Apakah hal tersebut benar?

Terima kasih.

Ciwin Humaira

Jawaban:

Terkait dengan importasi cakram optik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012.

Dalam pasal 1 Permendag 76/M-DAG/PER/9/2015 disebutkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian pengecualian batasan jumlah cakram optik yang diimpor oleh perorangan melalui jasa kiriman, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) keping sudah tidak berlaku lagi, yang artinya tidak ada batasan jumlah berapapun yang hendak diimpor.

Terkait dengan batasan impor 100 dollar, apabila yang dimaksud adalah terkait dengan pembebasan atas impor barang kiriman adalah benar adanya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Dalam Pasal 13 PMK Nomor 182/PMK.04/2016 disebutkan bahwa :

1. Ayat (1) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD100.00 (seratus United States Dollar) untuk setiap Penerima Barang per kiriman.
2. Ayat (2) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman tersebut.

Sebagai contoh perbandingan dengan PMK Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, bahwa berapapun nilai barangnya akan dikurangi dengan pembebasan sebesar USD 50, sehingga bila harga barang adalah 70 USD maka nilai barang yang dihitung dalam pembebanan bea masuk sebesar USD 70-50 = USD 20. Sedangkan berdasarkan PMK 182/PMK.04/2016 batasan nilai pabean sebesar USD 100 tersebut berarti jika nilai barang sebesar USD 110 maka tidak ada pembebasan sebesar USD 100, karena nilai USD 100 tersebut bersifat nilai threshold (batas atas) pengenaan pajak, bukan sebagai pengurang nilai. Jadi terhadap barang senilai 110 tersebut akan dihitung dalam pembebanan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) secara utuh.

Demikian kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Bravo Bea Cukai 1500225.
Salam,

Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga

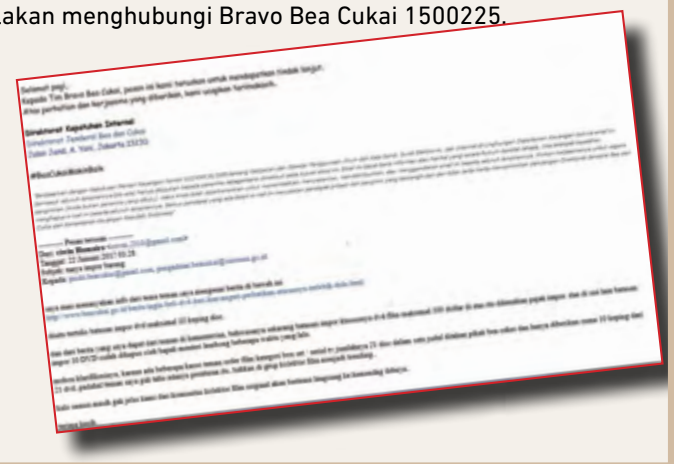

BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA

BTKI

WCO

World Customs Organization

Harmonized System (HS)

- HS 1996
- HS 2002
- HS 2007
- HS 2012
- HS 2017

AHTN Task Force

ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)

- AHTN 2004
- AHTN 2007
- AHTN 2012
- AHTN 2017

2017 2

D

Sistem penomoran mengikuti sistem klasifikasi AHTN 2017

10 digit → 8 digit

(0511.91.00.30) (0511.91.20)

J

Kriteria perubahan meliputi :

- Perubahan editorial atas uraian barang
- Perubahan catatan-catatan pada HS
- Penambahan pos tarif baru
- Penghapusan pos tarif
- Penggabungan pos tarif
- Pemecahan pos tarif

B

Kriteria teknis (Amandemen AHTN TF)

- Sub posASEAN dapat dibuat jika nilai perdagangan produk tersebut signifikan di negara anggoita
- Sub pos ASEAN tidak perlu dibuat jika tarif bea masuk di negara anggota adalah sama
- Pembentukan subpos ASEAN harus mempertimbangkan konvensi internasional yang terkait dengan pembentukan nomenklatur tarif
- Sub pos nasional masing-masing negara anggota dapat dibuat untuk tujuan non-tarif statistik dan lainnya pada tingkat seteleah 8 digit angka numerik AHTN
- Pembentukan sub pos ASEAN harus menghindari kriteria penggunaan akhir (*end use*)
- Pembentukan sub pos ASEAN harus mempertimbangkan kriteria amandemen HS
- Review dari AHTN harus membantu pemahamam, interpretasi, dan klasifikasi barang yang seragam

C

ASEAN *Harmonised Tariff Nomenclature* (AHTN)

Prinsip-prinsip Implementasi AHTN oleh negara anggota asean :

TRANSPARANSI

Negara anggota akan menerbitkan semua hukum, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan AHTN dan membuat mereka tersedia untuk publik secara cepat, transparan, dan mudah diakses

KONSISTENSI

Negara anggota akan memastikan aplikasi yang konsisten dari AHTN di setiap negara anggota ASEAN

EFISIENSI

Negara anggota akan memastikan bahwa AHTN digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan administrasi pengeluaran barang untuk memfasilitasi perdagangan

BANDING

Negara anggota wajib menyediakan mekanisme banding bagi importir dan eksportir terhadap keputusan klasifikasi yang dibuat berdasarkan AHTN

Penerapan 8 digit untuk seluruh negara ASEAN

Mempermudah proses impor dan ekspor antarnegara ASEAN

Meningkatkan volume perdagangan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

"Di bawah temaram cahaya lampion, ada banyak cerita humanis yang bisa ditangkap melalui mata lensa".

Tidak hanya warga Tiong Hoa yang merayakan suka cita malam tahun baru imlek, melainkan banyak warga kota Surakarta yang juga ikut menikmati keindahan malam imlek 2017 dengan berkumpul di pusat acara yaitu jalan Pasar, Gede Surakarta. Ada yang sekedar melihat-lihat keramaian mengatasi kejenuhan, ada yang menikmati kuliner jajanan, ada juga yang menggunakan acara ini sebagai kesempatan untuk mengabadikan momen-momen humanis di bawah keindahan cahaya lampion yang berwarna-warni.

Foto by:
-Dovan
-Rezky
-Iman

KALEND OSEN DAN KISAH BERDIRINYA KAMPUNG INGGRIS

Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ungkapan ini menjadi kenyataan dalam perjalanan kehidupan Kalend Osen yang diyakini sebagai orang yang berjasa pada awal terbentuknya Kampung Inggris di Desa Palem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Sebelum bertemu dengan Pak Kalend, kami sempat berkeliling di sekitar Kampung Inggris. Saat ini, di Desa Pelem dan Tulungrejo tersebar ratusan lembaga kursus bahasa asing khususnya bahasa inggris. Hal yang menarik, di kampung ini, tempat kursus bukan hanya dilaksanakan di dalam ruangan tertutup, tetapi banyak yang sengaja dilakukan di ruang terbuka, seperti di teras rumah dan pondok-pondok terbuka.

Proses belajar-mengajar berjalan sederhana saja. Di pondok terbuka hanya digelar tikar atau alas seadanya dan peserta kursus duduk lesehan mendengarkan guru yang sedang mengajar. Peserta kursus kelihatan berkelompok sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada yang berdiri sambil praktek percakapan dalam bahasa inggris antar sesama kursus dengan suara keras tanpa menghiraukan orang yang lalu lalang di pinggir jalan.

Peserta kursus yang datang dari berbagai kota sengaja datang ke kampung ini untuk belajar. Biasanya, peserta kursus tinggal beberapa bulan di desa ini dengan menyewa kamar atau indekos di rumah-rumah warga setempat. Sebagai alat transportasi mereka menggunakan sepeda, mungkin karena jarak antara tempat indekos dengan tempat kursus tidak terlalu jauh. Kampung ini kelihatan cukup ramai dan berkembang, dengan adanya rumah-rumah makan sederhana, indekos, dan peyewaan sepeda.

Setelah melihat berbagai kursus yang bertebaran di sekitar Kampung Inggris, kami sengaja mencari tempat kursus yang didirikan Pak Kalend, yang merupakan tempat kursus pertama di kampung ini. Ternyata, bangunan Basic English Course (BEC) milik Pak Kalend sudah berdiri megah dan sebagaian bangunannya bertingkat bagaikan komplek. Di tempat ini, selain difungsikan sebagai tempat kursus, juga sekaligus sebagai tempat tinggal Pak Kalend, lengkap dengan tempat parkir yang ditata rapi.

BEC kelihatan ramai dikunjungi ratusan siswa, ada yang sedang belajar, ada yang baru dating, dan ada yang mau pulang. Pak Kalend sendiri sedang mengajar di salah satu sudut ruangan kursus, sehingga staf BEC mengizinkan kami untuk menunggu beliau selesai memberikan pelajaran. Sempat kami melihat Pak Kalend mengajar di kelas, dengan usianya yang tidak lagi muda, ia masih memiliki semangat mengajar yang luar biasa.

Usai mengajar, dengan ramah ia menyapa kami dan menanyakan apa yang bisa dibantu. Lalu kami menyampaikan kepada beliau, bahwa kami ingin mengetahui asal mula terbentuknya Kampung Inggris. Setelah menghela napas, Pak Kalend mulai menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya hingga ia sampai dan menetap di Pare.

Asal mulanya, pada tahun 1976, pria kelahiran 4 Februari 1945 tersebut adalah seorang santri asal Kutai Kartanegara yang tengah menimba ilmu di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Menginjak kelas lima, ia terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena tidak kuat menanggung biaya pendidikan. Bahkan, keinginannya pulang kembali ke kampungnya gagal karena tiada biaya.

Dalam situasinya yang sulit itu, salah satu temannya memberitahukan adanya seorang ustaz yang bernama K.H. Ahmad Yazid di Pare yang menguasai delapan bahasa asing. Kalend muda kemudian berniat untuk berguru, dengan harapan setidaknya dapat menguasai satu atau dua bahasa asing darinya. Ia lalu mulai tinggal dan belajar di Pesantren Darul Falah, Desa Singgahan, milik Ustaz Yazid.

Dalam sebuah kesempatan, datang dua orang tamu mahasiswa dari IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Kedatangan dua mahasiswa itu adalah untuk belajar bahasa Inggris kepada Ustaz Yazid sebagai persiapan menghadapi ujian negara yang akan dihelat dua pekan lagi di kampusnya. Kebetulan, saat itu Ustaz Yazid tengah bepergian ke Majalengka dalam suatu urusan, sehingga kedua mahasiswa itu hanya ditemui oleh ibu Nyai Ustaz Yazid. Entah dengan alasan apa, oleh Nyai Ustaz Yazid, kedua mahasiswa itu diarahkan untuk belajar kepada Kalend.

"Waktu itu saya sedang menyapu masjid dan dua mahasiwa itu menghampiri saya," kenang Kalend akan masa lalunya. Dua mahasiswa itu kemudian menyodorkan beberapa lembaran kertas yang berisi 350 soal berbahasa inggris. Setengah ingin tahu, Kalend memeriksa soal-soal itu dan kemudian meyakini dapat mengerjakannya lebih dari 60 persen. Kalend menyanggupi permintaan itu dan mereka akhirnya terlibat proses belajar mengajar yang dilakukan di serambi masjid area pesantren. Pembelajarannya cukup singkat, dilakukan secara intensif selama lima hari saja.

"Tak disangka, sebulan kemudian mereka (dua mahasiswa) kembali dan mengabarkan telah lulus ujian. Betapa bahagianya saya waktu itu," kata kakek yang selalu mengenakan peci hitam ini. Keberhasilan dua mahasiswa itu tersebar di kalangan mahasiswa IAIN Surabaya dan banyak dari mereka akhirnya mengikuti jejak seniornya dengan belajar kepada Kalend. Promosi dari mulut ke mulut pun akhirnya menjadi awal terbentuknya kelas pertama.

Sejak saat itu, pada 15 Juni 1977 di desa setempat, Pak Kalend mendirikan lembaga kursus dengan nama Basic English Course (BEC) dengan enam siswa pada kelas perdana. Para siswa tersebut terus dibina dan dididik tidak hanya kemampuan bahasa inggris, namun juga ilmu agama serta kecakapan akhlak.

Pada awal berdiri, fasilitas yang dimiliki sangat terbatas, karena hanya berlokasi di teras masjid yang diperuntukkan untuk anak-anak desa yang kurang menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya, pelajaran dilokasikan di rumah-rumah hingga akhirnya sampai ia memiliki gedung sendiri. Begitulah perjuangan Pak Kalend yang konsisten dan pantang menyerah hingga mengantarkan BEC menjadi begitu terkenal dan lulusannya diakui kualitasnya. Hal inilah yang mengundang banyak pendatang dari seantero nusantara untuk belajar bahasa Inggris disana. Sampai-sampai, tidak ada tempat lagi di BEC untuk menampung para calon murid tersebut.

Nah, dari sinilah mulai berkembang beberapa lembaga kursus baru untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Beberapa lulusan BEC tetap mengajar di sana dan beberapa yang lain mendirikan lembaga kursus sendiri. Lembaga kursus yang didirikan pun semakin bervariasi dari segi waktu, spesialisasi program, metode, serta biayanya.

Akan tetapi, tidak semua lulusan BEC memilih untuk mengajar dan mendirikan kursus sendiri. Ada juga yang buka warung, jualan bakso, dagang soto, membuka tempat fotokopi, dan usaha lainnya. Istimewanya, mereka semua lancar berbahasa Inggris. Mungkin dari sinilah asal ungkapan "Bahkan tukang bakso sampai tukang soto pun bisa berbahasa Inggris di Pare".

Harapan Pak Kalend, yang juga dipercaya sebagai Ketua Paguyuban lembaga kursus di tempat ini, ialah supaya semua pihak, baik pemilik lembaga kursus, masyarakat setempat, dan aparat desa, sama-sama dapat memelihara bagaimana caranya Kampung Inggris ini dapat tetap dipertahankan. Salah satunya supaya para pemilik kursus berusaha tidak mengecewakan konsumen, dan kemudian memberikan pelayanan yang baik serta dukungan dari masyarakat setempat.

(Piter)

Kalend Osen sedang mengajar.

Belajar dengan duduk lesehan.

BEC milik Kalend Osen.

Suasana Kampung Inggris.

Sepeda sebagai alat transfortasi.

AKHIR HIDUP

I know you're tired but come, this is the way
Jalaluddin Rumi

Masjid itu terletak di ujung Kantor Wilayah. Di sebelah utaranya berdiri Pura megah dengan ukiran artsitik. Di sebelah selatan berderet tanaman singkong yang ditata dengan apik. Masjid sederhana itu memiliki dua lantai. Lantai pertama dilengkapi karpet hijau mewah, rak buku dengan koleksi seadanya, mimbar polos tanpa sentuhan ukiran, dan beberapa mushaf ustmani yang sudah mulai menguning.

Pagi itu, kala mentari baru dua puluh menit terbit dari timur, Raden Taufik Wiralaga, yang kemudian disebut Taufik, bertafakur dalam kesendirian. Pandangannya kosong menghadap tempat sujud, posisi duduknya bersila, ada bekas-bekas air wudhu menetes ke kerah bajunya. Sesekali mulutnya mengucap sesuatu yang tidak jelas. Lebih menyerupai ceracau seorang mabuk.

"Ampun... Aduh.. Ampun.. Aduh.. Jangan.."

Air mata menganak sungai mebasahi pipinya. Suaranya semakin parau dan pandangannya semakin dalam. Komat-kamit semain tidak keruan. Badannya bergetar hebat, matanya kosong. Tiba-tiba, ia bisa mengusai dirinya sendiri dan berdzikir pelan, "Allah, Allah, Allah..."

Dzikirnya pelan seiring dengan kondisinya yang semakin tenang. Nafasnya mulai teratur. Taufik mulai menguasai dirinya, wajahnya kembali cerah dan aura lembut melingkupi tubuhnya.

"Allah..Allah..Allah", ucapnya sambil menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ia tidak mau menyelesaikan kalimat *tahlil* itu dalam dzikir karena takut malaikat maut mencabut nyawanya saat kalimat *Laa* terucap. Yang berarti penolakan atas keimananya.

Dzikirnya semakin hebat dan dalam. Ia merasakan dirinya semakin ringan. Sebuah berkas cahaya putih mendekatinya, masuk kedalam *qalb* nya. Ia merasakan dirinya mengembang memenuhi ruangan masjid. Membesar, membesar, membesar sampai ia kehilangan kesadaran dan memasuki dimensi lain.

Dalam dimensi itu, ia melihat latar belakang pohon pinus yang berderet di perbukitan. Di antara hutan itu sebuah danau biru dipenuhi ikan yang terlihat jelas dari pinggiran. Pasirnya hitam, airnya tidak beriak. Tidak ada angin, tidak ada kabut, tidak ada matahari dan langit dipenuhi gemintang. Sesuatu terjadi mendadak. Air danau tiba-tiba mengalami pasang. Pusarannya menghisap tubuh Taufik. Dalam, dalam, terus ke dalam dasarnya.

Tapi... Ia tidak menemukan dasar itu. Dalam pusaran itu Taufik diberi penglihatan ilahiah tentang masa hidupnya. Ia melihat wajah ibunya yang tersenyum saat ia masih bayi. Wajah bapaknya yang lelah selepas bekerja. Ia merasa rindu dengan mereka. Ia berusaha menggapai mereka, tapi mereka hanyalah bayang-bayang di antara air danau. Kemudian, ia melihat dirinya sewaktu kecil. Ia berlari ke sana ke mari dengan riang, tanpa beban, penuh semangat dan rasa ingin tahu. Bapak dan Ibunya selalu mengecup keningnya sebelum berangkat sekolah. Ia merasakan pengalaman itu begitu dekat, sangat dekat.

Lama-lama bayangan itu pudar. Ia kemudian melihat sosok remajanya sedang berduaan dengan seorang wanita di pojok kafe sebuah kota. Wajahnya cantik, tubuhnya langsing. Tapi, ia juga melihat kelakuan buruknya ketika berbohong kepada orang tuanya, pulang malam tanpa kabar, dan selalu meminta uang demi membelikan hadiah bagi sang kekasih. Ia juga melihat ibunya berdoa sambil menangis dalam tahajudnya. Ia merasa bersalah, "Bu, maafkan, Taufik, Bu..", bisiknya lirih.

Tiba-tiba semua berubah hitam. Ada titik putih kecil dikejauhan yang mendekat. Taufik mendekati titik itu. Pemandangan mendadak berubah. Ia melihat dirinya sedang duduk dengan seragam berpangkat di depan komputer. Ia sadar bahwa ia sedang melihat dirinya lagi. Ia melihat perubahan tanda pangkatnya. Semakin lama semakin semarak. Di antara berubahan itu berseliweran pemandangan aneh. Wanita-wanita penghibur, botol wisky, kartu remi, asap rokok, perbicangan dengan tertawaan, anak buahnya yang pernah ia sakiti, istrinya yang menangis, anaknya yang kepergok merokok, orang tuanya dengan kain kafan, nisan, kemudian titik itu menghilang, gambaran itu pudar, semua kembali hitam.

Taufik terjebak dalam gelap itu. Ia tidak paham ia berada dimana dan akan menuju kemana. Ia tidak bisa merasakan tubuhnya. Ia tidak ingat lagi apa yang terakhir ia lakukan. Akhirnya ia berzikir, "Allah, Allah, Allah.." Gelap itu menghilang, Taufik merasakan cahaya putih membawanya terbang entah kemana.

Adzan Dzuhur berkumandang, masjid gempar, seorang pegawai ditemukan meninggal dalam persujudannya.

Ferry Fadillah

Stephanos Ivan Pramujito Maju terus Custom indonesia
Like · Reply · Message · January 5 at 5:52am

Purwoko Sidarto Selamat dan Semangat terus BC Ng R
Like · Reply · Message · January 6 at 1:40pm

Dewa Budik Bravo BC NR
Like · Reply · Message · January 6 at 9:09am

Rival Junior Mantap...
Like · Reply · Message · January 8 at 12:48am

Achmad Bachrudin Qorib Mantaapp...goodluck always Customs
Like · Reply · Message · 1 · January 6 at 6:36pm

Rizal Mansjuri Bravo bc..hajarrrr trus mafia itu..
Like · Reply · Message · January 6 at 9:03pm

Laksono Pambudi Maju terus custom..
Like · Reply · Message · January 6 at 8:20pm

Nanang Apandi Ini baru bukti keajaiban
Like · Reply · Message · January 7 at 8:55am

Anton Mulyono Bravo BC
Like · Reply · Message · January 7 at 7:26pm

Os Sirait Bravooo BC
Like · Reply · Message · January 7 at 1:43pm

Alfath Riadus Maju terus customs,untuk bea cukai makin baik
Like · Reply · Message · January 7 at 12:13pm

Ketut Suardinaya Bravo Bea Cukai...
Like · Reply · Message · January 11 at 11:59am

Devi Anggriyani Bagus sekali, harus lebih waspada di jalur perairan, keluar masuknya barang haram kurang terkendali, Dan jarang di publikasikan dimedia.
Like · Reply · Message · January 10 at 7:43pm

Laksono Pambudi #Beacukaimakinbaik
Like · Reply · Message · January 10 at 6:21pm

Hantu Laut Hantu Laut Mantap.....
Custom & BNN kerap nyelamatkan dan mempernjang umur masyarakat di Indonesia dengan menangkap Narkotika.
Tingkat kan terus ya sesepuh !!!!!
Like · Reply · Message · January 24 at 10:43am

Stephanos Ivan Pramujito Maju terus BC
Like · Reply · Message · January 24 at 12:12pm

Leha Imuet semoga adanya KITE IKM bisa membantu masarakat kecil bakat Dan bisnis nya
Unlike · Reply · Message · 1 · January 31 at 7:46am

Setyaningsih Sri Wow bisa export buah naga ke hk. Hhhee..
Like · Reply · Message · January 31 at 3:34pm

KALKULATOR PABEAN

Membantu Anda untuk menghitung Bea Masuk dan Jaminan

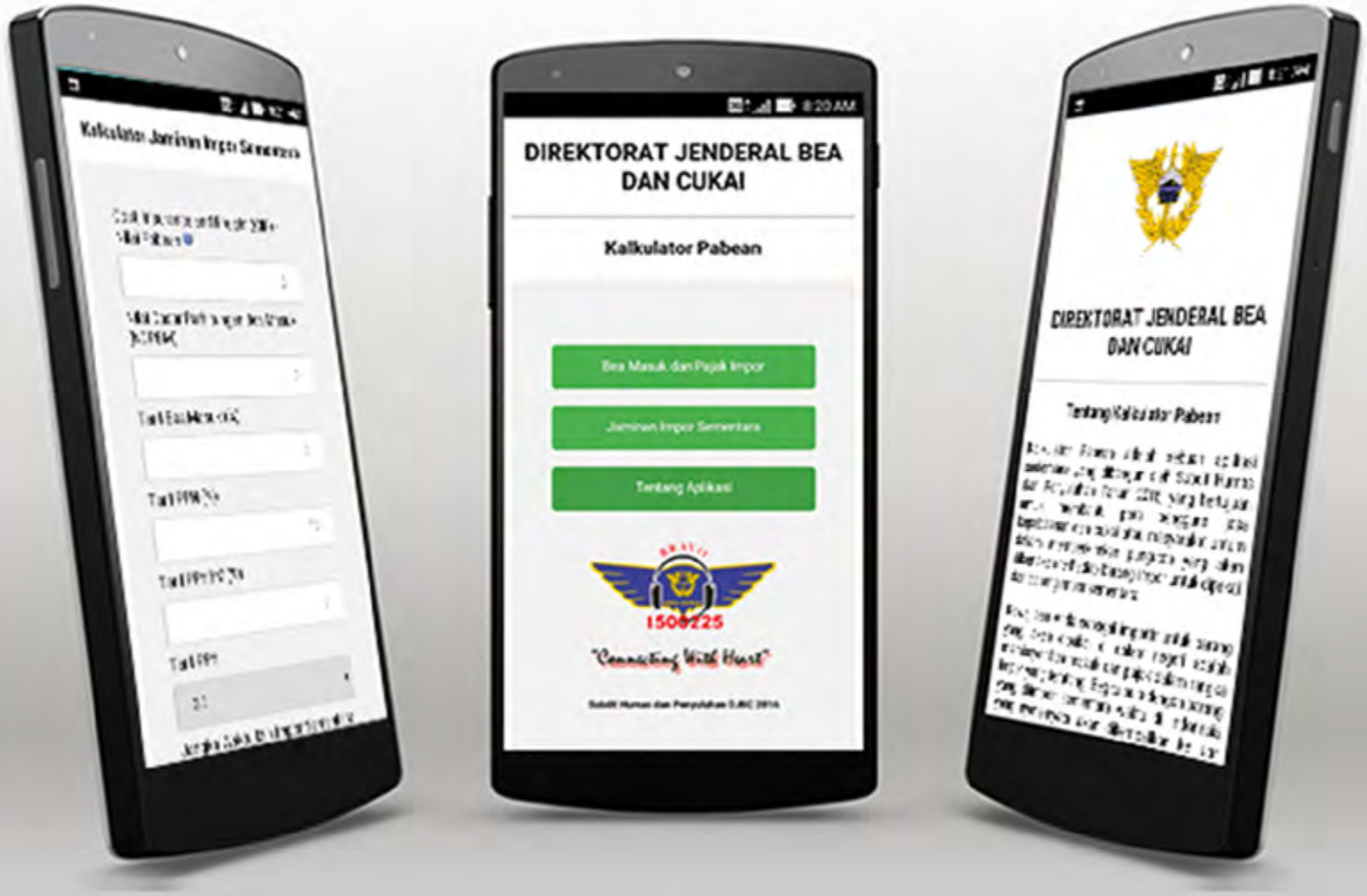

- IMPOR UNTUK DIPAKAI
- IMPOR SEMENTARA

https://goo.gl/vtYRnS

ANDROID APP ON Google play

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MEDIA CENTER BEA CUKAI

OFFICIALLY ANNOUNCED

goo.gl/tVNEE7

Available on the Google play